

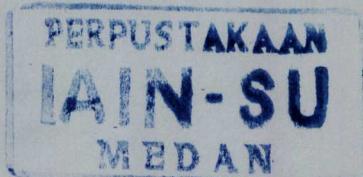
37/LP/LP2M/03/2014

Laporan Penelitian

WAWASAN MAHASISWA JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
DALAM KAJIAN MULTIKULTURALISME BERBASIS
KEARIFAN LOKAL

Team Peneliti:

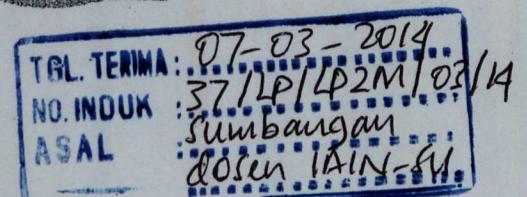
Dra. Husna Sari Siregar, M.Si
Drs. H. Indra, MA
Ismet Sari, M.Ag



Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN SU Medan



P
306
SIR
10
C.1



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2013

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN KELOMPOK**

1. a. Judul Penelitian : WAWASAN MAHASISWA JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA DALAM KAJIAN MULTIKULTURALISME BERBASIS KEARIFAN LOKAL

b. Bidang Penelitian : Pengembangan
c. Kategori : Kelompok

2. Peneliti

a. Nama Lengkap : 1. Dra. Husna Sari Siregar, M.Si
NIP. 19680401 198912 2 001

2. Drs. H. Indra, MA
NIP. 19631231 200604 1 030

3. Ismet Sari, M.Ag
NIP. 19740110200710 1 002

b. Fakultas : Ushuluddin

c. PTAI : IAIN Sumatera Utara

3. Jumlah Tim Peneliti : 3 (tiga) orang

4. Lokasi Penelitian : Fakultas Ushuluddin IAIN SU

5. Waktu Penelitian : 4 bulan (Juli – Nopember 2013)

6. Biaya yang diperlukan: Rp 15.000.000,-
(Lima Belas Juta Rupiah)

Medan, 25 November 2013

Mengetahui:

Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (LP2M)
IAIN Sumatera Utara



Peneliti,

Dra. Husna Sari Siregar, M.Si
NIP. 19680401 198912 2 001

DESKRIPSI

DAFTAR PENGANTAR

Berikut ini adalah daftar pengantar yang termasuk dalam buku ini.

ABSTRAKSI

Masyarakat Indonesia yang majemuk dan memiliki latar belakang kebudayaan yang beragam, jelas memerlukan kerangka acuan untuk dijadikan pegangan dalam pergaulan nasional masa kini. Oleh karena itu, nilai-nilai tradisional yang mengandung kearifan, persamaan, multikultural, dan bisa dijadikan pegangan bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia di mana pun tempat tinggalnya, perlu digali dan diteliti kemudian ditawarkan sebagai alternatif yang baik untuk perkembangan kehidupan sosial keagamaan yang baru dan serasi. Penawaran alternatif itu penting, karena tidaklah mudah untuk memaksakan nilai-nilai yang dianggap baik ke dalam pergaulan nasional bila tidak dengan mengenal lahar belakang kultural masyarakat yang beragam.

Untuk itu diperlukan agen-agen yang trampil dan kompeten dalam mengelola interaksi masyarakat yang multikultur tersebut. Dengan demikian, mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama, dalam wacana multikulturalisme dan kearifan lokal posisinya menjadi central dan penelitian pada subjek ini penting untuk dilakukan sebagai kajian dan penguatan kompetensi ke arah yang lebih baik, cerdas, dan kompeten. Karena konsep kearifan budaya lokal diperkirakan hampir dimiliki setiap kelompok etnis atau suku bangsa, maka kompetensi dan wawasan nilai-nilai multicultural berbasis kearifan budaya lokal di kalangan mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama, termasuk subjek penelitian yang penting. Hal itu antara lain disebabkan posisi strategis mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama sebagai agen-agen akademis dan sosial, dapat disebut merupakan kader-kader multikultural. Dengan demikian, dalam konteks penguatan wawasan dan kompetensi mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama, subjek multikulturalisme dan kearifan lokal menjadi strategis dan menarik untuk dilakukan penguatan kajian dan studi ilmiah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah menjadikan langit dan bumi beserta isinya sebagai pertanda kebesaran-Nya dan menjadi rahmat bagi sekalian alam. *Rabb* seluruh makhluk baik yang berada di langit maupun yang di bumi, atas berkah, nikmat, dan rahmat-Nya. Yang telah diberikan kepada setiap makhluknya khususnya kesehatan dan kesempatan sehingga penulisan proposal penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Shalawat dan salam marilah kita berikan kepada Rasulullah SAW, nabi akhir zaman penutup para nabi, yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran, menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan sehingga umat manusia menjadi umat yang *berakhlek al-karimah* untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.

Penelitian ini, harus kami akui, menjadi mungkin terutama karena dorongan yang kami terima dari Kepala Pusat Penelitian IAIN Bapak Prof. H. Abbas Pulungan, para Konsultan/pamong penelitian seperti Bapak Drs. Parluhutan Siregar, M.Ag, Bapak Rustam, MA, serta Ibu Neli, MA. Mereka tidak hanya duduk sebagai pimpinan dan konsultan penelitian di lembaga tersebut, melainkan telah menginspirasikan pendekatan dan

subjek bahasannya. Mereka juga memberi komentar-komentar yang luas terhadap draf manuskrip proposal ini. Sedangkan menyangkut tahapan keseluruhan dari aktivitas penelitian dan penulisan ini, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih saya kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini baik lembaga maupun individu.

Akhirnya, sebagai sebuah penelitian, tulisan ini memerlukan koreksi dan perbaikan dari berbagai pihak, agar sasaran dan tujuan dari penelitian ini dapat tercapai dengan baik dan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Medan, Nopember 2013

Peneliti,

Dra. Husna Sari Siregar, M.Ag
NIP 19680401198912 2 001

- A. Kandab-kandab Kelembutan Budaya Lokal
- B. Modifikasi Islam di Kelembutan Lokal
- C. Didaktika Islam dan Kelembutan Kebudayaan Lokal

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup	7
E. Signifikansi.....	8
F. Kerangka Konseptual	9
G. Kerangka Teori.....	16
H. Metodologi Penelitian	19
E. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II : MENGENAL JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA	
A. Profile Jurusan Perbandingan Agama	24
B. Kurikulum dan Pembelajaran	29
C. Aspek Sumber Daya Manusia	34
D. Mahasiswa	47
E. Aspek Sarana dan Prasarana.....	56
F. Aspek Menejemen	64
G. Penjamin Mutu	66
BAB III: KATEGORI ANALISIS HUBUNGAN AGAMA, MULTIKULTURALISME DAN KEARIFAN LOKAL	
A. Kaidah-Kaidah Kearifan Budaya Lokal	68
B. Multikulturalisme dan Kearifan Lokal	81
C. Dialektika Islam dan Keragaman Kebudayaan Lokal.....	94

BAB IV : WAWASAN MULTIKULTURALISME DAN UPAYA STRATEGIS PENGUATANNYA	
A. Wawasan Mahasiswa Tentang Multikulturalisme dan Kearifan Budaya Lokal	106
B. Pendayagunaan Wawasan Mahasiswa Tentang Multikulturalisme	131
C. Strategi Penguatan Wawasan Mahasiswa tentang Multikulturalisme Berbasis Kearifan Budaya Lokal.....	141
- Evaluasi dan Penyempurnaan Kurikulum	141
- Pengembangan dan Penguatan Kerja sama	157

BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	162
B. Rekomendasi.....	163

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Masalah

Kenyataan secara niscaya menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, khususnya di Sumatera Utara dihuni oleh beragam budaya (*multi cultural*) dan agama (*multi religion*) yang keberadaannya diakui oleh negara dan menjadi anutan bagi umat masing-masing dalam melakukan aktivitas kehidupan sosial keagamaan. Kemajemukan tersebut adalah kekayaan dan modal sosial (*sosial capital*) bangsa serta merupakan sumber kearifan yang luhur yang dapat menjadi perekat interaksi kehidupan dan hubungan sosial keagamaan sekaligus energi pengikat yang mempersatukan berbagai elemen masyarakat yang heterogen.¹

Dalam kurun beberapa waktu terakhir, terutama sejak bergulirnya era reformasi di Indonesia pada 1998, konsep-konsep kearifan berbasis budaya lokal semakin banyak menjadi bahan perbincangan publik maupun objek kajian dan penelitian. Setidaknya ada dua hal yang dapat dikatakan melatarbelakangi semakin tingginya minat dan perhatian orang untuk mengkaji dan menggali kembali konsep kearifan budaya lokal. Pertama, meningkatnya kasus-kasus

¹lihat Tim FKUB Sumatera Utara, "Kerangka Acuan: Dialog Urgensi Aktualisasi Pendidikan Multikultural dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama", Makalah disampaikan pada seminar Dialog Urgensi Aktualisasi Pendidikan Multikultural dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama di Medan, 17 Oktober 2009. Tentang ini lihat juga, Nur Ahmad Fadhil Lubis, "Multikulturalisme dan Persinggungannya dengan Agama dan Umat Islam" dalam *Jurnal Kerukunan: Kerukunan Berbasis Multikultural*, FKUB Propinsi Sumatera Utara, edisi Oktober – Desember 2008.

konflik antar berbagai kelompok sosial budaya di Indonesia. Kedua, meningkatnya –seiring dengan lahirnya reformasi dan era otonomi daerah- tuntutan akan pengakuan terhadap entitas budaya lokal yang selama zaman Orde Baru cenderung terpinggirkan.

Berbagai kasus konflik sosial yang terjadi itu, dalam pandangan sebagian orang, mencerminkan hilangnya suatu tatanan nilai atau kelembagaan yang sebelumnya memiliki fungsi integrasi sosial. Apalagi dalam beberapa kasus, konflik itu terjadi demikian luar biasa, baik dilihat dari segi cakupan elemen kelompok masyarakat yang terlibat maupun dari segi dampak kerusakan yang ditimbulkan. Beberapa di antara berbagai kasus konflik yang memiliki dampak kerusakan fisik, sosial maupun psikologis yang sangat besar adalah kasus konflik antara komunitas Muslim dan Kristen di Ambon, Maluku dan kasus konflik antar warga Dayak dan Madura di Sampit, Kalimantan, dan kasus konflik sosial di Poso. Itulah sebabnya ketika meletus konflik sosial yang dahsyat di Ambon, pertanyaan yang muncul adalah, “di mana kearifan tradisi dan budaya *Pela Gandong* yang dibanggakan masyarakat Ambon?

Dalam kurun beberapa tahun terakhir secara lambat laun telah terjadi penurunan derajat eskalasi konflik di berbagai wilayah. Walaupun harus diakui situasi ini tampaknya tetap rentan dan masih membutuhkan proses resolusi konflik yang mungkin masih panjang. Dari beberapa kasus konflik yang disebut di atas, jalan panjang merajut perdamaian terus dilakukan dengan tidak pernah meninggalkan pranata sosial yang ada, yakni kearifan lokal setempat.

Kearifan lokal merupakan sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi serta lingkungan, yang hidup di tengah-tengah masyarakat lokal. Ciri yang melekat dalam kearifan lokal adalah sifatnya yang dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima oleh komunitasnya. Dalam komunitas masyarakat tradisional kearifan lokal mewujud dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan dan juga ketrampilan serta tata nilai dan etika yang mengatur tatanan sosial komunitas yang terus hidup.

Adapun tuntutan akan pengakuan atas eksistensi dan otonomi budayabudaya lokal, yang merupakan salah satu buah dari era reformasi, pada masa lalu –baik pada masa rezim Orde Lama Sukarno maupun Orde Baru Suharto yang disebut sejarawan Taufik Abdullah sebagai periode ‘negara serakah’ (*greedy state*)² yang cenderung monistik dan serba pusat. Tidak hanya itu, pembangunan budaya nasional pada era Orde Baru dipandang oleh banyak pihak lebih merupakan pembangunan dominasi budaya Jawa, atau Jawanisasi, atas budaya suku-suku bangsa yang lain. Penggunaan istilah-istilah sansekerta secara berlebihan dalam berbagai nomenklatur politik maupun penyebutan nama-nama tempat dan bangunan, serta nama-

²Taufik Abdullah menjelaskan ‘negara serakah’ sebagai “negara yang tidak puas hanya dengan legitimasi dan dominasi politik, dan penguasaan sistem ekonomi dengan segala embel-embelnya yang berkaitan dengan kedua hal yang strategis itu. ‘negara serakah’ menjadikan dirinya sebagai pemegang hegemoni wacana dan makna, penentu corak paradigma kultural dan ingatan kolektif bangsa”. Taufik Abdullah, “Integrasi Nasional, Globalisasi dan Kearifan Lokal”, *Antropologi Indonesia*, Th. XXVI, No. 65, hlm. 132.

nama penghargaan, menjadi indikasi transparan upaya ‘Jawanisasi’, atau paling tidak kebijakan ‘Jawa-sentris’ pemerintah Orde Baru.

Berbagai tuntutan menyangkut pengakuan terhadap hak budaya kelompok-kelompok masyarakat Indonesia itu antara lain dalam bentuk wacana multikulturalisme, yakni suatu perspektif pengelolaan budaya yang lebih memberi penghargaan terhadap perbedaan dan keunikan budaya dari tiap-tiap komunitas.³ Pihak pemerintah sendiri, dalam hal ini Kementerian Agama RI, telah mengambil inisiatif ke arah penggunaan perspektif multikulturalisme ini dalam upaya pengembangan interaksi dan kerukunan kehidupan sosial keagamaan. Menurut Muhammad Maftuh Basyuni, sejak tahun 2003, telah diselenggarakan dialog dalam rangka pengembangan wawasan multikultural di kalangan pemuka agama di berbagai provinsi di seluruh Indonesia.

Melalui kegiatan dialog tersebut telah dapat diidentifikasi sejumlah kearifan budaya lokal yang berperan dalam membina interaksi kehidupan sosial keagamaan yang harmonis dan konstruktif di antara warga masyarakat yang memeluk beraneka ragam agama, lingkungan sosial dan budaya.⁴

Di samping sikap semangat dan optimisme terhadap kontribusi kearifan budaya lokal bagi kehidupan sosial keagamaan yang

³ Mengenai diskusi tentang multikulturalisme atau masyarakat multikultural, lihat antara lain, Parsudi Suparlan, *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, Jurnal Antropologi Indonesia, 2002.

⁴ Muhammad Maftuh Basyuni, *Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2006) hlm. 15-16.

multikultur, segera bersamaan dengan itu muncul sejumlah persoalan dan permasalahan yang melingkupi aktualisasi kearifan budaya lokal tersebut. Dalam upaya melibatkan dan menghadirkan nilai-nilai kearifan budaya lokal, dalam prakteknya sering berbau paham animisme dan dinamisme serta mengandung unsur-unsur syirik. Hal ini, tentu, apabila tidak dikelola dengan baik, trampil dan profesional justru dapat menjadi sumber konflik dan disharmonisasi baru dalam kehidupan sosial keagamaan. Untuk itu, inisiatif dan layanan ke arah pembinaan dan bimbingan secara profesional dan kompeten oleh berbagai pihak terkait, dalam hal ini Perguruan Tinggi, khususnya mahasiswa Program Studi Perbandingan Agama, merupakan respon yang mendesak dan urgen. Dengan respon yang tepat, diharapkan konflik dan disharmoni dapat diminimalisir, atau bahkan dieliminir.

Masyarakat Indonesia yang majemuk dan memiliki latar belakang kebudayaan yang beragam, jelas memerlukan kerangka acuan untuk dijadikan pegangan dalam pergaulan nasional masa kini. Oleh karena itu, nilai-nilai tradisional yang mengandung kearifan, persamaan, multikultural, dan bisa dijadikan pegangan bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia di mana pun tempat tinggalnya, perlu digali dan diteliti kemudian ditawarkan sebagai alternatif yang baik untuk perkembangan kehidupan sosial keagamaan yang baru dan serasi. Penawaran alternatif itu khususnya yang dilakukan mahasiswa jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN-SU, penting, karena tidaklah mudah untuk memaksakan nilai-nilai yang dianggap baik ke

dalam pergaulan nasional bila tidak dengan mengenal latar belakang kultural masyarakat yang beragam.

Untuk wilayah provinsi Sumatera Utara, wacana mengenai pengelolaan kehidupan sosial keagamaan berbasis multikulturalisme kearifan budaya lokal dalam kaitannya dengan revitalisasi penguatan, pemberdayaan dan peran mahasiswa Program studi Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin penting untuk dilakukan kajian dan penguatan ke arah yang lebih baik, cerdas, dan kompeten. Karena konsep kearifan budaya lokal diperkirakan hampir dimiliki setiap kelompok etnis atau suku bangsa, maka nilai-nilai kearifan budaya lokal di kalangan masyarakat Sumatera Utara termasuk subjek penelitian yang penting. Hal itu antara lain disebabkan posisi strategis budaya masyarakat Sumatera Utara yang heterogen dan multikultural, merupakan potret dan miniatur pulau Sumatera. Dengan demikian, dalam konteks masyarakat Sumatera Utara, subjek kearifan budaya lokal menjadi strategis dan menarik untuk dilakukan penguatan kajian dan studi ilmiah.

B. Perumusan Masalah

Dari latar pemikiran tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian: 1). Bagaimana pemahaman mahasiswa jurusan Perbandingan Agama terhadap wawasan multikulturalisme berbasis kearifan lokal sebagai kompetensi dasar. 2) Bagaimana kemampuan mahasiswa mendayagunakan kompetensi tersebut dalam memberi kontribusi harmonisasi kehidupan sosial keagamaan3). Bagaimana metode, strategi, dan upaya yang dilakukan oleh pengelola

jurusank Perbandingan Agama dalam memperkuat kompetensi dasar tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Dari kegiatan penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemahaman mahasiswa jurusan Perbandingan Agama terhadap wawasan multikulturalisme berbasis kearifan lokal sebagai kompetensi dasar. 2). Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kemampuan mahasiswa mendayagunakan kompetensi tersebut dalam memberi kontribusi harmonisasi kehidupan sosial keagamaan. 3) untuk mengetahui dan mendeskripsikan metode, strategi, dan upaya yang dilakukan oleh pengelola jurusan Perbandingan Agama dalam memperkuat kompetensi dasar tersebut.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak fakultas dan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas kompetensi mahasiswa. Pemangku kepentingan, Pemerintah, khususnya Kementerian Agama RI dalam pembangunan kehidupan sosial keagamaan yang dibangun dari kearifan nilai-nilai budaya lokal yang bisa diterima oleh masyarakat atau suku-suku bangsa lain sehingga bisa dipedomani bersama dalam kehidupan berbangsa.

D. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, cakupan kompetensi mahasiswa terhadap wawasan multikulturalisme dan kearifan lokal yang menjadi objek penelitian, ruang lingkupnya mencakup: 1) Kompetensi Kognitif, meliputi pemahaman dan pemaknaan mahasiswa terhadap

wawasan multikulturalisme dan kearifan lokal, 2) Kompetensi afektif, meliputi internalisasi nilai-nilai multikulturalisme dan kearifan lokal pada sikap dan kepribadian mahasiswa, dan, 3) kompetensi psikomotorik meliputi ketrampilan mahasiswa dalam mendayagunakan dan menerapkan wawasanmultikulturalisme dan kearifan lokal dalam pengelolaan kehidupan sosial keagamaan masyarakat.

Dari klasifikasi itu, terlihat bahwa kompetensi dasar mahasiswa jurusan Perbandingan Agama, baik dalam bentuk kognitif, afektif dan psikomotorik, digali dalam penelitian ini.Selanjutnya ruang lingkup studi juga difokuskan pada strategi, metode, dan upaya yang dilakukan pengelola jurusan Perbandingan Agama dalam memperkuat dan meningkatkan kompetensi wawasan multikulturalisme dan kearifan lokal.

E. Signifikansi

Masyarakat Indonesia yang majemuk dan memiliki latar belakang kebudayaan yang beragam, jelas memerlukan kerangka acuan untuk dijadikan pegangan dalam pergaulan nasional masa kini. Oleh karena itu, nilai-nilai tradisional yang mengandung kearifan, persamaan, multikultural, dan bisa dijadikan pegangan bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia di mana pun tempat tinggalnya, perlu digali dan diteliti kemudian ditawarkan sebagai alternatif yang baik untuk perkembangan kehidupan sosial keagamaan yang baru dan serasi. Penawaran alternatif itu penting, karena tidaklah mudah untuk memaksakan nilai-nilai yang dianggap baik ke dalam pergaulan

nasional bila tidak dengan mengenal latar belakang kultural masyarakat yang beragam.

Untuk itu diperlukan agen-agen yang trampil dan kompeten dalam mengelola interaksi masyarakat yang multikultur tersebut. Dengan demikian, mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama, dalam wacana multikulturalisme dan kearifan lokal posisinya menjadi central dan penelitian pada subjek ini penting untuk dilakukan sebagai kajian dan penguatan kompetensi ke arah yang lebih baik, cerdas, dan kompeten. Karena konsep kearifan budaya lokal diperkirakan hampir dimiliki setiap kelompok etnis atau suku bangsa, maka kompetensi dan wawasan nilai-nilai kearifan lokal di kalangan mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama, termasuk subjek penelitian yang penting. Hal itu antara lain disebabkan posisi strategis mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama sebagai agen-agen akademis dan sosial, dapat disebut merupakan kader-kader multikultural. Dengan demikian, dalam konteks penguatan wawasan dan kompetensi mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama, subjek multikulturalisme dan kearifan lokal menjadi strategis dan menarik untuk dilakukan penguatan kajian dan studi ilmiah.

F. Kerangka Konseptual

Multikulturalisme

Multikulturalisme dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai perspektif atau cara pandang yang mengakui dan mengagungkan keragaman dan fenomena kemajemukan (budaya, bangsa, etnis, suku, ras, golongan dan agama) untuk berinteraksi atau bahkan berkontestasi

di dalam batas-batas wilayah sebuah negara.⁵ Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Multikulturalisme adalah suatu idiologi, alat dan wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, bahwa proses mempelajari kebudayaan mengharuskan kita bersikap multikultur. Untuk masuk dalam satu kebudayaan lain, kita harus berusaha melupakan apa yang kita pelajari dalam kebudayaan kita dan membuka diri terhadap lain yang tengah kita pelajari. Multikulturalisme saat ini, merupakan sebuah isu yang sangat signifikan, yang secara akademis banyak didiskusikan dan diwacanakan serta pengaruhnya penerbitan dengan tema-tema multikulturalisme. Multikulturalisme juga dianggap strategis secara politis. Di dalam suatu masyarakat yang demikian plural, dengan

⁵ Perdebatan yang semakin meluas tentang multikulturalisme, paling tidak, meletakkan konsep ini dalam dua posisi yang berbeda. Pertama, multikultur (al) sebagai kata kerja dilihat sebagai keanekaragaman sosial dan budaya dalam masyarakat kontemporer. Hal ini menggugat sentralisasi norma dan nilai-nilai, serta menolak kebenaran tunggal yang datang hanya dari satu sumber. Persis pada titik inilah narasi-narasi agung, teori-teori besar, seperti pembangunanisme dan kemajuan, modernisme, dan rasionalisme mendapat gugatan yang keras. Kedua, fenomena multikulturalisme sebagai pilihan kebijakan negara sebagai respon pemerintah atas berbagai tuntutan masyarakat yang multi-etnis, multi-bangsa, dan multi agama. Dalam hal ini setiap negara memiliki pola kebijakan dan pendekatan tersendiri dalam mengelola keragaman kultural di negaranya masing-masing. Lihat M. Nurkhoiron, "Agama dan Kebudayaan: Menjelajahi Isu Multikulturalisme dan Hak-hak Minoritas di Indonesia," dalam Hikmat Budiman, ed., *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, (Jakarta: The Interseksi Foundation, 2005), hlm. 36.

kebudayaan yang begitu heterogen, perlu pemahaman yang didasarkan pada perspektif multikulturalisme.⁶

Multikulturalisme adalah sebuah filosofi yang juga terkadang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Multikulturalisme berasal dari dua kata, multi (banyak/beragam) dan kultural (budaya atau kebudayaan), yang secara etimologi berarti keberagaman budaya.⁷ Budaya yang mesti dipahami, adalah bukan budaya dalam arti sempit, melainkan dipahami sebagai semua bagian manusia terhadap lingkup kehidupannya yang kemudian akan melahirkan banyak wajah, seperti sejarah, pemikiran, budaya verbal, bahasa dan lain-lain.⁸

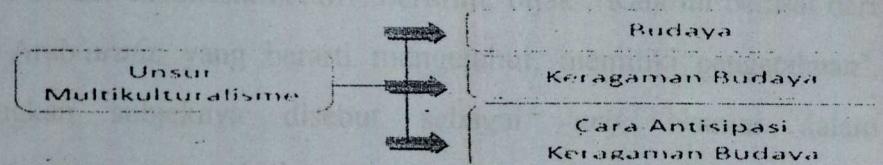
⁶Barnabas Nono, J, OSC, "Pola Pendidikan Multikultural Di Kalangan Keluarga Katolik", dalam media, *Kerukunan: Kerukunan Berbasis Multikultural*, Edisi Oktober – Desember 2008, h. 27.

⁷Yusuf Akhyar, *Multikulturalisme dalam Perspektif Filsafat*. Dalam seminar "Student Circle" Pusat Studi Islam Paramadina dan Islamic College for Advance Studies (ICAS) Jakarta, 12 Maret 2005.

⁸Charles Taylor menyatakan bahwa tindakan-tindakan kultural kita bukan hanya bersifat pribadi atau subyektif, melainkan dibentuk secara sosial. "Tindakan-tindakan kultural kita bersifat "intersubyektif", artinya kita tidak pernah bertindak sendirian. Makna tindakan kita adalah suatu makna yang dihayati bersama oleh orang lain; makna ini didasarkan pada asumsi-asumsi dan tindakan-tindakan kultural kita. Asumsi-asumsi yang berlainan mengenai bagaimana kebenaran harus dinyatakan oleh seorang yang memiliki kebijakan di dalam kehidupan bersama". *Multi Kulturalisme & Pluralisme*. risgalutfi. blog. ugm. ac. id. (diakses, 30 Desember 2012).

Multikulturalisme, sebagai sebuah paradigma, dengan cepat berkembang sebagai objek perdebatan yang menarik untuk dikaji dan didiskusikan karena memperdebatkan keragaman etnis dan budaya, serta penerimaan kaum imigran di suatu negara, yang pada awalnya hanya dikenal dengan istilah pluralisme yang mengacu pada keragaman etnis dan budaya dalam suatu daerah atau negara. Baru pada sekitar pertengahan abad ke-20, mulai berkembang istilah multikulturalisme. Istilah ini setidaknya memiliki tiga unsur, yaitu: budaya, keragaman budaya, dan cara khusus untuk mengantisipasi keanekaragaman budaya tersebut. Secara umum, masyarakat modern terdiri dari berbagai kelompok manusia yang memiliki status budaya dan politik yang sama.

Unsur Multikulturalisme



Kesadaran akan adanya keberagaman budaya lajim dikenali sebagai kehidupan multikultural. Kesadaran dan pemahaman akan adanya keberagaman (multikulturalisme) harus didorong dan ditingkatkan, serta diapresiasi secara terus menerus dan ditanggapi secara positif. Multikulturalisme bertujuan untuk kerjasama, kesederajatan, dan mengapresiasi dalam dunia yang kian kompleks

dan tidak monokultur lagi.⁹ Dalam bukunya yang berjudul *Multiculturalism and 'The Politics of Recognition'* (1990) Charles Taylor memperluas pemikiran politik multikulturalisme dengan memperjelas multikulturalisme itu sebagai bentuk dorongan kepentingan politik kaum minoritas atau kelompok-kelompok *subaltern* atau kelompok kelas kedua (hak untuk menentukan diri sebagai minoritas/kelompok yang terpinggirkan). Hal tersebut ditambah lagi dengan adanya arus globalisasi dan abad informasi yang cenderung menghilangkan batas-batas (*borderless*) geografi dan budaya juga berperan penting mempercepat adanya budaya multikulturalisme.¹⁰

Kearifan Lokal

Secara etimologis, *kearifan* berasal dari kata dasar *arif* yang dalam bahasa Indonesia berarti ‘berilmu, bijak’. Kata ini berasal dari kata Arab *'arafa*, yang berarti mengetahui, memiliki pengetahuan’, sedangkan subjeknya disebut sebagai ‘*arif*’. Namun dalam penggunaannya yang lazim, kata ini biasanya dibedakan dari kata ‘*alima* (kata kerja) ‘*alim* (pelaku), yang masing-masing juga berarti ‘mengetahui’ dan ‘orang yang memiliki pengetahuan’. Perbedaannya ialah kata *'arafa* biasanya digunakan untuk merujuk pada proses mengetahui yang disadari atas pertimbangan-pertimbangan yang mendalam dan berdimensi jangka panjang dibandingkan dengan

⁹Lihat Parsudi Suparlan, “Kemajemukan Amerika: Dari Monokulturalisme ke Multikulturalisme”, *Jurnal Studi Amerika*, Vol. 5. Agustus, 1999, h. 35-42.

¹⁰*Multi Kulturalisme & Pluralisme*. risgalutfi. blog. ugm.ac.id. (diakses, 30 Desember 2012).

proses mengetahui dalam kata ‘*alama*’. Itulah sebabnya dalam tradisi kesufian (tasawuf), kata yang lebih sering digunakan untuk menggambarkan pengetahuan yang tertinggi dalam jenjang kesufian adalah *ma’rifah*, bukan ‘ilm’.

Karena itu, tidak keliru bila kata *kearifan* itu difahami bukan hanya sekedar ‘berpengetahuan’ atau ‘berilmu’, tetapi juga bijaksana (Ingg. *Wise, wisdom*; Ar. *Hakim, hikmah*). Pengetahuan yang dilandasi kebijaksanaan ini umumnya bukan berkaitan dengan kebenaran teoritis (*truth*), melainkan ketepatan moral dan tindakan (*rightness*).

Sejalan dengan pengertian etimologis di atas, *kearifan budaya lokal* dipahami sebagai nilai-nilai yang dijadikan sebagai acuan, pedoman atau aturan oleh komunitas budaya setempat dalam keseluruhan proses interaksi mereka, meliputi (1) interaksi antara manusia dan hal-hal yang ghaib, seperti Tuhan dan roh-roh; (2) interaksi antar sesama manusia, seperti perkawinan, pergaulan hidup sehari-hari dan tata pemerintahan; (3) interaksi antar manusia dan lingkungannya, baik dunia alam, binatang maupun tumbuhan, yang umumnya mengarah pada upaya konservasi lingkungan.

Dalam pembatasan ini, maka pengertian *kearifan budaya lokal* seperti didefinisikan Endang Turmudi menjadi relevan dengan penelitian ini, yaitu *kearifan budaya lokal* sebagai sistem yang digunakan untuk memecahkan masalah sosial atau hubungan antar berbagai kelompok sosial kebudayaan. Dengan kata lain, *kearifan budaya lokal* adalah sistem pemecahan masalah atau pengaturan hubungan dan interaksi sosial untuk menciptakan harmoni. Contohnya

adalah konsep *Pela Gandong* di maluku dan *Subak* di Bali.¹¹ Namun demikian, ada pula kemungkinan bahwa nilai-nilai kearifan tersebut belum terlembaga, tetapi masih tersimpan dalam bentuk foklor.

Budiaman,¹² mendefenisikan foklor sebagai “sebagian dari kebudayaan yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun dan tradisional di antara anggota-anggota kelompok apa saja, dalam versi yang berbeda-beda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai perbuatan”. Foklor berbentuk lisan antara lain ungkapan tradisional, pepatah, pertanyaan, puisi dan sebagainya. Adapun fungsi foklor adalah sebagai sistem proyeksi yang dapat mencerminkan angan-angan kelompok; sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga kebudayaan; sebagai alat pendidikan anak; dan sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat dipatuhi.¹³ Dari pengertian itu, bisa dikatakan bahwa foklor merupakan media pengemasan nilai-nilai kearifan yang terkandung dalam suatu komunitas budaya, yang melaluiinya nilai-nilai kearifan disosialisasikan dan ditransformasikan antargenerasi.

Fokus penelitian ini diarahkan tidak hanya pada kearifan lokal dalam bentuk aslinya tapi juga pada upaya masyarakat dalam melakukan rekacipta kearifan lokal baru (*institutional development*),

¹¹ Endang Turmudi, *Kearifan lokal dan Problem Ortodoksi Agama*, Makalah disampaikan dalam seminar Pengembangan Kerukunan Bergama Melalui Revitalisasi Budaya dan Keraifan Lokal Guna Membangun Kebudayaan Nasional, Badang Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 25 Agustus 2005. Hlm. 7-8.

¹² Budiaman, dkk, *Foklor Betawi*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1979), hlm. 13

¹³ *Ibid.*, hlm. 14-15.

yaitu “memperbaharui institusi-institusi lama yang pernah berfungsi baik” dan dalam upaya membangun tradisi, yaitu “membangun seperangkat institusi adat-istiadat yang pernah berfungsi dengan baik dalam memenuhi kebutuhan sosial politik tertentu pada suatu masa tertentu, yang terus-menerus direvisi dan direkacipta ulang sesuai dengan perubahan-perubahan sosial politik dalam masyarakat. Pengembangan institusi ini harus dilakukan oleh masyarakat lokal itu sendiri, dengan melibatkan unsur pemerintah dan unsur non-pemerintah, dengan kombinasi pendekatan *top down* dan *bottom-up*.

G. Kerangka Teori

Di dalam setiap masyarakat terdapat apa yang dinamakan pola-pola prilaku atau *patterns of behavior*. Pola-pola prilaku merupakan cara-cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat tersebut. Setiap tindakan manusia dalam masyarakat selalu mengikuti pola-pola prilaku masyarakat tadi. Kecuali terpengaruh oleh tindakan bersama tadi, maka pola-pola prilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya.

Dalam mengatur hubungan antar manusia, kebudayaan dinamakan pula struktur normatif atau menurut istilah Ralph Linton “*designs for living*” (garis-garis atau petunjuk dalam hidup). Artinya kebudayaan adalah suatu garis-garis pokok tentang perilaku atau *blueprint for behavior* yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang dilarang dan lain-lain. Misalnya, unsur yang menyangkut pengendalian pengetahuan tentang

kepercayaan, seperti harus mengadakan upacara adat pada saat kelahiran, pertunangan, perkawinan dan lainnya.

Kaidah-kaidah kebudayaan berarti peraturan tentang tingkah laku atau tindakan yang harus dilakukan dalam suatu keadaan tertentu. Dengan demikian, maka kaidah sebagian kebudayaan mencakup tujuan kebudayaan, maupun cara-cara yang dianggap baik untuk mencapai tujuan tersebut. Kaidah-kaidah kebudayaan mencakup peraturan-peraturan yang beraneka warna yang mencakup bidang yang luas sekali. Akan tetapi untuk kepentingan penelitian masyarakat, maka secara sosiologis dapat dibatasi pada empat hal, yaitu: 1). Kaidah yang dipergunakan secara luas dalam suatu kelompok manusia tertentu; 2). Kekuasaan yang memperlakukan kaidah-kaidah tersebut; 3) unsur-unsur formal kaidah tersebut; 4). Hubungan dengan ketentuan-ketentuan hidup lainnya.¹⁴

Menurut Abdon Nababan, dengan masuknya sistem pemerintahan yang baru di tingkat desa dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa, yang sesuai dengan UU No. 5 tahun 1979, semakin menjauhkan masyarakat dari adat dan budayanya. Tradisi adat yang dulu sangat efektif mengatur penggunaan sumber daya alam untuk kepentingan serta menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat menjadi kehilangan kekuatan. Sementara itu sistem dan peraturan-peraturan baru dari pemerintah belum bisa diterima dan ditegakkan dengan efektif. Kemudian di beberapa daerah terlihat

¹⁴Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 199.

adanya kekosongan hukum yang berakibat langsung pada perusakan lingkungan. Misalnya, penebangan hutan tidak resmi untuk tujuan komersial atau istilah sekarang yang sedang marak dibicarakan adalah *illegal logging*. Selain itu penggunaan bom dan racun sianida dalam penangkapan ikan yang melibatkan masyarakat lokal.¹⁵

Hal ini diyakini pula oleh Ugrasena Pranidhana dengan pernyataan tersebut dapat menyebabkan masyarakat adat tidak mampu mempertahankan kearifan budaya tradisional yang mereka miliki. Karena selama ini kearifan itu justru ditopang oleh sistem sosial budaya yang khas pada masing-masing daerah. Untuk itu pelaksanaan ide otonomi daerah perlu dipertimbangkan sebagai salah satu jalan keluar yang terbaik.

Setiap kebudayaan (*culture*) memiliki cara-cara hidup sendiri, terutama dalam melakukan tindakan-tindakan sosial warganya, oleh karena perbedaan kebutuhan, sistem lepercayaan, warisan sosial, dan lingkungan fisik. Sehingga antar kultur itu menjadi berbeda satu sama lain. Kebudayaan sendiri memiliki banyak pengertian. Di antara pengertian itu adalah mengangkat unsur-unsur: cara berpikir, Merasa, mempercayai, dan menguasai ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Kebudayaan menimbulkan kepentingan-kepentingan, menyediakan cara-cara mengembangkan diri dan seterusnya. Kebudayaan mempunyai wujud dan struktur.¹⁶

¹⁵Abdon Nababan, *Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1995), hlm. 429.

¹⁶Clifford Geertz, *The Interpretation of Culture*, (New York: Basic Books Inc Publisher, 1973).

Seorang individu yang lahir di tengah komunitas tidak membangun dan mencipta kulturnya sendiri, tetapi ia dibentuk oleh kultur lingkungannya. Kekuatan yang mempengaruhi manusia bukan oleh kemampuan menciptakan pemikiran-pemikiran baru, tetapi lebih dipengaruhi oleh kemampuan mengadopsi, mentransfer dan menjalankan tradisi-tradisi.¹⁷ Kebudayaan berfungsi sebagai ‘mekanisme kontrol’ bagi perilaku dan tindakan manusia. Hampir semua unsur tindakan kini mengalami transformasi. Sebagian unsur kebudayaan gugur, karena tidak diperlukan lagi dan yang lainnya berlanjut terus. Unsur yang gugur kadangkala muncul kembali dengan konsep yang baru dan diinterpretasi secara baru.¹⁸

Banyak pengetahuan tradisional yang menjadi sumber kearifan sosial masa sekarang. Dalam sejarah bangsa-bangsa ketika menghadapi kerumitan sosial, ekonomi, politik, konflik agama, dan sebagainya, yang menemukan solusi dengan memetik kearifan tradisi.

H. Metodologi Penelitian

Sifat dan Pendekatan

Penelitian ini bersifat studi kasus (*case study*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat holistik. Dengan pendekatan ini penekanan kajian adalah pada pemberian penjelasan suatu gejala sosial dengan menggunakan gejala-gejala sosial yang lain

¹⁷Craig J. Calchoon, Francis A.J. Iani, (ed), *The Anthropological Study of Education*, (Paris: The Hague Mouton Publisher, 1976), hlm. 12.

¹⁸Clifford Geertz, *Local Knowledge,Futher Essays in Interpretative Anthropology*, (New York: Basic Book Inc Publisher, 1983),



37/LP/LP2M/03/14

dan unsur-unsur kebudayaan yang terdapat dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁹

Untuk itu, selanjutnya studi ini juga menggunakan pendekatan historis dan sosio-antropologi. Pertama-tama studi ini berharap dapat mengungkapkan rincian historis masalah ini dan kemudian menafsirkannya dalam kerangka teori yang digunakan dalam studi ini. Dan berdasarkan proposisi-proposisi yang telah dikemukakan tentang wawasan dan kompetensi mahasiswa jurusan Perbandingan Agama tentang multikulturalisme dan kearifan lokal, maka perhatian utama studi ini akan diarahkan kepada analisa terhadap berbagai metode, strategi dan upaya yang dilakukan pengelola jurusan Perbandingan Agama untuk memperkuat dan mendayagunakan kompetensi dasar tersebut.

Sumber dan Jenis Data

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa studi ini mendasarkan penelitian pada dokumen tertulis dan kepustakaan sebagai sumber sekunder. Adapun data primer diperoleh dan dihimpun melalui hasil wawancara dengan sejumlah informan yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, dan pengelola lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memperkaya informasi dan mempertajam analisa.

Teknik Pengumpulan Data

¹⁹Noeng Muhamir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1966), hlm. 55. Lihat juga, Suharsini Akunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rhineka Cipta, 1992) hlm. 18. Lihat juga Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990).

Metode pengumpulan dan pengolahan data sangat menentukan untuk mencapai tujuan penelitian, karena pada umumnya data yang dikumpulkan akan dimanfaatkan sebagai bahan analisis. Secara umum metode pengumpulan data dapat dibagi kepada observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumen.²⁰ Dalam penelitian ini keempat instrumen tersebut digunakan.

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode *wawancara mendalam* terhadap beberapa informan kunci, yang terdiri dari dosen dan mahasiswa jurusan Perbandingan Agama yang dapat memberikan informasi penelitian. *Pengamatan terlibat*, kehadiran peneliti dalam berbagai struktur kegiatan akademis mahasiswa sehari-hari untuk memahami makna. *Studi dokumentasi* yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang ditemukan di lapangan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data. *Studi kepustakaan* yakni menelaah berbagai macam pustaka yang relevan terutama berkenaan dengan konsep-konsep yang digunakan dan yang berkaitan dengan data penelitian.

Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian diklasifikasikan dan dikategorisasi, dan diinterpretasikan. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, dengan pengelompokan data tersebut. Selanjutnya dibuat pula penafsiran-

²⁰Suharsini Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 188-200, lihat juga Nan Lin, *Foundations of Social Research*, (New York: MacGrow Hill Book Company, 1976), hlm. 19.

penafsiran terhadap hubungan antar fenomena yang terjadi dan membandingkan dengan fenomena-fenomena lain di luar penelitian ini. Berdasarkan analisa dan interpretasi data atau penafsiran yang dibuat, kemudian ditarik kesimpulan yang relevan dengan penelitian, serta implikasi-implikasi dan saran-saran untuk kebijakan selanjutnya yang bermanfaat bagi fakultas, perguruan tinggi, Kementerian Agama RI dan instansi lainnya.

Dengan penelitian kualitatif ini, maka data yang muncul bukan rangkaian angka melainkan rangkaian kata-kata yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen.²¹ Dengan demikian, proses analisis data dilakukan dengan terus menerus sejak proses awal pengumpulan data. Dalam hal ini analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.²²

Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini dilakukan pada mahasiswa jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN- Sumatera Utara.

I. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis laksanakan ke dalam lima bab dan beberapa sub-sub bahasan yang diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

²¹Matthew B. Miles, *Ibid.*, 16-21.

²²Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 71.

- Bab I: Pendahuluan, berisikan: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, signifikansi, kerangka konseptual, kerangka teori, dan metodologi penelitian.
- Bab II: Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang terdiri dari, sejarah singkat Jurusan Perbandingan Agama, keadaan mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama, Sarana dan Prasarana, dan Pengelolaan Akademis.
- Bab III: Landasan teoritis, berisikan: pengertian multikulturalisme dan kearifan lokal, sistem dan klasifikasi multikulturalisme dan kearifan lokal, fungsi dan peran multikulturalisme dan kearifan lokal dalam interaksi sosial dan agama.
- Bab IV: Pembahasan Temuan dan Analisa hasil Penelitian, berisikan temuan yang meliputi: pemahaman mahasiswa tentang konsep multikulturalisme dan kearifan lokal, bagaimana kemampuan mahasiswa dalam mendayagunakan wawasan tersebut; serta metode dan upaya penguatan kompetensi dasar Jurusan Perbandingan Agama, mencakup evaluasi dan penyempurnaan kurikulum, serta pembinaan, pengembangan, dan penguatan kerja sama dengan instansi-instansi terkait.
- Bab V: Kesimpulan dan Rekomendasi, yang dilengkapi dengan daftar bacaan, daftar lampiran, daftar riwayat hidup.

BAB II

MENGENAL JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA FAK. USHULUDDIN IAIN-SU

A. Profil Jurusan Perbandingan Agama

Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara merupakan bagian dari salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri yang bertindak sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara memiliki cita-cita untuk menjadi salah satu Jurusan yang maju dan mampu menjawab tantangan peradaban dan teknologi yang semakin berkembang dalam masyarakat, khususnya pada bidang pengembangan pemahaman terhadap studi agama-agama dan dinamika kehidupan keberagamaan di tengah-tengah masyarakat muslim.

Dalam rangka pencapaian cita-cita tersebut, Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara dalam kedudukannya sebagai bagian integral dalam Sistem Pendidikan Nasional melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi : Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Berdasarkan kondisi yang ada, serta berlandaskan pada peranan Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Nasional, maka perencanaan Jurusan Perbandingan Agama (PA) Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara disusun atas dasar strategi sebagai berikut :

Jangka pendek yang lamanya satu tahun. Perencanaan ini dititikberatkan pada konsolidasi untuk mencapai mutu standar tertentu sehingga bisa mencapai kebutuhan masyarakat. Jangka panjang yang lamanya 5 (lima) tahun. Perencanaan pengembangan institusi mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi keagamaan, yang : Berakhlek mulia, kreatif dan inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, dan mampu bersaing, berdisiplin dan bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan, dan teknologi yang berkembang serta mampu menerapkannya secara simultan.

Mengacu kepada ketentuan tersebut di atas dan dengan mempedomani visi dan misi IAIN Sumatera Utara maka disusunlah visi, misi, tujuan dan sasaran Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara yang penyusunannya dilakukan melalui mekanisme :

- a. Penggodokan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian pada tingkat Jurusan Perbandingan Agama. Pada kesempatan ini Jurusan PA mengundang semua dosen Jurusan PA Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara untuk membahasnya.
- b. Penguraian pada tingkat fakultas. Hasil penggodokan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian pada tingkat Jurusan PA kemudian dibawa pada tingkat fakultas, dalam kesempatan ini penguraian dilakukan dengan melibatkan secara langsung pihak-pihak tertentu seperti :
 1. Perangkat Jurusan dilingkungan Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara.

2. Utusan Biro Rektor IAIN Sumatera Utara.
 3. Utusan Mahasiswa dilingkungan Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara.
 4. Utusan Himpunan Alumni Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara.
 5. Instansi Pemerintah dan Swasta tempat alumni bekerja.
 6. Utusan stake holder.
- c. Penentuan akhir. Hasil penguraian yang dilakukan pada tingkat fakultas kemudian dilakukan pengesahan melalui rapat pimpinan fakultas dengan melibatkan segenap Ketua Jurusan dilingkungan Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara.

Visi

Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara menjadi Jurusan terkemuka di Sumatera Utara dan di lingkungan IAIN se-Indonesia dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu agama-agama untuk memperkuat hubungan antarumat beragama di Sumatera Utara pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

Misi

1. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang studi agama-agama, dan hubungan antaragama yang digali dari sumber-sumber otoritatif, baik kitab suci agama-agama maupun karya-karya ilmiah, secara integrative-interkoneksi.
2. Memperluas dan memperkaya kajian-kajian terhadap teologi agama-agama, hubungan antaragama, fenomena keagamaan, budaya maupun sejarah agama-agama.
3. Menyebarluaskan dan menerapkan hasil-hasil studi agama-agama dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kearifan lokal (lokal wisdom), agar kerukunan dan

harmonisasi kehidupan umat beragama tetap terpelihara dengan baik, baik di tingkat lokal Sumatera Utara, maupun di tingkat nasional.

4. Meningkatkan kerja sama Jurusan yang produktif dan inovatif dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, terutama dalam bidang studi agama-agama.

Tujuan

- Menghasilkan Sarjana Muslim yang mampu menguasai dan mengkaji konsep kerukunan umat beragama sekaligus mampu mengaplikasikan di tengah masyarakat yang plural.
- Terbentuknya sarjana Muslim yang mampu memahami dan menganalisa konsep dan ajaran keagamaan secara ilmiah dan mampu memberikan penguatan kerukunan dan harmonisasi kehidupan antarumat beragama di Indonesia.
- Terbentuknya sarjana Muslim yang ahli dan profesional yang menguasai bidang Perbandingan Agama.
- Menghasilkan sarjana Muslim yang mampu, trampil dan peka dalam merespon dan mengelola kondisi keberagamaan baik dalam tingkat lokal, nasional dan global serta mampu memberikan solusi terhadap fenomena keagamaan yang berkembang.

Sasaran dan Strategi Pencapaiannya

1. Meningkatkan sarana prasarana akademis dan kualitas dosen serta akselerasi pencapaian kualitas akademik.
2. Memperluas kerjasama dengan pihak lain melalui penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara efektif.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Jurusan, Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara selalu berusaha untuk mengedepankan peningkatan mutu yang berkesinambungan. Hal ini ditandai dengan adanya peninjauan kurikulum yang senantiasa dievaluasi dan berupaya agar dapat disesuaikan dengan pengguna lulusan.

Selain upaya tersebut di atas untuk mendukung komitmen dalam peningkatan mutu, para tenaga pengajar senantiasa didorong untuk mengikuti pelatihan-pelatihan maupun seminar-seminar bahkan studi lanjut sampai dengan jenjang pendidikan S-3 sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasai. Untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan menambahkan suasana akademik, para mahasiswa dianjurkan untuk selalu mencari dan mempelajari permasalahan-permasalahan agama dan fenomena hubungan antaragama yang terjadi di masyarakat untuk ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai bahan diskusi saat proses belajar mengajar ataupun dalam merancang penelitian hasil akhir atau solusinya bisa diaplikasikan sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat.

Selanjutnya untuk menjalin hubungan kerjasama antar Perguruan Tinggi dan Instansi lain yang dapat meningkatkan kualitas dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, maka upaya yang senantiasa dilakukan adalah mencermati dan mengkaji perkembangan eksternal kampus sebagai arah tujuan pengabdian institusi, apalagi di Indonesia saat ini penggunaan dan pelibatan agama-agama sedang ditantang kesiapannya untuk bisa diterapkan secara "siap pakai" di Indonesia.

Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara sebagai salah satu pelaksana pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia berkewajiban mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan Visi dan Misi yang dimiliki dalam rangka mendukung keberhasilan kualitas hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Relevansi dari program pendidikan tinggi sebagai agen perubahan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan yang ada di dalam masyarakat (di luar kampus).

Dinamika dan tuntutan yang berkembang dalam masyarakat harus diiringi dengan dinamika dan perubahan lembaga pendidikan, oleh karena itu Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara menyusun perencanaan kedepan dan selalu mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal yang berkembang sesuai tuntutan paradigma baru pendidikan nasional yang secara bertahap mulai bergeser dari paradigma struktural-fungsional kepada paradigma baru yang lebih mengutamakan peranan interaksi dan saling terhubung dengan lingkungannya (Proses Interaksionis dan interkoneksi). Perkembangan pendidikan tinggi menuntut implementasi paradigma baru tersebut yang dalam pengelolaannya mengharuskan berjalannya prinsip-prinsip: demokratisasi, otonomi, dan pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan proses pendidikan dapat dilaksanakan dengan tepat guna.

B. Kurikulum dan Pembelajaran

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta

cara penyampaiannya, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi Jurusan. Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.

Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skil*).

No.	Kelompok Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1.	MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian)	25	50
2.	MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)	26	52
3.	MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya)	8	16
4.	MPB (Mata Kuliah Perilaku Berkarya)	6	12
5.	MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat)	10	20
TOTAL		75	150

Distribusi Mata Kuliah Perbandingan Agama

SEMESTER I			MATA KULIAH	K
KODE				
MPK	INS	001	Ilmu Tauhid	2
MPK	INS	002	Akhhlak/Etika	2
MPK	INS	003	Ulumul Qur'an	2
MPK	INS	004	Ulumul Hadis	2
MPK	INS	005	Pancasila	2
MPK	INS	006	Bahasa Indonesia	2
MPK	INS	007	Bahasa Arab I	4
MPK	INS	008	Bahasa Inggeris I	4
MKB	INS	001	Praktikum Tashih Alquran	P
MPK	INS	002	Praktikum Bahasa Arab	P
J U M L A H				20

SEMESTER II			MATA KULIAH	K
KODE				
MPK	INS	009	Ushul Fiqh	2
MPK	INS	010	Fiqh	2
MPK	INS	011	Tafsir Alquran I	2
MPK	INS	012	Hadis I	2
MPK	INS	013	Bahasa Arab II	2
MPK	INS	014	Bahasa Inggeris II	2
MBB	INS	015	IAD, ISD, IBD	2
MPB	INS	016	Komputer	2
MPK	INS	017	Civic Education	2
MKK	PA	001	Sejarah Agama	2
MPK	INS	003	Praktikum Bahasa Inggris	P
MKB	INS	004	Praktikum Komputer	P
J U M L A H				20

SEMESTER III			MATA KULIAH	K
KODE				
MPK	INS	018	Sejarah Peradaban Islam I	2
MPK	INS	019	Metodologi Studi Islam I	4
MPB	INS	020	Kewirausahaan	2
MPK	INS	021	Managemen Organisasi	2
MKK	PA	002	Ilmu Perbandingan Agama I	2
MKK	PA	003	Kristologi I	2
MKK	PA	004	Hadis II (Perb. Agama)	2

MKK	PA	005	Filsafat Umum	2
MKK	PA	006	Ilmu Kalam I	2
MKB	PA	001	PILIHAN	2
MKB	PA	002	Praktikum Ibadah	P
MKB	PA		Analisis Teologi Agama	P
J U M L A H				20

SEMESTER IV				
KODE			MATA KULIAH	K
MPK	INS	022	Metodologi Studi Islam II	2
MPK	INS	023	Metode Penelitian Ilmiah I	2
MKK	PA	007	Agama-Agama Besar Dunia	2
MKK	PA	008	Ilmu Perbandingan Agama II	2
MKK	PA	009	Ilmu Kalam II	2
MKK	PA	010	Hadis III (Hub. Umat Beragama)	2
MKK	PA	011	Tafsir Alquran II (Perb. Agama)	2
MKK	PA	012	Filsafat Islam	2
MBB	PA	013	Antropologi Agama I	2
MKB	PA	005	<i>Mata Kuliah Pilihan</i>	2
MKB	INS	006	Praktikum Tahfiz Alquran	P
MPK	INS		Praktikum Bahasa Arab	P
J U M L A H				18

SEMESTER V				
KODE			MATA KULIAH	K
MPK	INS	024	Met. Penelitian Ilmiah II (Perbandingan Agama)	2
MPK	INS	025	Filsafat Ilmu	2
MKK	PA	014	Aliran Kepercayaan	2
MKK	PA	015	Kristologi II	2
MKK	PA	016	Kutub Muqaranah Adyan	2
MKK	PA	017	Hubungan Antaragama	2
MKK	PA	018	Bahs al-Kutub Al-Muqaranah	2
MBB	PA	019	Antropologi Agama II	2
MKB	PA	020	Text Reading	2
MKB	PA	003	<i>Mata Kuliah Pilihan</i>	2
MKB	PA		Ansos Hub./Konflik Umat Beragama	P
MKB	PA	004	Analisis Sekte Agama-agama	
J U M L A H				20

SEMESTER VI			
KODE	MATA KULIAK	K	
MKK PA 021	Pemikiran Teologi Transformatif	2	
MKK PA 022	Kepercayaan Lokal	2	
MKB PA 023	Metodologi Studi Agama	2	
MKK PA 024	Hinduisme/Budhisme	2	
MPB PA 025	Filsafat Agama	2	
MBB PA 026	Psikologi Agama	2	
MBB PA 027	Sosiologi Agama	2	
MKK PA 028	Perbandingan Kultur Islam	2	
MBB PA 029	Islam Asia Tenggara	2	
MKB PA 005	Mata Kuliah Pilihan	2	
MKB PA 006	Dialog Semu Umat Beragama	P	
J U M L A H			20

SEMESTER VII			
KODE	MATA KULIAH	K	
MKK PA 030	Kerukunan Umat Beragama di Indonesia	2	
MKK PA 031	Agama Kong Hu Chu	2	
MKK PA 032	Fenomenologi Agama	2	
MKK PA 033	Missiologi (Perbandingan)	2	
MKB PA 034	Sosiologi Konflik	2	
MBB PA 035	Orientalisme/Oksidental Studi	2	
MKB PA 036	Adab al-Bahs & Munazarah	2	
MBB PA 037	Resolusi Konflik & Social Worker	2	
MKK PA 038	Aliran Sempalan di Indonesia	2	
MKB PA 007	Mata Kuliah Pilihan	2	
J U M L A H			20

SEMESTER VIII			
KODE	MATA KULIAH	K	
MBB INS 026	Kuliah Kerja Nyata	4	
MPB INS 027	Skripsi	6	

J U M L A H	10
-------------	----

MATA KULIAH PILIHAN			K
KODE	MATA KULIAH		
MKB	PA	001	Logika Saintifik
MKB	PA	001	Institusi Keagamaan
MKB	PA	001	Pluralisme & Multikulturalisme
MKB	PA	001	Perbandingan Kultur Islam
MKB	PA	001	Ilmu Tasawuf
MKB	PA	001	Social Enggeering
J U M L A H			12

Keterangan :

*) MKP = Mata Kuliah Pilihan
Jumlah SKS Semester I s/d VIII = 150 SKS

C. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Dosen

Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di Perguruan tinggi. Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen atau tenaga pengajar sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia, yang meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan tenaga pengajar atau dosen yang profesional.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional

dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadianm kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Sistem rekrutmen, seleksi dosen dan tenaga pendukung berdasarkan hasil testing PNS (Pegawai Negeri Sipil) IAIN Sumatera Utara setiap tahun. Sedangkan Jurusan hanya dilibatkan untuk menentukan tenaga pengajar fakultas setiap semester terutama untuk dosen tidak tetap. Seleksi yang dilakukan oleh Jurusan yaitu seluruh dosen tidak tetap harus berpendidikan S-2, sementara dosen S-1 hanya diperbolehkan mengajar mata kuliah yang bersifat praktik misalnya Kepemimpinan, Kewirausahaan, dan Konsep-konsep Pembangunan secara general serta Koperasi dan Komputer.

Pengelolaan dosen dan tenaga pendukung.

Pengelolaan yang dilakukan Jurusan maupun fakultas yaitu seluruh dosen tetap dan tidak tetap mengajar berdasarkan mata kuliah

keahlian, dan jabatan akademik. Selain itu, Jurusan menyusun alokasi tugas akademik masing-masing staf sehingga dengan mudah diketahui beban tugasnya.

Profil Dosen dan tenaga pendukung

Profil dosen pada Jurusan Perbandingan Agama (PA) Fak.Ushuluddin IAIN SU sebenarnya cerminan dari seluruh dosen yang mengajar di Fakultas Ushuluddin IAIN SU, jumlah dosen yang ada sudah sangat signifikan, namun jumlah dosen Jurusan tidak mencukupi untuk mengajarkan berbagai mata kuliah setiap semesternya untuk itu masih melibatkan tenaga dosen dari Jurusan dan dosen dari fakultas lain.

Berdasarkan SK Dekan Fakultas Ushuluddin No. 02 Tahun 2012 Tanggal 05 Januari 2012 Tentang Penetapan Dosen Prorgam Studi Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN-SU , maka Dosen Tetap Jurusan Perbandingan Agama berjumlah 13 (tiga belas) orang. Dosen Jurusan PA yang memiliki keahlian Jurusan sebanyak 9 (sembilan) orang, terdiri; 1 (satu) guru besar 1 (satu) berpendidikan S3, sedangkan 6 (enam) dosen lainnya berpendidikan S2. 5 (lima) orang di antaranya sedang dalam pendidikan S3, dan 1 (satu) orang yang sedang dalam pendidikan S2. Selanjutnya dosen tetap Jurusan PA yang memiliki keahlian penunjang Jurusan Perbandingan Agama berjumlah 4 (empat) orang, terdiri dari ; 3 (tiga) orang berpendidikan S-2. Disamping itu dosen Jurusan Perbandingan Agama juga terdapat beberapa orang dosen tidak tetap yang memiliki keahlian pokok dan keahlian penunjang Jurusan Perbandingan Agama (PA). Selanjutnya Jurusan Perbandingan Agama

juga didukung oleh Staf 1 (satu) orang dari dosen, tenaga teknisi laboratorium 1 orang.

Data Dosen Tetap Jurusan Perbandingan Agama

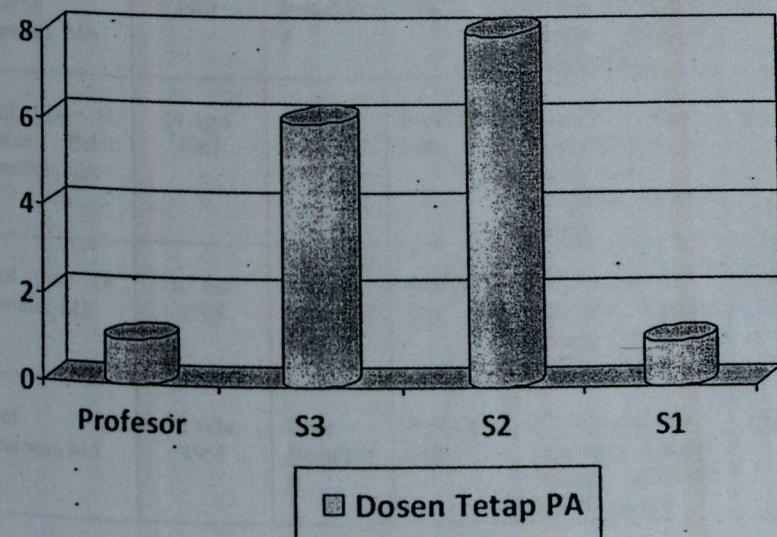
No.	Nama Dosen Tetap	Jabatan Akademik	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Prof. Dr H. Syahrin Harahap, MA	Guru Besar/IV/c	Prof.Dr. MA	(S1) FU IAIN-SU (S2) IAIN SAHID-Jakarta (S3)IAIN SAHID-Jakarta	PPMDI
2	Drs. Kamaluddin, MA	Lektor Kepala/IV/c	Drs.MA.	(S1)FU IAIN-SU (S2) PPs IAIN SU	Perbandingan Agama
3	Dra. Hj. Dahlia Lubis, M.Ag	Lektor Kepala/IV/b	Dra. M.Ag	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPs IAIN-SU	Aliran Kepercayaan
4	Dr.H. Arifinsyah, M.Ag	Lektor Kepala/IV/c	Dr. M.Ag	(S1)FU IAIN-SU. (S2) PPs IAIN-SU. (S3)'PPs IAIN-SU.	Perbandingan Agama
5	Dr. Darman Harahap, MA.	Lektor Kepala/IV/a	Drs. MA	(S1)FU IAIN-SU. (S2) PPs IAIN-SU	Ulum al-Qur'an
6	Drs.H. Wirman, MA	Lektor Kepala/VI/b	Drs. MA	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPs IAIN-SU	Kristologi
7	Drs. Maraimbang, MA	Lektor /III/d	Drs. MA.	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPs IAIN-SU	Fenomenologi Agama
8	Drs. H. Syukri, M.Ag	Lektor Kepala/IV/a	Drs. MA	(S1)	Tafsir
9	Dra. Husna Sari Siregar, M.Si	Lektor III/d	Dra. M.Si	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPs USU	IAD IBD ISD
10	Dra. Endang Ekowati	Lektor/III/d	Dra	(S1) FU IAIN SU	Agama-Agama Di Dunia
11	Zulkarnaen	Lektor /III/d	S.Ag. M.Ag	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPs IAIN-SU	Hubungan Antar Agama
12	Drs. H. Indra, MA	Lektor/III/c	Drs. MA	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPs IAIN-SU	Aliran Kepercayaan

13	H. Sori Monang, M.Th	Lektor/III/c	M.Th	(S2) India	Sejarah Peradaban Islam
----	-------------------------	--------------	------	------------	-------------------------------

Rasio jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa 1 : 8 rasio ini dipandang cukup memadai jika ditinjau dari jumlah mahasiswa sebanyak 99 orang. Jumlah dosen tetap Jurusan Perbandingan Agama (PA) dipandang cukup, karena seluruh dosen fakultas Ushuluddin yaitu 61 orang juga merupakan dosen tetap setiap Jurusan, ditambah dengan jumlah dosen tidak tetap seluruh fakultas berjumlah "26" orang.

Ditinjau dari segi jabatan akademik/ golongan terdiri atas 6 orang Guru Besar, Lektor Kepala 25 orang, lektor 17 orang, dan Asisten Ahli 7 orang. Karena itu, dari segi kualifikasi dosen Fakultas Ushuluddin tidak rendah kualitas dan kuantitasnya jika dibanding dengan fakultas lain di lingkungan IAIN Sumatera Utara.

Dosen Jurusan PA



Profil dosen pada Jurusan Perbandingan Agama (PA) Fak.

Ushuluddin IAIN SU sebenarnya cerminan dari seluruh dosen yang mengajar di Fakultas Ushuluddin IAIN SU, jumlah dosen yang ada sudah sangat signifikan, namun jumlah dosen tetap Jurusan PA dalam proses pembelajaran belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar setiap semesternya untuk itu masih bekerja sama dan melibatkan beberapa tenaga dosen dari Jurusan dan dosen dari fakultas lain.

Data Dosen Tetap Fakultas Ushuluddin IAIN-SU

No	Nama Dosen Tetap	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT	Bidang Keahlian
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nasution, MA	19-Juli-1957	Guru Besar/IV/e	Prof.Dr. MA	(S1) FU IAIN-SU (S2) IAIN SAHID-Jakarta (S3)IAIN SAHID-Jakarta	Filsafat Islam
2	Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA	12-Des.-1954	Guru Besar/IV/e	Prof.Dr. MA	(S1) FU IAIN-SU (S2) IAIN SAHID-Jakarta (S3)IAIN SAHID-Jakarta	Ilmu Hadits
3	Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA	16 Juni 1961	Guru Besar/IV/d	Prof.Dr. MA	(S1) FU IAIN-SU (S2) IAIN SAHID-Jakarta (S3)IAIN SAHID-Jakarta	PPMDI
4	Prof. Dr. H. Hasan Bakti, Nasution, MA	14 Agst. 1962	Guru Besar/IV/d	Prof.Dr. MA	(S1) FU Ar-Raniry Aceh (S2) IAIN Ar-Raniry Aceh (S3)IAIN SAHID-Jakarta	MSI
5	Prof. Dr. Katimin, MA	05 Juli 1965	Guru Besar/IV/d	Prof.Dr. MA	(S1) FU IAIN-SU (S2) IAIN SAHID-Jakarta (S3)IAIN SAHID-Jakarta	Politik Islam
6	Prof. Dr. Amroeni, MA	12 Febr. 1965	Guru Besar/IV/d	Prof.Dr. MA	(S1) FU IAIN-SU (S2) IAIN SAHID-Jakarta (S3)IAIN SAHID-Jakarta	Filsafat Islam

7	Dr. Sukiman, M.Si	03 Febr. 1965	Lektor Kepala IV/d	Dr. MA	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPUsu (S3) Universitas Sains Malaysia	Theologi Islam
8	Drs. H. Musaddad Lubis, M.Ag	12 Des. 1956	Lektor Kepala IV/c	Drs. M.Ag	(S1) FU IAIN-SU (S2) IAIN Ar-Raniry Aceh	Tasawuf
9	Drs. Kamaluddin, MA.	02 Juli 1959	Lektor Kepala/IV/c	Drs. MA.	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPsiAIN-SU	Perbandingan Agama
10	Dra. Hj. Dahlia Lubis, M.Ag	10 Nop. 1959	Lektor Kepala/IV/b	Dra. M.Ag	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPsiAIN-SU	Aliran Kepercayaan
11	Dr. H. Abdullah AS	01 Mei 1954	Lektor Kepala/IV/b	Dr. MA	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPsiAIN-SU (S3) Universitas Malaya	Tafsir
12	Dra. Hj. Rosmaini, MA	12 Nop. 1948	Lektor Kepala/IV/b	Dra. MA	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPsiAIN-SU	Ilmu-Kalam
13	Dr.H. Arifinsyah, M.Ag	09 Sept. 1968	Lektor Kepala/IV/c	Dr. M.Ag	(S1) FU IAIN-SU, (S2) PPsiAIN-SU, (S3) PPsiAIN-SU.	Perbandingan Agama
14	Dr. H. Muzakkir, M.Ag	11 Nop. 1969	Lektor Kepala/IV/b	Dr. M.Ag	(S1) FU IAIN-SU, (S2) PPsiAIN-SU, (S3) University Malaya.	Ilmu Tasawuf
15	Dr. Darman Harahap, MA.	31 Des. 1958	Lektor Kepala/IV/a	Drs. MA	(S1) FU IAIN-SU, (S2) PPsiAIN-SU	Ulum al-Qur'an
16	Drs.H. Wirman, MA	29 Mei 1965	Lektor Kepala/VI/b	Drs. MA	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPsiAIN-SU	Kristologi
17	Drs. Arwansyahsyah Nur, M.Ag	30 Mei 1957	Lektor Kepala/VI/b	Drs. M.Ag	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPsiAIN-SU	Bahasa Inggris
18	Drs. H. Dalail Ahmad, M.Ag	08 April 1952	Lektor Kepala/VI/a	Drs. M.Ag	(S1) FU IAIN-SU (S2) IAIN Ar-Raniry Aceh	Hadits

19	Drs. Mhd Syahminan M.Ag.	26 Mei 1966	Lektor Kepala/ VI/b	Drs. M.Ag	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPs IAIN-SU	Sosiologi Agama
20	Drs. Parluhutan Siregar, M.Ag	31 Des. 1957	Lektor Kepala/ VI/b	Drs. M.Ag	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPs IAIN-SU	Theologi Modern
21	Drs. Muhammad, MA	31 Des. 1959	Lektor Kepala/ VI/b	Drs. MA	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPs IAIN-SU	Bahasa Arab
22	Drs. Abd. Razak, M.Si	15 Agst. 1964	Lektor Kepala/ VI/b	Drs. M.Si	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPs Unimed	Civic education
23	Drs. Maraimbang, MA	29 Juni 1969	Lektor /III/d	Drs. MA	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPs IAIN-SU	Fenomenologi Agama
24	Drs. H. Syukri, M.Ag	14 Nop. 1957	Lektor Kepala/ IV/a	Drs. MA	(S1)	Tafsir
25	Dra. Husna Sari Siregar, M.Si	05 April 1968	Lektor III/d	Dra. M.Si	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPs USU	IBD
26	Dra. Hj. Hasnah Nasution, M.A	26 Febr. 1969	Lektor Kepala/ IV/a	Dra. MA	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPs IAIN-SU	Filsafat Agama
27	Dra. Mardhiah Abbas, M. Hum.	21 Agust. 1962	Lektor Kepala/ IV/b	Dra. M.Hum	(S1) IAIN Ar-Raniry Aceh (S2) PPs UGM	Filsafat Agama
28	Adenan, M.A	15 Juni 1969	Lektor Kepala/ IV/b	M.A	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPs IAIN-SU	Filsafat Islam
29	Dr. Sulidar, M.Ag	26 Mei 1967	Lektor Kepala/ IV/b	Dr. M.Ag	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPs IAIN-SU (S3) University Malaya	Ulum al-Hadits
30	Dra. Endang Ekowati	16 Jan. 1969	Lektor/III /d	Dra. MA	(S1) FU IAIN SU (S2) FU IAIN SU	Agama-Di-Agama Dunia

31	Suheri Harahap, M.Si	13 Okt. 1972	Lektor Kepala/ IV/a	M.Si	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPs Unimed	Antropologi Agama
32	Drs. Abd. Halim, MA	31 Juli 1963	Lektor/III /d	Drs. MA	(S1) FS IAIN-SU (S2) India	Bahasa Arab
33	Dr. H. Ahmad Zuhri, MA	05 Sept. 1971	Lektor Kepala/ IV/a	Dr. MA	(S3) Sudan	Tafsir
34	Dr.H. Muhammad Sofyan, MA	03 Nov. 1969	Lektor Kepala/ IV/b	Dr. MA	(S3) India	Tafsir
35	Dr. Syukri, MA	02 Maret 1970	Lektor Kepala/ IV/a	Dr. MA	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPs IAIN-SU (S3) PPs IAIN-SU	Filsafat Umum
36	Siti Ismahani, M. Hum	03 Mei 1969	Lektor/III /d	M. Hum	(S1) FT IAIN-SU (S2) PPs Unimed	Bahasa Inggris
37	Dr. Harun Al- Rasyid, MA.	02 Maret 1972	Lektor/III /d	Dr. MA	(S3) India	Bahasa Arab
38	Drs. Ahmad Rivai Harahap., MA	07 Maret 1952	Lektor/III /d	Drs. MA	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPs IAIN-SU	Logika
39	Muhammad Aswin, M.Ap	17 Agust. 1968	Lektor/III /d	M.A.P	(S2) PPS UMA	Managemen Organisasi
40	Drs. Abu Sahrin, M.Ag	27 Okt. 1967	Lektor/III /d	Drs. M.Ag	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPs Syahid Jakarta	Penelitian filsafat
41	Drs. Jaipuri Harahap, M.Si	07 Juni 1961	Lektor/III /d	Drs. M.Si	(S1) FU IAIN-SU (S2) UI	Logika
42	Zulkarnaen, M.Ag	11 Jan. 1974	Lektor /III/d	S.Ag. M.Ag	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPs IAIN-SU	Hubungan Antar Agama
43	Sakti Ritonga, M.Pd	07 juni 1975	Lektor /III/d	S.Ag. M.Pd	(S1) FT IAIN-SU (S2)PPs IKIP Padang	Antropologi Politik
44	H. Ahmad Perdana Indra, M.Ag	27 Jan. 1979	Lektor /III/d	Lc. M.Ag	(S1) Al-Azhar Kairo (S2) PPs IAIN-SU	Ushul Fiqh
45	Mardian Idris Harahap, M.Ag	18 Juli 1977	Lektor /III/d	S.Ag. M.Ag	(S1) FS IAIN-SU (S2) PPs IAIN-SU	Filsafat Politik Islam

46	Husnel Anwar, M.Ag	27 des. 1970	Lektor /III/d	S.Ag. M.Ag	(S1) FS IAIN-SU (S2) PPs IAIN-SU	Hadits
47	Muhammad Ali Azmi Nst. MA	01 Mei 1974	Lektor /III/c	MA	(S2) PPs IAIN-SU	Tauhid
48	Drs. H. Indra. MA	31 Des. 1963	Lektor/III /c	Drs. MA	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPs IAIN-SU	Aliran Kepercayaan
49	Dra. Elly Warnisyah harahap, M.Ag	20 Maret 1967	Lektor/III /c	Dra. M.Ag	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPs IAIN-SU	Sistem Pemerintahan Islam
50	Sugeng Wanto, M.Ag	20 Okt. 1977	Lektor/III /c	S.Ag. M.Ag	(S1) FS IAIN-SU (S2) PPs IAIN-SU	MSI
51	Muhammad Hidayat, MA	24 Okt. 1977	Lektor/III /c	S.Ag. M.Ag	(S1) FS IAIN-SU (S2) PPs IAIN-SU	Fiqh
52	Ismet Sari, M.Ag	10 jan. 1974	Asisten Ahli/III/b	S.Ag. M.Ag	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPs IAIN-SU	Filsafat Barat Modern
53	Dr. Sulaiman Muhammad amir, MA	08 April 1974	Asisten Ahli/III/b	Dr. MA	(S1) Al-Azhar (S2) Sudan (S3) Omdurman Sudan	Hadits
54	Salahuddin Harahap, MA	08 Okt. 1978	Lektor/III /c	MA	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPs IAIN-SU	Filsafat ilmu
55	H. Sori Monang. M.Th	02 Okt. 1974	Lektor/III /c	M.Th	(S2) India	Sejarah Peradaban Islam
56	Nur Aisyah Simamora, MA	08 Mei 1979	Lektor/III /c	MA	(S1) Al-Azhar Kairo (S2) PPs IAIN-SU	Tafsir Ayat- Ayat Siyah
57	Abrar M. Daud Faza, MA	29 Nov. 1979	Asisten Ahli/III/b	MA	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPs IAIN-SU	Tasawuf
58	Junaidi, M.Si	10 Okt. 1981	Lektor/III /c	MA	(S1) FT. UMSU (S2) PPs IKIP Bandung	Komunikasi Politik
59	Faisal Riza, MA	07 Juni 1982	Asisten Ahli/III/b	MA	PPs IAIN SU	Politik
60	Munandar, M.Th.I	04 jan. 1983	Asisten Ahli/III/b	M.Th.I	PPs IAIN Surabaya	Hadits
61	Shalahuddin Ashani, M.Si	09 Febr. 1982	Asisten Ahli/III/b	M.Si	(S1) FU IAIN-SU (S2) PPs UGM	Tafsir Hermeneti

Pengelolaan yang dilakukan Jurusan maupun fakultas yaitu seluruh dosen tetap dan tidak tetap mengajar berdasarkan mata kuliah keahlian, dan jabatan akademik. Selain itu, ketua Jurusan menyusun alokasi tugas akademik masing-masing staf sehingga dengan mudah diketahui beban tugasnya.

Etika dosen

- a) Bertaqwa kepada Allah Swt, bersikap ilmiah, jujur dan adil.
- b) Berakhlek mulia ; *istiqomah, wara', tawadu', khudu', sabar, dan qanaah*.
- c) Taat beribadah dan menegakkan syi'ar Islam.
- d) Menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.
- e) Memelihara dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta bertanggung jawab secara ilmiah.
- f) Senantiasa berusaha menuntut ilmu pengetahuan, tidak menyiakan waktu dan siap belajar dari sumber manapun serta rajin meneliti dan membina kreatifitas.
- g) *Zuhud*, tidak mencari dan menggunakan ilmu pengetahuan hanya untuk tujuan harta, prestise dan popularitas semata.
- h) Terbuka dan menghargai orang lain.
- i) Rendah hati dan berani mengakui kelemahan dan kesalahan.
- j) Mengajar demi keridhaan Allah Swt dan pengembangan ilmu pengetahuan dan penyiaran agama.
- k) Mencintai dan menghargai mahasiswa serta bersedia membantu mereka dalam batas-batas kemampuan.
- l) Bersungguh-sungguh dalam mengajar dan membimbing mahasiswa.

- m) Memperlakukan mahasiswa dengan benar, jujur dan adil.
- n) Tepat waktu dan berdisiplin,
- o) Terbuka dan selektif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Tenaga Administrasi

Pada dasarnya, tenaga administrasi dan penunjang akademik lainnya berada satu atap dengan Jurusanlainnya di bawah Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara. Dalam rangka meningkatkan kualitas kerja karyawan, teknisi dan laboran, maka setiap ada even kegiatan pendidikan dan pelatihan, mereka diikutsertakan, baik yang diselenggarakan perguruan tinggi secara terprogram maupun yang diselenggarakan di luar perguruan tinggi.

Jenis pendidikan dan pelatihan yang harus diikuti ditentukan oleh Jurusan, penawaran dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia, yang dipandang cukup penting dalam rangka pengembangan kualitas, wawasan, integritas dan ketrampilan staf.

Adapun pengembangan yang bersifat kuantitatif, Jurusan berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan oleh institut yang menempuh kebijakan *zero growth*, sehingga untuk beberapa tahun ke depan Jurusan memandang pentingnya menambah jumlah staf. Tetapi tentu saja hal ini terkait dengan kebijakan institut, Jurusan hanya mengusulkan peta kebutuhan dosen maupun staf. Apalagi pengembangan Jurusan yang lebih mengarah pada KBK maka dipandang perlu untuk penambahan staf sebab sampai saat ini Jurusan hanya memiliki seorang staf sementara dalam pengembangan dan tugas-tugas sangat banyak sekali.

Peraturan kerja baik tenaga pengajar, teknisi, laboran, maupun pegawai administrasi mengikuti peraturan kerja yang telah ditetapkan institut. Meskipun demikian dalam beberapa hal, utamanya yang berkaitan dengan peraturan kerja tenaga pengajar ditentukan oleh Fakultas dan Jurusan.

Kasus-kasus pelanggaran kode etik umum maupun proses pembelajaran pertama-tama ditangani Jurusan secara informal dengan teguran lisan. Jika pelanggaran masih berlanjut, kasus akan disampaikan kepada pimpinan fakultas. Suatu perilaku dinilai melanggar kode etik umum maupun proses pembelajaran didasarkan pada pedoman tata tertib mahasiswa dan peraturan disiplin pegawai yang ditetapkan institut.

Patut dicatat bahwa sejauh ini belum pernah dijumpai kasus-kasus berat dalam arti menyangkut penyelewengan moral/akhlik. Kasus yang sering muncul dapat dikategorikan kasus-kasus dalam skala yang dapat diselesaikan dengan pendekatan konseling atau kekeluargaan.

Etika Tenaga Administrasi dan Pendukung lainnya adalah:

- a) Bertaqwa kepada Allah Swt., bersikap ilmiah, jujur dan adil.
- b) Berakhlik mulia, istiqamah, wara', tawadhu', khudu', sabar, dan qana'ah.
- c) Taat beribadah dan menegakkan syi'ar Islam.
- d) Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.
- e) Bertanggung jawab dan cinta profesi.
- f) Menjunjung tinggi dengan prinsip "melayani".
- g) Jujur dan adil terhadap yang dilayani.

- h) Membangun hubungan baik dengan orang lain; rekan kerja, bawahan, atasan, dan masyarakat.
- i) Menjunjung tinggi prinsip efisiensi.
- j) Mengembangkan diri secara kreatif.
- k) Disiplin dalam melaksanakan tugas

Jumlah Tenaga Administrasi Fakultas Ushuluddin

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1.	SMU	1	9,1 %
2.	Sarjana S.1	9	81,8 %
3.	Sarjana S.2	1	9,1 %
	Jumlah	11	100 %

D. Mahasiswa

Setiap tahun penerimaan, frekwensi peminat Jurusan Perbandingan Agama mengalami fluktuasi. Jumlah mahasiswa yang kuliah Jurusan ini setiap angkatannya berkisar antara 20-30 orang dan mayoritas didominasi jenis kelamin perempuan.

Upaya yang dilakukan oleh institusi dan Jurusan dalam meningkatkan minat calon mahasiswa baru adalah dengan promosi melalui brosur, spanduk, media cetak dan elektronik serta promosi (presentasi) langsung ke sekolah yang dilakukan oleh tim khusus. Disamping itu ada beberapa upaya yang dilakukan untuk peningkatan mutu manajemen Jurusan: 1) Jurusan menyebarkan angket umpan balik pelayanan Jurusan kepada mahasiswa; 2) mengikutsertakan dosen dan

mahasiswa dalam workshop kepemimpinan, serta pelatihan manajemen kependidikan secara periodik; 3) mengadakan rapat dosen serta dialog dengan mahasiswa untuk menjaring aspirasi dan pendapat dari dosen dan mahasiswa untuk peningkatan mutu jurusan.

Secara akademik, mahasiswa yang kuliah pada Jurusan Perbandingan Agama memiliki kemampuan intelektual yang berimbang dengan mahasiswa pada tiga Jurusan lainnya. Tingkat prestasi dalam ukuran Indeks Prestasi (IP) ada yang menonjol dan ada juga yang anjlok. Dari segi kreatifitas dalam kegiatan kemahasiswaan intra kampus, para mahasiswa Jurusan PA juga berpartisipasi aktif. Ada yang dalam bentuk pelaksanaan seminar, belajar atau diskusi kelompok, pengabdian masyarakat, kegiatan kesenian, olah raga dan lain sebagainya.

HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) sebagai perpanjangan tangan dari Jurusan dalam mengatur kegiatan intra kampus atas pengawasan dari ketua Jurusan dan diketahui oleh pembantu dekan III. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan harus dilaporkan kepada ketua Jurusan, dan membuat rencana kegiatan kedepan atas persetujuan ketua Jurusan agar aktivitas jalannya perkuliahan tidak terganggu.

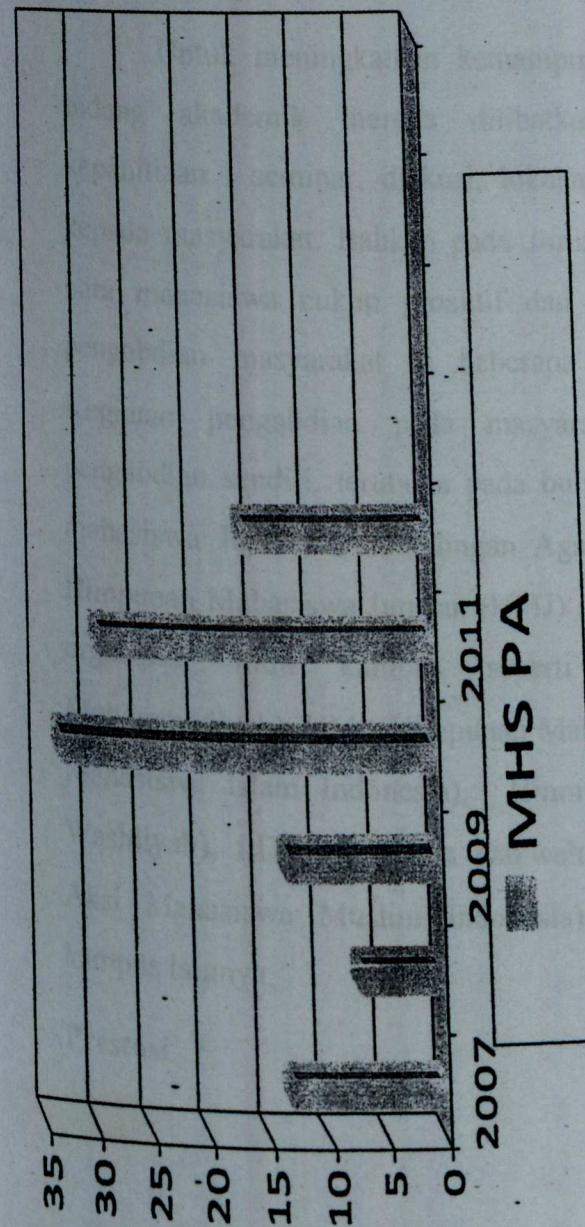
Mahasiswa yang bermasalah pada umumnya tidak selalu mengadu kepada dosen Penasehat Akademik tetapi kepada ketua Jurusan hal ini disebabkan asumsi mahasiswa bahwa dosen Penasehat Akademik hanya sebatas urusan Kartu Rencana Studi (KRS) saja, juga tidak setiap hari mahasiswa dapat bertemu dengan dosen Penasehat Akademik bahkan ada yang cenderung susah dijumpai.

Tingkat perekonomian wali mahasiswa yang kuliah pada Jurusan PA mayoritas baik. Perlu diketahui untuk IAIN SU dan Perguruan Tinggi lainnya yang ada di wilayah Sumatera Utara, khusus bagi mahasiswi (wanita) ketika memasuki dunia perguruan tinggi sekaligus dapat dijadikan indikator bahwa orang tuanya memiliki tingkat perekonomian sedang, artinya sudah mampu membiayai perkuliahan anaknya. Biasanya masyarakat putri sangat terbatas peluangnya untuk melakukan pekerjaan (tambahan) sambil kuliah, kalaupun ada jumlahnya relatif sedikit. Namun bagi mahasiswa Jurusan PA yang laki-laki, ada sebahagian kecil yang membiayai perkuliahan dengan bekerja sambil kuliah (*learning by doing*).

Pada saat ujian tertulis cukup sulit mengetahui profil mahasiswa, tetapi setelah diadakan ujian lisan atau wawancara maka ditemukan berbagai profil mahasiswa yaitu; berasal dari daerah, tamatan Aliyah, pesantren, SMU, tamatan STM, latar belakang keluarga, hobby dan tingkat ekonomi keluarga. Secara umum tingkat ekonomi mahasiswa rendah jika diukur dari segi transportasi yang mereka gunakan ke kampus, naik angkot, sepeda motor, naik sepeda, jalan kaki dan cukup jarang ditemukan mahasiswa menggunakan mobil pribadi. Tempat tinggal mahasiswa indekos yang tidak jauh jaraknya dari kampus, tinggal di rumah orang tua dan sebagian kecil mahasiswa laki-laki tinggal di masjid sebagai penjaga masjid atau menjadi nazir.

PERKEMBANGAN JUMLAH MAHASISWA

TAHUN MASUK	TAHUN AKADEMIK						TAHUN AKADEMIK						TAHUN AKADEMIK					
	2006/ 2007			2007/ 2008			2008/ 2009			2009/ 2010			2010/ 2011			2011/ 2012		
L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	
2006	3	10	13	3	10	13	3	10	13	3	10	13	3	10	13	3	10	13
2007			3	4	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4
2008					3	5	8	3	5	8	3	5	8	3	5	8	3	5
2009										2	11	13	2	11	13	1	11	12
2010												15	18	33	15	18	33	15
2011													16	13	29	16	13	29
2012														8	8	16		



Kegiatan Kemahasiswaan

HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) sebagai perpanjangan tangan dari Jurusan dalam mengatur kegiatan intra kampus atas pengawasan dari ketua Jurusan dan diketahui oleh pembantu dekan III. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan harus dilaporkan kepada ketua Jurusan, dan membuat rencana kegiatan kedepan atas persetujuan ketua Jurusan agar aktivitas jalannya perkuliahan tidak terganggu.

Untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas mahasiswa di bidang akademik mereka dilibatkan dalam berbagai kegiatan kepanitiaan ; seminar, diskusi, lokakarya, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat. Bahkan pada Jurusan Perbandingan Agama (PA) para mahasiswa cukup proaktif dan selalu memperkarsai kegiatan pengabdian masyarakat di beberapa wilayah di Sumatera Utara. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan mencari lokasi pengabdian sendiri, terutama pada bulan suci Ramadhan. Selain itu, mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama (PA) aktif memfungsikan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) serta aktif pula dalam berbagai organisasi intra kampus seperti IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia), Himmah (Himpunan Mahasiswa al-Washliyah), LDK (Lembaga Dakwah Kampus), KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), dan lembaga-lembaga intra-kampus lainnya.

Prestasi

Hampir dalam setiap even perlombaan yang diikuti oleh mahasiswa Jurusan PA baik yang lokal, nasional dan internasional selalu mendapat prestasi, adapun prestasi-prestasi yang dicapai diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan	Tingkat (Lokal, Wilayah, Nasional, atau Internasional)	Prestasi yang Dicapai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nasyid	Lokal	Juara II
2	Tenis Meja	Lokal	Juara II
3	Karya Ilmiah	Lokal	Juara II
4	Hidzil Qur'an	Wilayah	Juara III
5	Sepak Bola	Wilayah	Juara Umum
6	Pidato Bahasa Arab	Wilayah	Juara I
7	Pidato Bahasa Inggris	Wilayah	Juara III
8	MTQ Gol.remaja Putri	Wilayah	Juara II
9	Tilawah Putri	Nasional	Juara III
10	Volly Ball	Wilayah	Juara I
11	Fahmil Qur'an	Lokal	Juara III
12	Paduan Suara	Wilayah	Juara II

Pelayanan Untuk Mahasiswa.

Bantuan tutorial untuk mahasiswa telah diprogramkan pihak IAIN SU sebagai organisasi induk. Bentuk pelayanan tutorial yang

diberikan berupa penasehat akademis, layanan konsultasi tentang Indeks Prestasi dan konsultasi materi perkuliahan yang akan diambil atau dipilih dalam setiap semester.

Bentuk tutorial lainnya, khusus tentang layanan konseling individu dilaksanakan oleh dosen yang memiliki latar belakang pendidikan tentang konseling. Kegiatan layanan tutorial ini sifatnya tidak terjadwal, hanya kepada mahasiswa yang membutuhkan saja.

Selanjutnya untuk melakukan pelacakan terhadap hasil studi, setiap semester dilakukan pengadministrasian nilai terhadap mahasiswa. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pengumpulan foto copy lembar KHS mahasiswa yang telah ditandatangani oleh penasehat akademis.

Dalam proses pelayanan, Jurusan Perbandingan Agama membuat form studi mutu perkuliahan. Daftar formulir prosedur mutu perkuliahan Jurusan Perbandingan Agama (PA) Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara ini dibuat untuk memperlancar proses kegiatan akademik dan perkuliahan yang dikelola Jurusan. Daftar ini memuat manual perkuliahaan yang diawali dengan form kartu rencana studi hingga form surat persetujuan penjilidan dan penandatanganan skripsi.

Formulir prosedur mutu perkuliahan merupakan panduan dalam mengatur proses akademik dan perkuliahan serta mengatur tentang kewajiban Dosen dan Mahasiswa dalam melaksanakan aktivitasnya di Jurusan Perbandingan Agama (PA).

Diharapkan dengan diterbitkannya formulir prosedur mutu perkuliahan Jurusan Perbandingan Agama (PA) Fakultas Ushuluddin

IAIN Sumatera Utara ini dapat meningkatkan kinerja dan kualitas mutu pendidikan dan pengajaran pada Jurusan Perbandingan Agama (PA) Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara

Secara rinci pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa, yaitu

- a) Kuliah tatap muka dan semester pendek. Mata kuliah yang ditawarkan pada semester pendek minimal diikuti oleh 10-15 orang mahasiswa. Evaluasi keberhasilan pendidikan sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SKS.
- b) Penasehat akademik. Penasehat akademik (PA) adalah dosen atau staf pengajar yang diserahi tugas untuk membimbing mahasiswa dan membantu mereka dalam menyelesaikan studi dalam batas waktu yang ditentukan dengan memperoleh hasil yang optimal.
- c) Pelayanan administrasi ; Kartu Rencana Studi (KRS), KHS (Kartu Hasil Studi). Pelayanan ini cukup optimal diberikan kepada mahasiswa karena seluruh keperluan mahasiswa sudah menggunakan sistem komputerisasi.
- d) Dalam pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) panitia ujian menjadikan KRS sebagai kartu ujian, tidak dibenarkan mengikuti UAS bagi mahasiswa yang mata kuliahnya tidak tercantum dalam KRS, dan bila ada perobahan harus ada faraf ketua Jurusan, dan tidak dibenarkan mahasiswa mengikuti UAS pada mata kuliah tertentu bagi yang tidak memenuhi perkuliahan minimal 75 % dari jumlah tatap muka dengan dosen mata kuliah, yang akan sudah di umumkan dua hari sebelum hari pelaksanaan ujian berlangsung. Bagi dosen PA

berkewajiban memberi imformasi kepada Jurusan apabila tidak dapat memberikan kuliah pada waktu yang di alokasikan untuk mengisi formulir atau belangko jadwal pengganti perkuliahan.

Prosedur pelaksanaan perkuliahan diawali dengan : Mahasiswa harus berkonsultasi dengan PA dengan menunjukkan kartu bimbingan akademik untuk : *Pertama*, memperoleh pengarahan dalam menentukan beban studi yang dipilihnya, *kedua*, mendapatkan pertimbangan terhadap jumlah nilai kredit (SKS) yang dapat diambilnya dan perubahan serta penyesuaian program. Adapun jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen PA setiap semester atau pertahun lebih kurang 20 orang, penetapan jumlah ini berdasarkan SK Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara.

Pelayanan administrasi ; Kartu Rencana Studi (KRS), KHS (Kartu Hasil Studi). Pelayanan ini cukup optimal diberikan kepada mahasiswa karena seluruh keperluan mahasiswa sudah menggunakan sistem komputerisasi.

E. Aspek Sarana Dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Umum

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses serta upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan

pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya

Adapun sarana prasarana umum yang dimiliki Jurusan Perbandingan Agama adalah meliputi: Sarana akademik umum seperti, ruang aula, ruang dosen, ruang P2MP, perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan ruang lab komputer, Kepala Tata Usaha, Kasubbag Umum dan Kasubbag Akademik, ruang administrasi, terletak di gedung Akademik II Fakultas Ushuluddin IAIN-SU. Sedangkan ruang untuk Pimpinan/Dekan, Pembantu Dekan, ruang Jurusan, Sekretaris, dan Kepala Laboratorium terletak di gedung Akademik I Fakultas Ushuluddin IAIN-SU. Adapun ruang sidang Fakultas Ushuluddin terletak di gedung III Fakultas Ushuluddin IAIN-SU. Dan yang terakhir adalah ruang kuliah yang terletak di lantai I dan II gedung VI Fakultas Ushuluddin IAIN-SU.

Tabel I

Data Jumlah Mahasiswa : Ruang Kuliah Jurusan PA 3 tahun terakhir

Tahun	Jumlah Mahasiswa	Luas ruang kuliah
2010/2011	33	12 x (7 x 9 M ²)
2011/2012	29	12 x (7 x 9 M ²)
2012/2013	16	12 x (7 x 9 M ²)

Tabel II

Data Jumlah Tenaga Administrasi : Ruang Administrasi, 3 tahun terakhir

Tahun	Jumlah Tenaga Administrasi	Luas ruangan
2009/2010	12	(7 x 9 M ²)

2010/2011	12	(7 x 9 M ²)
2011/2012	11	(7 x 9 M ²)

Tabel III
Rasio ketersediaan jumlah komputer dengan jumlah mahasiswa.

Tahun	Jumlah mahasiswa	Jumlah computer	Rasio
2010/2011	33	19	1:2
2011/2012	29	22	1:1
2012/2013	16	19	1:1

Tabel IV
Data penggunaan ruang sidang untuk seminar proposal mahasiswa Jurusan PA

Tahun	Jumlah	Mahasiswa
2010/2011	1	19
2011/2012	1	11
2012/2013	1	9

Tabel V
Data penggunaan ruang kelas PA untuk kuliah

Tahun	Jumlah Mahasiswa	Jumlah lokal
2010/2011	33	3
2011/2012	29	3
2012/2013	16	3

Karena terbatasnya jumlah lokal untuk ruang kuliah, maka kuliah dibagi dua, yakni pagi dan sore. Untuk kuliah pagi semester I dan III, sore Semester V dan VII. Setiap ruang kuliah dilengkapi dengan LCD, *white board*, spidol.

Jenis Aset Infrastruktur	Nama	Jumlah
Sarana dan Prasarana Fakultas Ushuluddin IAIN-SU	Laboratorium Komputer	1
	Perpustakaan	1
	Laboratorium Jurusan	1
	Ruang Kuliah	12
	Wireless	1
	Whiteboard/ruang/kelas	12
	Handycam	1
	In focus	10
	Sepeda Motor	1
	Ruang Aula	1

	Ruang Sidang	1
	Ruang Dosen	1
	Ruang Kerja	10

Sarana dan Prasarana Khusus

Di samping sarana dan prasarana umum, Jurusan PA juga ditunjang dengan sarana dan prasarana khusus yaitu ruang laboratorium sosial worker, dimana laboratorium ini dipakai untuk praktikum sosial worker dan pembekalan untuk PPL mahasiswa semester VI dan VII, ruang laboratorium ini juga sudah dilengkapi dengan satu unit komputer, satu unit lap top, kursi dan meja. Dari sarana kuantitas laboratorium ini sudah cukup memadai, karena sudah dilengkapi dengan LCD, Slide, dan Handycam.

Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki Insititut adalah sumber daya pendukung yang terdiri Pusat Bahasa dan Budaya, Perpustakaan IAIN dan American Corner, Pusat Komputer IAIN, Bank BRI dan Puduarta Insani, Kantor senat mahasiswa, Koperasi dan Palang Merah Indonesia IAIN Medan.

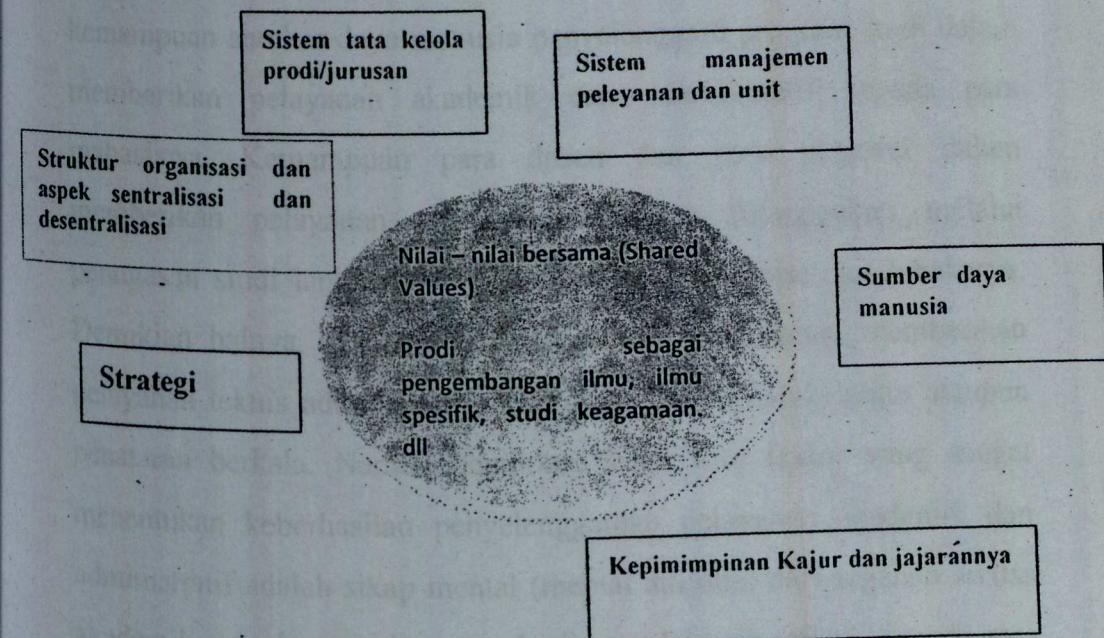
Terkait dengan penggunaan sarana dan prasarana penunjang merujuk pada kepentingan civitas akademika IAIN Sumatera Utara dan sudah digunakan untuk mahasiswa dalam berbagai kegiatan dan mencari lieteratur-literatur kuliah maupun data lainnya.

F. Aspek Menejemen

Pembahasan tata kelola dalam sebuah organisasi tidak lepas dari tata nilai. Dalam hal ini ada pertanyaan penting mengenai apa yang disebut tata nilai dalam perguruan tinggi, bagaimana kaitannya dengan

sistem manajemen dalam perguruan tinggi, dalam fakultas bahkan dalam sebuah prodi atau program studi dalam suatu fakultas. bagaimana kaitannya dengan struktur organisasi dan tata kelola akademik yang dapat mendukung proses pembelajaran kearah yang lebih baik.

Gambar di bawah ini menggambarkan suatu asumsi dasar bahwa sebuah prodi dalam suatu fakultas di perguruan tinggi perlu mempunyai *shared value* yang intinya pada pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan.



shared value dan berbagai hal terkait (diadaptasi dari McKinsey)

Dalam tata nilai ini, ada kemungkinan sebuah jurusan atau prodi belum mempunyai shared-value yang berfokus pada pengembangan ilmu, sehingga gagal mempunyai dasar kuat dalam memberikan nilai tambah bagi mahasiswanya. Logika berfikir sederhana dapat

menangkap arti ini. Ketika sebuah jurusan atau prodi tidak mempunyai nilai-nilai kuat yang terkait dengan berbagai hal di atas, maka fungsi pelayanan dan pendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian dapat turun kinerjanya. Siapakah penggerak dan pengelola prodi saat ini?

Kualitas pelayanan jasa dalam pendidikan tinggi merupakan salah satu faktor penentu kemampuan survival suatu program studi. Oleh karena itu, pengelola program studi dituntut untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia penyelenggara program studi dalam memberikan pelayanan akademik dan administratif kepada para mahasiswa. Kemampuan para dosen dan para pegawai dalam memberikan pelayanan akademik, lajimnya ditingkatkan melalui penugasan studi lanjut, penelitian, penataran, seminar dan lokakarya. Demikian halnya, kemampuan staf administratif dalam memberikan pelayanan teknis administratif, dilakukan melalui studi lanjut ataupun penataran berkala. Namun demikian, salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan akademik dan administratif adalah sikap mental (mental attitude) dari segenap sivitas akademika untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada para konsumen, baik pelayanan akademik (academic service) ataupun pelayanan administratif (administrative service).

Kepemimpinan

Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam Jurusan, mengikuti nilai, norma, etika, dan

budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.

Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional Jurusan. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi perguruan tinggi. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.

Pola kepemimpinan yang dilakukan oleh Jurusan adalah Kepemimpinan partisipatif demokratik, dengan mengutamakan kepentingan Jurusan melalui kesepakatan bersama. Jurusan memberikan kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat untuk mencapai tujuan. Kondisi ini memungkinkan untuk mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan yang membutuhkan solusi cepat pada lingkungan internal maupun eksternal. Pola kepemimpinan ini tercermin dari rapat-rapat Jurusan yang secara regular dilaksanakan pada awal dan akhir semester perkuliahan. Rapat-rapat tersebut membahas pelaksanaan

perkuliahan yang telah atau akan dilaksanakan dan evaluasi kegiatan Jurusan, serta rencana-rencana mutakhir yang perlu dilakukan.

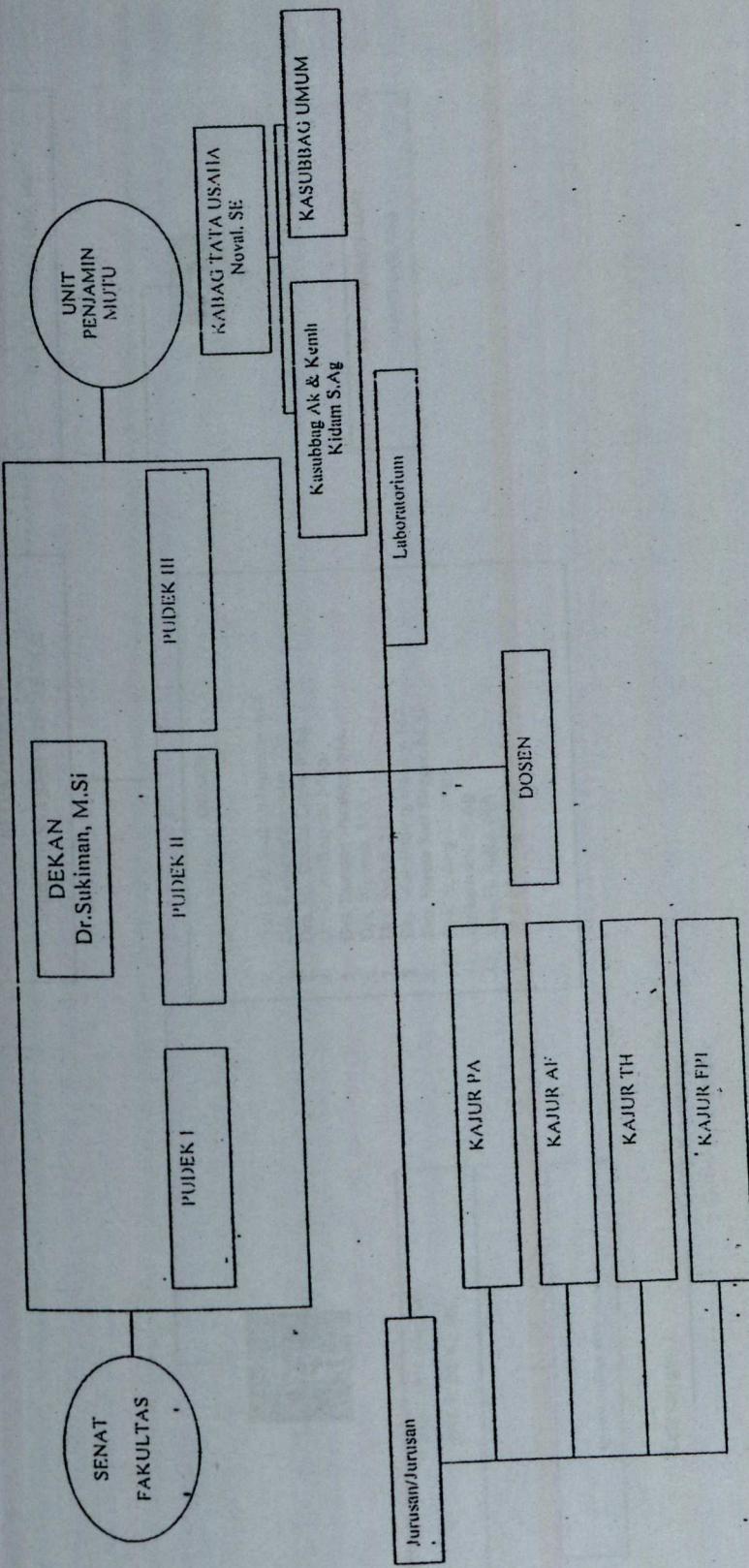
KELEMBAGAAN

STRUKTUR KELEMBAGAAN FAKULTAS USHULUDDIN

IAIN SUMATERA UTARA

2010-2014

BAGAN ORGANISASI FAKULTAS USHULUDDIN IAIN SUMATERA UTARA



**STRUKTUR JURUSAN
PERBANDINGAN AGAMA
(PA)**



KETUA JURUSAN

DRA. HUSNA SARI SIREGAR, M.SI

GUGUS KENDALI MUTU

DIRA. HJ. DAHLIA LABIS, MA

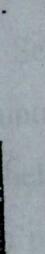
DOSEN

1. Prof.Dr.H Syahrin Harahap, MA
2. Drs. Kamaluddin, MA
3. Dra. Hj. Dahlia Labis, MAG
4. Dr. H. Arifinsyah, MAG
5. Drs. Darman Harahap, MA
6. Drs. Wirman, MA
7. Drs. Syukri, MA
8. Drs. Marainbang Daulay, MA
9. Dra. Husna Sari Siregar, M.Si
10. Dra. Endang Ekowati
11. Zukarnain, M.Ag
12. Drs. H. Indra, MA
13. Sovi Monang Rangkuti, M.Th.



STAF LABORATORIUM

ISMET SARL, MA



SEKERTARIS JURUSAN

DRS. H. INDRA, MA

STAF JURUSAN
SHALAHUDDIN ASHANI, M. SI

Keterangan :
 ----- : Garis Komando
 ----- : Garis Koordinasi

G. Penjamin Mutu

Jurusank Perbandingan Agama memiliki Gugus Kendali Mutu (GKM) yang bertugas membantu pimpinan Jurusan PA dalam hal penjaminan mutu. Penjaminan mutu dimaksudkan untuk mempertahankan tingkat kualitas secara berkesinambungan dengan aspek-aspeknya yang meliputi: input, proses dan output.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran serta kualitas lulusan dan SDM, Fakultas Ushuluddin dan Perbandingan Agama membentuk Lembaga Gugus Kendali Mutu Fakultas dengan ketua Dr. Sulaiman Muhammad Amir, MA dan Gugus Kendali Mutu Jurusan dengan ketua Dra. Hj. Dahlia Lubis, MAg. Dengan SK Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara No. 15 Tahun 2012 tentang pelaksana gugus kendali mutu Jurusan Perbandingan Agama.

Adapun tugas Gugus tersebut adalah membantu Dekan dalam pengembangan system penjaminan mutu akademik. Dalam melaksanakan tugasnya Gugus Kendali Mutu Fakultas dapat melakukan konsultasi dengan GKM tingkat institut.

Penjaminan mutu Jurusan merupakan unit kecil dipimpin oleh seorang dosen tetap Jurusan serta tidak menjabat sebagai fungsionaris. Tujuannya supaya tugas dapat terlaksana dengan baik dan untuk menjaga adanya unsur subjektifitas. Selain itu, Jurusan secara rutin juga mengadakan rapat internal untuk mempersiapkan dan mengevaluasi keberlangsungan proses pembelajaran. Penjaminan mutu Jurusan juga melalui himbauan pada dosen pengajar di Jurusan untuk selalu mengumpulkan silabus dan RPP di awal semester dan

memberikan questioner berisi mutu perkuliahan selama satu semester setiap dosen pada mahasiswa. Rapat dilaksanakan sebelum UTS, sebelum UAS dan menjelang dimulainya proses pembelajaran sebelum semester genap maupun ganjil.

Pelaksanaan penjaminan kualitas Jurusan Perbandingan Agama telah dilakukan secara berkelanjutan dan selalu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas Jurusan Perbandingan Agama. Peran Unit Jaminan Mutu di tingkat jurusan, Gugus Jaminan Mutu di Fakultas dan Pusat Jaminan Mutu di tingkat Institut memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas Jurusan Perbandingan Agama. Terutama dalam hal panduan-panduan tertulis yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Jurusan Perbandingan Agama yang baik.

BAB III

KATEGORI ANALISIS HUBUNGAN AGAMA, MULTIKULTURALISME DAN KEARIFAN LOKAL

A. Kaidah-Kaidah Kearifan Budaya Lokal

Dalam beberapa waktu terakhir, muncul antusiasme untuk mengartikulasikan kearifan budaya lokal sebagai pijakan dalam memperkaya praksis harmonisasi interaksi kehidupan sosial keagamaan. Gerakan ini dilatarbelakangi keyakinan bahwa modernitas dengan segala perangkat pendukungnya tidak cukup memadai mengantarkan manusia dalam menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan mencapai kebahagiaan yang autentik (*authentic happiness*). Modernitas dengan rasionalitas, objektifitas, dan kebebasan individu yang tercerabut dari akar spiritualitas dan kearifan telah membawa dampak terjadinya ketidakseimbangan dan disharmonisasi hubungan manusia, baik dengan sesamanya maupun dalam interaksinya dengan alam.

Pengertian Kearifan Lokal secara leksikal, terdiri dari 2 kata yaitu, kearifan (*wisdom*) dan lokal (*lokal*). Lokal berarti setempat dan *wisdom* sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain maka *lokal wisdom* dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (*lokal*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Dalam disiplin antropologi dikenal istilah *lokal genius*. *Lokal genius* ini merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Quatrich Wales. Para antropolog membahas secara panjang lebar

pengertian lokal genius ini. Antara lain Haryati Soebadio mengatakan bahwa *lokal genius* adalah juga *kultural identity*, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri²³. Sementara Moendardjito, mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai lokal genius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang.²⁴

Ciri-ciri ataupun karakter yang melekat pada kearifan budaya lokal, di antaranya adalah: 1) mampu bertahan terhadap budaya luar, 2) memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, 3) mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, 4) mempunyai kemampuan mengendalikan, 5) mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

I Ketut Gobyah dalam “Berpijak pada Kearifan Lokal”, mengatakan bahwa kearifan lokal (*lokal genius*) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara

²³Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa (local Genius)*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), hlm. 18-19

²⁴*Ibid.*, hlm. 40-41.

terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.²⁵

S. Swarsi Geriya dalam “Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali”²⁶ mengatakan bahwa secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga.

Dalam penjelasan tentang ‘urf, *Pikiran Rakyat* terbitan 6 Maret 2003 menjelaskan bahwa kearifan adat dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang didasari pengetahuan dan diakui akal serta dianggap baik oleh ketentuan agama. Adat kebiasaan pada dasarnya teruji secara alamiah dan niscaya bernilai baik, karena kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang berulang-ulang dan terus-menerus mengalami penguatan (*reinforcement*). Apabila suatu tindakan tidak dianggap baik oleh masyarakat maka ia tidak akan mengalami penguatan secara terus-menerus. Pergerakan secara alamiah tersebut berproses, berdinamika, dan terjadi secara sukarela dan alamiah karena dianggap baik atau mengandung kebaikan. Adat yang tidak baik akan hanya terjadi apabila

²⁵ I Ketut Gobyah dalam “Berpijak pada Kearifan Lokal”, sebagaimana dikutip oleh, Sartini, “Menggali Kearifan Lokal Nusantara; Sebuah Kajian Falsafati”, dalam, *Jurnal Filsafat*, Jilid 37, Nomor 2, Agustus 2004.

²⁶ S. Swarsi Geriya dalam “Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali”, dalam, *Ibid.*

terjadi pemaksaan oleh penguasa, apabila demikian yang terjadi, maka ia tidak tumbuh secara alamiah tetapi dipaksakan.

Secara filosofis, kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal/pribumi (*indigenous knowledge systems*) yang bersifat empirik dan pragmatis. Bersifat empirik, karena kearifan lokal merupakan hasil olahan dan kreasi masyarakat secara lokal dan berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka. Bertujuan pragmatis, karena seluruh konsep yang terbangun dari kearifan lokal sebagai hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan, bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari (*daily problem solving*).²⁷

Kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu (budaya lokal) dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu (masyarakat lokal). Dengan kata lain, kearifan lokal bersemayam pada budaya lokal (*local culture*). Budaya lokal (juga sering disebut budaya daerah) merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk membedakan suatu budaya dari budaya nasional (Indonesia) dan budaya global. Budaya lokal adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati lokalitas atau daerah tertentu yang berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di tempat yang lain.

²⁷ Selanjutnya bandingkan dengan, Ismet Sari, "Strategi Kebudayaan Pembangunan Keberagamaan di Indonesia; Kontribusi Kearifan Lokal dalam Masyarakat Berbhineka", *Ushuluddin: Jurnal Pemikiran Islam, Kewahyuan, Politik dan Hubungan Antar Agama*, No. 42. Januari-Juli Tahun 2012.

Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 pasal 1 mendefinisikan budaya daerah sebagai “suatu sistem nilai yang dianut oleh komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap, dan tatacara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya”. Di Indonesia istilah budaya lokal juga sering disepadankan dengan budaya etnik/ subetnik. Setiap bangsa, etnik, dan sub etnik memiliki kebudayaan yang mencakup tujuh unsur, yaitu: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian.

Secara umum, kearifan lokal (dalam situs Departemen Sosial RI) dianggap sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dengan pengertian-pengertian tersebut, kearifan lokal bukan sekedar nilai tradisi atau ciri lokalitas semata melainkan nilai tradisi yang mempunyai daya-guna untuk mewujudkan harapan atau nilai-nilai kemapanan yang juga secara universal yang didamba-damba oleh manusia.

Dari definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa, kearifan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari generasi ke generasi. Beberapa bentuk pengetahuan tradisional

itu muncul lewat cerita-cerita, legenda-legenda, nyanyian-nyanyian, ritual-ritual, dan juga aturan atau hukum setempat. Kearifan lokal menjadi penting dan bermanfaat hanya ketika masyarakat lokal yang mewarisi sistem pengetahuan itu mau menerima dan mengklaim hal itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Dengan cara itulah, kearifan lokal dapat disebut sebagai jiwa dari budaya lokal.

Tesaurus Indonesia menempatkan kata kearifan sejajar dengan kebijakan, kebijakan, kebijaksanaan, dan kecendekiaan. Sedang kata arif memiliki kesetaraan makna dengan: akil, bajik, bakir, bestari, bijak, bijaksana, cendekia, cerdas, cendekia, cerdik, cergas, mahardika, pandai, pintar, dan terpelajar.²⁸ Dalam tradisi kesarjanaan Islam, istilah arif (*hikmah*) dan ilmu (*ilm*) sering diidentikkan dan terkadang diposisikan yang satu sebagai subordinat lainnya.

Berdasar penulusuran Rosenthal (2007) istilah hikmah secara substansial merujuk pada level atau tingkat kesadaran tertinggi yang berada di atas pengetahuan,²⁹ Sternberg mengartikan kearifan (*wisdom*) sebagai pemanfaatan secara terpadu kecerdasan, kreativitas dan pengetahuan yang diperantarai seperangkat nilai dalam pencapaian kebaikan bersama (*common good*) melalui pertimbangan yang seimbang ntara kepentingan intrapersonal, interpersonal dan ekstrapersonal yang

²⁸Dendi Sugono, Sugiyono, Meity Taqdir Qudratillah, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)

²⁹"wisdom is something better than knowledge and insight in the realm of both human perceptions and theological speculation." Franz Rosenthal, *Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam*, (New York: Routledge, 2007)



37/Lp/LP2M/03/2014

berlangsung dalam jangka waktu singkat atau lama untuk beradaptasi, membentuk atau memilih lingkungan.³⁰

Kearifan budaya lokal merupakan akumulasi dari pengetahuan dan kebijakan yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah komunitas yang merepresentasikan perspektif teologis, kosmologis, dan sosiologisnya. Terdapat beberapa istilah yang digunakan secara bergantian dalam memaknai kearifan budaya lokal, misalnya pengetahuan lokal (*local knowledge*), budaya lokal (*local culture*), keunggulan lokal (*local genius*), budaya pribumi (*indigenous culture*), dan pengetahuan asli (*indigenous knowledge*). Di Indonesia istilah kearifan budaya lokal akhir-akhir ini lebih populer dibanding istilah-istilah lainnya, hal ini sebagaimana tercermin dalam penggunaan istilah ini dalam literatur, media massa dan percakapan sehari-hari.

Abu Bakar mengartikan kearifan budaya lokal sebagai kebijakan yang bersandar pada filosofi, nilai-nilai, etika dan prilaku yang melembaga secara tradisional untuk mengelola sumber daya (manusia, budaya, alam) secara berkelanjutan.³¹ kearifan budaya lokal

³⁰ Robert J. Sternberg, *Wisdom, Intellegence, and Creativity Synthesized*, (New York: Oxford University Press, 2003)., Sternberg, "A Balance Theory of Wisdom", dalam Kaufman, James C., Grigorenko, Elena L. Ed., *The Essential Sternberg: Essonay on Intellegence, Psychology andd Education*, (New York: Springer Publishing Company, 2009), Sternberg, "Academic Intelligence is Not Enough! WICS: An-Expanded Model for Effective Practice in School and Later Life" dalam Preiss, David D., Sternberg, Robert J., Ed., *Innovations in Educational Psychology: Perspective on Learning, Teaching and Human Development*, (New York: Springer Publishing Company, 2010).

³¹ Mustafa Abu Bakar, "Membangun Semangat Nasionalisme dengan Bingkai Kearifan Lokal Rakyat Aceh: Tinjauan Ketahanan Pangan". www.setneg.Go.id. (20 Mei 2012).

sebagai kebenaran yang mentradisi atau *ajeg* merupakan perpaduan nilai-nilai suci Firman Tuhan dan nilai turun temurun yang dikembangkan komunitas tertentu. Seseorang dinilai arif apabila dapat mengakumulasi dan mengkolaborasikan antara konteks dan nilai-nilai yang melingkupinya, serta dapat mewujudkan pola hidup yang harmonis dan seimbang, tidak mungkin seseorang dipandang bijak apabila sikap dan tindakannya berlawanan dengan nilai yang berlaku.³²

Sebagai entitas sosial yang dinamis, masyarakat Indonesia mengkonstruksi kearifan budaya lokal sebagai pandangan dunia memaknai realitas. kearifan budaya lokal yang merupakan representasi budaya sebuah komunitas diartikulasikan baik dalam wujud kasat mata (*tangible*) maupun yang tidak kasat mata (*untangible*). Dalam klasifikasi sejumlah pakar, terdapat lima kategori kearifan budaya lokal: *pertama*, kearifan yang berupa pandangan hidup (filosofi); *kedua* kearifan berupa sikap hidup sosial, nasihat dan iktibar yang diungkap dalam bentuk pepatah, perumpamaan, pantun, syair atau cerita rakyat (*foklor*); *ketiga*, kearifan dalam seremoni atau upacara adat; *keempat*, kearifan berupa prinsip, norma, dan tata aturan yang berwujud menjadi sistem sosial; dan *kelima*, kearifan berupa kebiasaan, perilaku sehari-hari dalam pergaulan sosial.³³

³² Robert J. Sternberg, "Wisdom and Giftedness" dalam Shavinina, Larisa V., Ferrari, Michel., Ed., *Beyond Knowledge: Extra Cognitive Aspects of Developing High Ability*, (New Jersey: Lawrence-Elbum, 2004).

³³ Al-Rasyidin, Parluhutan Siregar, Khuzaimah Batubara, "Penyerapan Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Kehidupan Beragama di Medan: Studi tentang Budaya lokal di Medan," dalam Afif dan Saiful Bahri, *Harmonisasi Budaya Dan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Balitbang Kemenag, 2009), hlm. 217.

Sesuai dengan aturan adat, kearifan budaya lokal merupakan sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi serta lingkungan yang hidup di tengah-tengah masyarakat lokal. Ciri yang melekat dalam kearifan tradisional adalah sifatnya yang dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima oleh komunitasnya. Dalam komunitas masyarakat lokal, kearifan budaya lokal mewujud dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan dan juga ketrampilan serta tata nilai dan etika yang mengatur tatanan sosial komunitas yang terus hidup³⁴ dan berkembang dari generasi ke generasi. Mereka yang muncul dari komunitas lokal inilah yang hidup, tumbuh, dan bergelut dengan problem sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lingkungan, mempelajari kegagalan-kegagalan sampai menemukan solusi praktis untuk komunitasnya.

Sebagaimana dinyatakan di atas, belakangan ini, konsep tentang kearifan budaya lokal menjadi salah satu tema pembicaraan penting dalam setiap kesempatan. Dalam konteks lingkungan hidup misalnya, Rachmat Witoelar mengungkapkan bahwa kearifan lingkungan menjadi sangat penting. Ia memandang bahwa kearifan lingkungan merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.

³⁴ Alpha Amirrachman, *Revitalisasi Kearifan Lokal....*, hlm. 2.

Perilaku ini berkembang menjadi suatu kebudayaan di suatu daerah dan akan berkembang secara turun-temurun, secara umum, budaya lokal atau budaya daerah dimaknai sebagai budaya yang berkembang di suatu daerah, yang unsur-unsurnya adalah budaya suku-suku bangsa yang tinggal di daerah itu. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan oleh adanya kemajuan teknologi membuat orang lupa akan pentingnya tradisi atau kebudayaan masyarakat dalam mengelola lingkungan, seringkali budaya lokal dianggap sesuatu yang sudah ketinggalan di abad sekarang ini, sehingga perencanaan pembangunan seringkali tidak melibatkan masyarakat.

Secara mendasar dapat dipahami bahwa kearifan budaya lokal merupakan sistem nilai yang diciptakan sekelompok masyarakat untuk menciptakan budaya dan lingkungan sosial mereka sebagai adaptasi terhadap lingkungan fisik dan biologisnya. Kebiasaan-kebiasaan, praktik, dan tradisi diwariskan dari generasi ke generasi. Pada gilirannya, boleh jadi kelompok tersebut tidak lagi menyadari dari mana asal warisan kearifan tersebut. Generasi berikutnya terkondisikan menerima "kebenaran" itu tentang nilai, pantangan, kehidupan, dan standar perilaku. Individu-individu cenderung menerima dan percaya terhadap apa yang dikatakan budaya mereka. Kita dipengaruhi oleh adat dan pengetahuan masyarakat di mana kita dibesarkan dan tinggal. Kita cenderung mengabaikan atau menolak apa yang bertentangan dengan kepercayaan-kepercayaan kita.³⁵

³⁵ Philip R. Harris & Robert T. Moran dalam *Intercultural Communication: A Reader*, 1982).

Oleh karena itu, kebudayaan yang telah mengalami kristalisasi ini memiliki posisi yang hampir setara dengan agama. Dengan kata lain, dalam beberapa keadaan, kebudayaan hampir menjadi agama. Dalam kondisi ini, kebudayaan hendaknya dipahami sebagai sistem nilai yang membentuk perilaku. Namun sesungguhnya, sebuah kebudayaan memiliki perjalanan yang lebih rumit ketimbang agama sebab kebudayaan membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk kemudian diyakini secara turun-temurun, dan hal ini berbanding lurus dengan kuatnya resistensi sebuah kebudayaan terhadap sistem nilai lain yang relatif baru.

Misalnya, sampai hari ini orang Kanekes di Banten Selatan memiliki keyakinan bahwa mereka tidak boleh melanggar suatu pantangan. Ada dan tidaknya rasionalisasi akan pantangan ini tidak lagi mereka butuhkan, sebab mereka hanya meneruskan apa yang dilakukan oleh para "karuhun" mereka. Dalam posisinya yang seperti ini, tradisi hampir-hampir sejajar dengan doktrin. Namun, justru dengan adanya pantangan semacam ini, kehidupan sosial mereka menjadi terjaga dan hal ini membuktikan bahwa sistem nilai dalam budaya yang mereka miliki berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsinya.

Kasus yang lebih besar mengenai kearifan budaya lokal ini didemonstrasikan dalam sejarah peradaban masyarakat Jepang melalui peristiwa *Restorasi Meiji*.³⁶ Pada saat itu, Jepang sedang mencari

³⁶ Restorasi Meiji adalah sebuah peristiwa yang menjadi titik-tolak kebangkitan budaya Jepang. Ia ditandai dengan kesadaran Jepang atas budaya yang dimilikinya. Nilai-nilai Samurai dan Shogun dibangunkan kembali yang saat itu berhadapan dengan budaya Barat.

identitas diri dan memiliki obsesi untuk sejarah dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju. Namun, segala upaya yang mereka lakukan dengan melakukan “copy-paste” kebudayaan Barat ternyata tidak berhasil karena bertentangan dengan sistem kebudayaan yang mereka yakini. Akhirnya, Kaisar Meiji menggunakan semangat “Samurai” sebagai sistem nilai yang berakar dari budaya dan kearifan masyarakat Jepang. Walhasil, Jepang tidak hanya maju tetapi juga menjadi salah satu negara adikuasa di Asia.

Oleh karena itu, sebuah kebudayaan sesungguhnya tidak sesederhana yang kita lihat dan rasakan. Ia telah mengalami perjalanan dialektika yang demikian panjang hingga mewujud dalam tradisi seperti yang kita kenal sekarang ini. Dengan kata lain, kebudayaan adalah sistem nilai yang tidak hanya mengkristal, tetapi juga telah melembaga dalam kehidupan masyarakat.

Kearifan lokal merupakan salah satu produk kebudayaan. Sebagai produk kebudayaan kearifan lokal lahir karena kebutuhan akan nilai, norma dan aturan yang menjadi model untuk (*model for*) melakukan suatu tindakan. Kearifan lokal merupakan salah satu sumber pengetahuan (kebudayaan) masyarakat, ada dalam tradisi dan sejarah, dalam pendidikan formal dan informal, seni, agama dan interpretasi kreatif lainnya. Diskursus kebudayaan memungkinkan pertukaran secara terus menerus segala ide dan penafsirannya yang meniscayakan tersedianya referensi untuk komunikasi dan identifikasi diri. Ketika gelombang modernisasi, globalisasi melanda seluruh bagian dunia, maka referensi yang berupa nilai, simbol, pemikiran mengalami

penilaian ulang. Ada pranata yang tetap bertahan (stabil), tetapi tidak sedikit yang berubah, sedang membentuk dan dibentuk oleh proses sosial.³⁷

Demokratisasi pasca reformasi ternyata membuat pandangan dunia (*world view*) yang dimiliki oleh kelompok masyarakat etnik, agama maupun politik mengalami perubahan. Begitu juga *ethos*, sikap dan pandangan yang dimiliki oleh kelompok sosial terkait dengan keberadaan orang lain (*the others*) ternyata mengalami perubahan pula. Perubahan yang cenderung negatif, antara lain dengan adanya undang-undang otonomi daerah, muncul isu putra daerahlah yang paling berhak menjadi pemimpin provinsi, bangsa dan kota. Isu-isu kedaerahan juga masih mendominasi kampanye pemilihan umum baik untuk calon anggota legislatif maupun eksekutif. Para pendatang meskipun telah bertahun-tahun tinggal di daerah tersebut dianggap tidak layak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Itulah pandangan dunia atau *world view* yang telah berubah. *World view* menurut Clifford Geertz merujuk pada sebuah pemahaman intelektual, sebuah cara berpikir tentang dunia dan cara kerjanya yang lazim pada kelompok sosial tertentu, sedangkan *ethos* merujuk pada sebuah apresiasi emosional, sebuah cara merasakan dan mengevaluasi dunia.³⁸

Perubahan *world view* dan *ethos* pada masyarakat tertentu menjadikan tema-tema kebudayaan yang sebelumnya dipandang dapat

³⁷ Niel Mulder, *Agama, Hidup Sehari-Hari dan Perubahan Budaya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 204.

³⁸ Nigel Rapport and Joanna Overing, *Sosial and Kultural Anthropology: The Key Concepts*, (London and New York: Routledge, 2000), hlm. 394-396.

menjadi pandangan dunia tentang kerukunan menjadi tidak berfungsi lagi. Ketika terjadi konflik etno-religius di Ambon dan Maluku misalnya, banyak orang yang bertanya: "Bagaimana *pelagandong*, apakah masih ada atau sudah tidak ada?" *Pelagandong* di Maluku, *rumah betang* atau *lamin* di Kalimantan sudah tidak berfungsi lagi karena posisinya sudah ditempati oleh pandangan dunia (*world view*) baru, etos baru dan orientasi baru yang datang dari luar komunitas lokal. Dominasi kebudayaan, migrasi dan demografi, masuknya modal asing dan kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat lokal menggusur nilai-nilai yang selama ini dijunjung tinggi. Jangankan tema-tema kebudayaan masyarakat lokal, yang terhimpun dalam rumpun kearifan lokal, Pancasila sebagai *way of life* bangsa juga tidak lagi sakti sebagai sistem nilai yang menyatukan seluruh idiosiologi anak bangsa. Wacana dominasi ekonomi liberal terhadap ekonomi agama

B. Multikulturalisme dan Kearifan Lokal

Diskursus pada penulisan berikut mencoba mendeskripsikan bahwa multikulturalisme secara filosofis, merupakan pandangan yang meyakini bahwa dalam realitas kehidupan terdapat keragaman kebangsaan, bahasa, tradisi, agama, kepentingan dan sebagainya yang harus dihormati, diakui, dihargai dan difungsikan. Paradigma itu merupakan suatu kebutuhan dalam konteks Indonesia yang memiliki realitas multietnik, multibudaya, dan multiagama. Atas dasar kenyataan tersebut, maka pengembangan konsep multikultural baik secara sosio-religi, sosio-politik dan sosio-kultural merupakan suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia.

Indonesia, dari segi agama, keyakinan, budaya, dan suku bangsa, adalah salah satu contoh negara yang paling beragam. Bahkan menurut Geertz, sedemikian kompleksnya sehingga rumit untuk menentukan anatominya secara persis. Negeri ini tidak saja multi etnis (Dayak, Kutai, Banjar, Makasar, Bugis, Jawa, Sunda, Batak, Aceh, Minang, Flores, Bali, dan seterusnya), tetapi juga menjadi medan pertarungan berbagai pengaruh multi-mental dan idiologi (India, Cina, Belanda, Portugis, Hinduisme, Budhisme, Konfusianisme, Islam, Kristen, Kapitalisme, Sosialisme, dan seterusnya). Indonesia bukanlah bangunan negara yang tunggal, Keberagaman merupakan keniscayaan Indonesia. Dia terdiri dari beragam suku, agama, ras dan golongan.³⁹

Sehingga, sejatinya Indonesia adalah negara multikultural. Namun keberagaman yang mestinya dirayakan dengan penuh rasa syukur ini, dalam sejarah perjalanan berbangsa, kerap menjadi persoalan. Perjumpaan antara yang berbeda, sering terjadi tidak secara akrab. Saling curiga yang berbuntut pada permusuhan dan konflik sering tak bisa dihindari.

Maka, Indonesia butuh etika bersama dalam memaknai keberagaman tersebut. Sebuah sikap dan pemikiran yang memberi tempat bagi kehadiran "the other" dalam pergaulan publik, perlu dikembangkan. Ini bukan langkah mudah. Sebab, agama-agama atau apapun yang saling berbeda itu akan berhadapan dengan tuntutan

³⁹ Clifford Geertz, *Welt in Stuecken. Kultur und Politik am Ende des 20. Jahrhunderts* (Passagen-Verlag: Wien, 1996) yang dikutip F. Budi Hardiman, *Pengantar Belajar dari Politik Multikulturalisme*, dalam Will Kimlicka, *Kewargaan Multikultural*, hlm. viii.

menjaga "kemurnian" ajaran dan keyakinannya. Meski pada hal mendasarnya, karena tuntutan itulah sehingga sikap eksklusif yang tidak menerima kehadiran "the other" menjadi pilihan dari antara yang berbeda itu. Karena keragaman ini sudah demikian adanya (*sunatullah*), ada sementara orang yang beranggapan bahwa multikulturalisme dengan sendirinya sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan warga negara Indonesia. Dan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* seringkali dijadikan justifikasi pembedarnya. Apalagi di era migrasi dan globalisasi saat ini, yang menjadikan pertemuan (kontak) antar berbagai suku bangsa menjadi semakin mudah.

Belakangan muncul sebuah paradigma yang disebut dengan "multikulturalisme". Sebelumnya, paradigma "pluralisme" telah banyak dibicarakan maupun diusahakan dalam merespon semakin majemuknya dunia. Multikulturalisme memang baru dalam wacana dan diskursus pemikiran. Baru sekitar tahun 1970-an gerakan multikultural ini muncul. Pada masa awalnya ini, gerakan yang memberi apresiasi terhadap keberagaman, muncul di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan menyebar di beberapa negara yang khas dengan pluralitas.⁴⁰ Multikulturalisme sendiri dipahami sebagai sikap yang menerima dan menghargai eksistensi "the others", sebagai bagian dari keberagaman, dengan tidak mempersoalkan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama.

⁴⁰ Lihat Everett M. Rongers, Thomas M. Steinfatt, *Intercultural Communication*, (Illinois: Waveland Press, Inc., 1999).

Tetapi dengan kenyataan yang multikultural tersebut, apakah relasi antar beragam suku-bangsa (juga agama dan keyakinan) di negeri ini sudah mencerminkan semangat multikulturalisme? Dan yang lebih penting lagi, apakah negeri ini sudah dikelola dengan pendekatan yang menjadikan multikulturalisme sebagai pijakan dasarnya atau malah hendak menyeragamkannya? Untuk menjawab ini ada baiknya kita menyamakan persepsi terlebih dahulu atas substansi yang terkandung dalam istilah multikulturalisme itu sendiri. Ini penting mengingat banyaknya konsep dan pemahaman tentang multikulturalisme yang bukan saja berbeda bahkan saling bertentangan. Apalagi praksisnya dilapangan kerap membingungkan.

Khusus dalam ranah pendidikan, beberapa tahun terakhir ini, dalam usaha untuk mengatasi konflik horizontal di Indonesia sudah ada upaya-upaya dari pendidik untuk mengawasi rawan konflik ini melalui suatu gagasan yang dinamai pendidikan yang berwawasan multikultural⁴¹, usaha itu difokuskan pada:

- 1). Membangun saling percaya anggota masyarakat. Pembangunan ini dapat dilakukan atas asumsi bahwa setiap kelompok budaya mempunyai modal sosial (*sosial capital*) yaitu seperangkat nilai atau norma-norma yang dimiliki bersama oleh satu kelompok sosial yang mendorong kerjasama dari anggota kelompok. Modal tersebut dapat dipergunakan membangun saling percaya dalam kelompok

⁴¹H.A.R Tilaar, *Multikulturalisme; Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT Gramedia Widayasa Indonesia, 2004).

yang lebih luas sehingga terbangun sikap rasional yang menyeluruh yang membuat orang tidak mudah curiga, bebas dari prasangka dan stereotype. Agama berperan dalam pembentukan sosial capital ini.⁴²

- 2). Membentuk sikap toleran. Mengembangkan kemampuan batin “aku” untuk dapat hidup bersama dengan “engkau” mempunyai perbedaan pandangan apa yang baik dan apa yang paling bernilai. Dalam sikap ini orang dibolehkan menjadi diri sendiri, tidak untuk dirubah mengikuti ide-ide tertentu. Namun perbedaan nilai itu dapat didialogkan untuk menjelaskan dan mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan tersebut dan saling mengakui bahwa dalam perbedaan-perbedaan itu ada keunikan-keunikan masing-masing.⁴³
- 3). Menjunjung sikap saling menghargai. Berusaha menumbuhkan sikap dan kesadaran bahwa kedamaian dapat terwujud jika ada saling penghargaan antara penganut agama. Dalam sikap saling menghargai ini, seorang harus siap mendengarkan suara dan perspektif agama lain yang berbeda, dan menghormati semua individu dan kelompok keagamaan yang berbeda-beda. Sikap saling menghargai membawa sikap saling berbagi di antara semua individu dan kelompok, dengan jalan ini maka tidak ada suatu kelompok dominan dalam masyarakat baik yang berbentuk agama dan budaya.⁴⁴

⁴²Zakiyuddin Baidhawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 54

⁴³Bandingkan, *Ibid*, hlm. 47.

⁴⁴Bandingkan, *Ibid.*, hlm. 83.

4). Memelihara saling pengertian. Tujuan ini dapat dicapai jika sudah ada kesadaran bahwa nilai-nilai yang dimiliki masing-masing pihak terdapat kesamaan yang dapat dijadikan titik temu dan dapat dipakai untuk saling melengkapi yang memberi kontribusi untuk membangun satu relasi yang dinamis sehingga kebenaran parsial dapat disatukan.⁴⁵

Dari pernyataan di atas dapat dirumuskan beberapa karakteristik dari wawasan dan sikap multikulturalisme: yaitu belajar hidup dalam perbedaan, saling percaya, saling menghargai, saling memahami, berpikir terbuka, interdependensi, resolusi konflik serta negosiasi dan rekonsiliasi nir kekerasan. Dengan demikian multikulturalisme telah menjadi paradigma dalam membangun masyarakat sejahtera, demokratis dan nir kekerasan.

Seperti dinyatakan sebelumnya, latar belakang munculnya konsep multikulturalisme mulai digunakan di Kanada untuk menggambarkan masyarakat Kanada di perkotaan yang multikultural dan multilingual, sangat terkait dengan perjuangan golongan-golongan minoritas untuk mendapatkan pengakuan eksistensinya dan hak-hak mereka yang seharusnya dipenuhi. Dinamika dan promosi konsep multikulturalisme ini mengemuka di Kanada, Australia dan Amerika karena mereka adalah masyarakat imigran dan tidak bisa menutup peluang bagi imigran lain yang untuk masuk dan bergabung di dalamnya.

⁴⁵ Ibid.

Di Amerika berbagai gejolak untuk persamaan hak mulai muncul akhir periode 1950-an, dan puncaknya adalah pada tahun 1960-an dengan dilarangnya perlakuan diskriminasi oleh orang kulit putih terhadap kulit hitam dan berwarna di tempat-tempat umum. Perjuangan hak-hak sipil secara efektif dilakukan melalui berbagai kegiatan *affirmative action*⁴⁶ yang membantu mereka yang terpuruk dan golongan minoritas untuk melakukan berbagai aktivitas untuk dapat sejajar dengan golongan kulit putih yang dominan di berbagai posisi dan jabatan dalam berbagai ranah ekonomi dan politik.⁴⁷

Keragaman merupakan realitas kehidupan yang tidak mungkin ditiadakan. Bahkan keberadaan multikulturalisme sebagai suatu keniscayaan. Dalam konteks keindonesiaan, multikulturalisme sangat nyata terlihat. Hal ini dapat dibuktikan dengan keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan, kemudian ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat serta perbedaan kedaerahan. Istilah multikulturalisme mencakup berbagai bentuk pluralisme budaya yang berbeda, masing-masing memiliki tantangan tersendiri. Ada berbagai cara dimana minoritas menyatu dengan komunitas politik. Perbedaan-perbedaan dalam cara

⁴⁶Penggunaan istilah *affirmative action* berarti memberikan seseorang sesuatu preferensi berdasarkan atas warna kulit atau gender atau kerap kali untuk motivasi politik. Konsep awal dari *affirmative action* adalah bahwa ia tidak sekedar bertindak non diskriminatif secara pasif –misalnya hanya dengan berkata “pekerjaan ini terbuka untuk semua pelamar”– tetapi juga secara *affirmative*, melakukan tindakan nyata menemukan pelamar dari kalangan minoritas. “*affirmative action*” dalam <http://www.Conservamedia.Com: 80/ affirmative- action>.

⁴⁷Lihat Parsudi Suparlan, “Kemajemukan Amerika: Dari Monokulturalisme ke Multikulturalisme”, *Jurnal Studi Amerika*, Vol. 5. Agustus, 1999, hlm. 35-42.

penggabungan itu mempengaruhi sifat dari kelompok minoritas dan bentuk hubungan yang mereka kehendaki dengan masyarakat yang lebih luas.

Kemunculan multikulturalisme tidak terjadi secara serta merta, tetapi lebih merupakan kelanjutan sejarah dari teori dan konsep yang diterapkan sebelumnya dalam menangani pluralitas sosial budaya. Teori pertama adalah *melting pot* yang diwacanakan oleh J. Hector, imigran asal Normandia. Teori ini menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asal sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya baru, budaya Amerika. Meski disebut budaya baru, pada kenyataannya adalah kultur *White Anglo Saxon Protestant* (WASP). Teori itu kemudian menuai kritik dan dipandang tidak *adequate* lagi ketika komposisi etnik dan budaya Amerika semakin majemuk. Horace Kellen lalu mengintroduksir teori baru yang disebut dengan teori *salad bowl* atau teori gado-gado.

Berbeda dari teori *melting pot*, teori *salad bowl* tidak menghilangkan budaya asal, tetapi sebaliknya kultur-kultur lain di luar WASP diakomodir dengan baik dan masing-masing diberi peluang berkontribusi untuk membangun budaya Amerika sebagai entitas budaya nasional. Perkembangan selanjutnya adalah munculnya teori *cultur pluralism*⁴⁸. Teori ini memberi ruang gerak budaya menjadi dua,

⁴⁸Menurut Syahrin Harahap wajah pluralisme dalam masyarakat dapat dibedakan pada lima pemahaman. Pertama, pluralisme moral, ajakan untuk menyebarkan toleransi antar-penganut agama. Kedua, pluralisme religius soteriologis (*Soteriological religious pluralism*), paham bahwa agama lain juga dapat memperoleh keselamatan. Ketiga, pluralisme epistemologis, (*epistemological religious pluralism*).

yaitu ruang publik dan ruang privat. Dalam ruang publik, seluruh etnik berkesempatan mengekspresikan partisipasi sosial politik mereka; sedangkan dalam ruang privat, setiap etnik mengekspresikan budaya etnisitasnya secara leluasa.

Masyarakat modern semakin disadari sebagai sebuah masyarakat multikultural, yakni sebuah masyarakat yang tersusun dari berbagai macam bentuk kehidupan orientasi nilai atau mengacu istilah Geertz sebuah negara dengan banyak ‘bangsa’.⁴⁹ Satu sumber keragaman budaya adalah kehadiran bersama lebih dari satu bangsa di dalam suatu negara di mana bangsa berarti komunitas historis, kurang lebih lengkap secara institutional, menduduki suatu wilayah atau tanah tertentu, mempunyai bahasa dan kebudayaan tersendiri. Suatu bangsa dalam arti sosiologis ini berkaitan erat dengan pengertian suatu ‘masyarakat’ atau ‘kebudayaan’, memang konsep ini sering dipertukarkan. Oleh karena itu, bagi Kymlicka suatu negara yang penduduknya lebih dari satu bangsa, bukanlah negara bangsa, melainkan negara multibangsa dan kebudayaan terkecil membentuk minoritas bangsa.⁵⁰

klaim bahwa penganut agama tertentu memiliki pemberantaran (*justification*) yang lebih mantap atas keimanan mereka dibanding penganut agama yang lain. Keempat, pluralisme religius aletis (*aletic religious pluralism*), kebenaran suatu agama harus ditemukan dalam agama-agama lain dalam derajat yang sama. Kelima, pluralisme deonetic (*deonetic religious pluralism*), pluralisme yang menyangkut perintah Tuhan. Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan*, (Jakarta: Prenada, 2011), hlm. 152.

⁴⁹ Will Kymlicka, *Multikultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Right*, (Oxford: Carendon Press, 1996), hlm. 13.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 15

Saat ini, konsep multikulturalisme telah berkembang luas melintasi batas-batas negara dan menjadi tema penting dalam berbagai diskursus tentang kemajemukan budaya. Tetapi sejauh ini, konsep itu masih dirasakan asing oleh sebagian besar bangsa Indonesia, meskipun realitas sejarah menunjukkan bahwa para *founding fathers* bangsa ini telah menggunakan untuk mendesain kebudayaan bangsa ini.

Karena menekankan pengertiannya pada keanekaragaman dalam kesederajatan, konsep multikulturalisme tidak dapat sekedar diseragamkan dalam kesederajatan, konsep multikulturalisme tidak dapat sekedar disamakan dengan konsep keanekaragaman suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk. Untuk mengulas konsep itu dengan memadai haruslah disertai dengan ulasan tentang berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika moral, dan tingkat serta mutu produktivitas.⁵¹

⁵¹ Menurut Parsudi Suparlan, multikultural bukan sekedar sebuah wacana, tetapi ideologi yang harus diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan berupa bangunan konsep-konsep yang relevan antara lain adalah konsep demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komunitas, dan konsep-konsep lainnya yang semangat dan pengertiannya dipandang sejalan dengannya. Lihat Parsudi Suparlan, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural", <http://www.Scripps.Ohiou.Edu/news/cmdd.artikel-ps.Htm>.

Dalam teori sosial, penggunaan wacana multikulturalisme sebenarnya masih membingungkan. Namun, dari wacana yang berkembang di Indonesia, multikulturalisme rupanya hendak direvitalisasi dan dijadikan paradigma baru dalam merajut kembali hubungan antarmanusia yang belakangan selalu hidup dalam suasana penuh konflikstual. Saat ini muncul kesadaran masif bahwa diperlukan kepekaan terhadap kenyataan kemajemukan, pluralitas bangsa, baik dalam etnis, agama, budaya, hingga orientasi politik.⁵²

Masyarakat Indonesia sebenarnya sejak jauh-jauh hari telah memaknai semangat menerima dan menghargai perbedaan, ketika bangunan negara ini memang berpondasikan keberagaman. Bhineka Tunggal Ika, mestinya dimaknai lebih dari sekedar wacana, sebab inilah konsep multikulturalisme Indonesia yang lahir bersama kelahiran republik ini. Jika semangat multikulturalisme itu diruntuhkan dengan semangat monokulturalisme, maka hancurlah bangunan Indonesia.

Maka sangat tepat jika kita berangkat dari fenomena yang muncul pada masa pasca orde baru. Tumbangnya rezim orde baru dengan doktrin penyeragamannya melahirkan suatu euphoria perbedaan yang mengarah pada pembentukkan paradigma dan aksi-aksi yang irrasional. Pasca orde baru, Indonesia dipimpin oleh presiden yang

⁵² Karena itu, publikasi, film, televisi, dan berbagai media komunikasi lainnya sepatutnya tidak mengekspos hlm-hlm yang bersifat anti, menghina atau melecehkan budaya lain atau ajaran suatu agama. Sikap respek terhadap budaya dan agama-agama harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di berbagai jenjang baik di lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta. <http://id.shvoong.com/humanities/1925066-agama-dalam-masyarakat- multikultural-indonesia/#ixzz2JG1wA6zA>.

cukup memiliki pemahaman akan keragaman. 32 tahun selama masa orde baru masyarakat Indonesia seakan dibuai dengan kebijakkan ineksistensi pluralisme.⁵³

Sehingga pada masa reformasi *euphoria* masyarakat terhadap keterlepasan kungkungan rezim orde baru membawa masalah baru yang lebih serius yang disinyalir mampu menimbulkan konflik-konflik antar etnik, agama, maupun golongan. Ini harusnya menjadi perhatian serius bagi para pemimpin bangsa, bahwa ineksistensi pluralism dan multikulturalisme terlanjur mapan dan mengakar secara radikal. Sehingga apapun segala bentuk perubahan yang coba diusahakan akan selalu berhadapan dengan tembok yang tinggi dan kokoh yang tidak mudah untuk dirobokan begitu saja.

⁵³ Adapun tuntutan akan pengakuan atas eksistensi dan otonomi keragaman budaya-budaya lokal, yang merupakan salah satu buah dari era reformasi, merupakan kritik terhadap konsep dan strategi pembangunan kebudayaan pada masa lalu –baik pada masa rezim Orde Lama Sukarno maupun Orde Baru Suharto yang disebut sejarawan Taufik Abdullah sebagai periode ‘negara serakah’ (*greedy state*) yang cenderung monolitik dan serba pusat. Tidak hanya itu, pembangunan budaya nasional pada era Orde Baru dipandang oleh banyak pihak lebih merupakan pembangunan dominasi budaya Jawa, atau Jawanisasi, atas budaya suku-suku bangsa yang lain. Penggunaan istilah-istilah sansekerta secara berlebihan dalam berbagai nomenklatur politik maupun penyebutan nama-nama tempat dan bangunan, serta nama-nama penghargaan, menjadi indikasi transparan upaya ‘Jawanisasi’, atau paling tidak kebijakan ‘Jawa-sentrism’ pemerintah Orde Baru. Selanjutnya, Taufik Abdullah menjelaskan ‘negara serakah’ sebagai “negara yang tidak puas hanya dengan legitimasi dan dominasi politik, dan penguasaan sistem ekonomi dengan segala embel-embelnya yang berkaitan dengan kedua hlm yang strategis itu. ‘negara serakah’ menjadikan dirinya sebagai pemegang hegemoni wacana dan makna, penentu corak paradigma kultural dan ingatan kolektif bangsa”. Taufik Abdullah, “Integrasi Nasional, Globalisasi dan Kearifan Lokal”, *Antropologi Indonesia*, Thlm. XXVI, No. 65, hlm. 132.

Relevansi Multikulturalisme dan Pluralisme bagi Indonesia tercermin dari perbedaan-perbedaan yang selalu terjadi akibat adanya pluralitas budaya, etnis, sistem nilai dan agama harus disikapi dengan suatu dialog untuk menemukan konsensus bersama, bukan dengan kekerasan dan penghancuran satu dengan yang lainnya. Maka, dalam konteks ini multikulturalisme cukup relevan untuk diterapkan dalam suatu masyarakat majemuk (plural) seperti Indonesia.⁵⁴

Multikulturalisme yang menonjolkan kesetaraan, solidarisme, keterbukaan serta dialog mampu menjadi titik temu di antara berbagai perbedaan yang ada dalam rangka hidup bersama dengan semangat kebersamaan. Dalam hal ini lembaga-lembaga pendidikan dan budaya, baik pemerintah maupun LSM dapat menjadi model untuk menumbuhkan kesadaran multikultural di kalangan masyarakat. Dengan langkah tersebut maka dapat ditumbuhkan dialog budaya multikultural untuk saling memahami antar budaya serta ditumbuhkan kepercayaan terhadap budaya sendiri (identitas diri). Sehingga akan membuka lebar

⁵⁴ Relevansi dan komitmen multikulturalisme dalam Undang-Undang Indonesia tercermin dalam penjelasan: a) Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi "Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah". b) Pasal 18 B ayat 2 yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". c) Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Dalam keanekaragaman dan kejamakan bangsa Indonesia, negara melalui Undang-Undang telah menjamin hak-hak yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia. Muhammad Ali. *Menuju Multikulturalisme Global*. Dalam Kompas, 3 Januari 2004.

pintu-pintu persaudaraan kemanusiaan dan persaudaraan kebangsaan untuk siapa pun.

C. Dialektika Islam Dengan Keragaman Budaya Lokal

Islam, bagi umat muslim, dipercaya sebagai agama yang sempurna dan menyempurnakan (kitab suci-kitab suci dan ajaran-ajaran sebelumnya). Sebagai agama yang muncul pada kurun abad ke-7, Islam dianggap berhasil *survive* dan eksis hingga millenium ketiga saat ini. Ada satu doktrin yang dipegang oleh umat Islam, yakni *al-Islam salih fi kulli zaman wa makan* (Islam senantiasa sesuai [menyesuaikan?] dengan ruang dan waktu). Doktrin ini, apabila ditelaah secara kritis, memiliki dua sisi yang saling bertentangan:

Pertama, doktrin ini mendorong penyebaran ajaran agama Islam di seluruh belahan dunia dan, karenanya, bersinergi dengan kebudayaan di setiap wilayah yang disinggahinya.⁵⁵ *Kedua*, gerakan Islamisasi pada poin pertama dapat menjadi kesulitan ketika interaksi Islam dengan budaya lokal dapat mereduksi kemurnian ajaran, bahkan mengancam eksistensi agama Islam itu sendiri.

Dikotomi tersebut di atas, dapat dinyatakan, telah terpolarisasi dalam pemikiran para pemimpin dan sarjana muslim pada masa awal kedatangan Islam hingga saat ini. Pada masa kenabian, perdebatan teks-konteks, normatif-historis, *das sain-das solen*, ritual-spiritual, dll dapat diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun ketika beliau wafat,

⁵⁵ Contoh sederhana yang dapat diambil adalah metode dakwah dan islamisasi yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga seperti *jimat kalimasada* (kalimat shahadatain), penggunaan istilah *gapura* (dari bahasa Arab, *ghafura*) untuk pintu gerbang candi yang diubah menjadi masjid, dst.

dan tentunya, tidak ada lagi pemegang tunggal otoritas keagamaan, umat begitu sering berdebat dan mudah terprovokasi untuk “mengkafirkan” pihak lain. Lebih buruk lagi, ketika perdebatan teologi dibumbui dengan pertarungan politik antar kelompok, atau sebaliknya. Sejarah kelam peristiwa *tahkim*, lahirnya kelompok garis keras *khawarij* hingga terbunuhnya ‘Ali ibn Abi Talib r.a. atau peristiwa *mihnah* yang digerakkan oleh kelompok rasionalis Mu’tazilah yang didukung pemerintahan Abbasiyah terhadap kelompok muslim sunni adalah bukti nyata dari perdebatan teologis-politis yang berakhir pada permusuhan dan bahkan pembunuhan.

Dalam rumpun agama-agama Ibrahim (*Abrahamic Faith*), ada perbedaan mendasar antara teologi Kristen dan Yahudi-Islam. Bagi Kristen, pertanyaan yang tepat adalah “Apa yang orang Kristen percaya?” Sebaliknya bagi Islam (juga bagi Yahudi), pertanyaan yang benar adalah “Apa yang orang Islam *perbuat?*” Bagi Kristen, teologi berdiri di atas dan berada pada posisi tertinggi dari seluruh bangunan keagamaannya. Berbeda dengan Islam, sebagaimana dalam Yahudi, hukum memperoleh tempat terhormat, karena “menerima dan mematuhi hukum Tuhan adalah *Islam*, yang artinya berserah diri kepada hukum Tuhan.”⁵⁶

Teologi Islam, berbeda dengan teologi Kristen, tidak berkembang secara sistematis, tidak pula sebagai produk refleksi atau

⁵⁶ John L. Esposito, *Islam Warna-warni; Ragam Ekspresi menuju "Jalan Lurus"* (*al-Sirat al-Mustaqim*), terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2004), hlm. 86.

spekulasi teologis. Teologi (*kalam*, firman atau wacana) muncul sebagai reaksi atas perdebatan atau isu khusus yang tumbuh dalam konteks sosio-politik Islam awal. Misalnya, keluarnya beberapa orang dari kelompok ‘Ali ibn Abi Talib r.a. yang kemudian menamai diri mereka Khawarij, polemik-polemik Muslim-Kristiani awal, dan masuknya pemikiran Yunani pada zaman Abasiyah. Hubungan antara iman dan perbuatan adalah isu utama teologi yang pertama kali yang dihadapi komunitas awal. Isu ini mencakup persoalan tentang dosa besar dan dampaknya bagi keanggotaan dalam umat (apakah seorang muslim yang bersalah karena dosa besar masih menjadi seorang muslim?) dan legitimasi penguasa-umat atau khalifah.⁵⁷

Perkembangan diskursus teologis juga berimplikasi pada penerapan hukum (*shari’ah*) Islam. Ketika kekuasaan Dinasti Umayyah semakin luas, sistem hukum Islam mulai diformalkan dalam hukum kerajaan. Bagian dari struktur administratif baru yang dibentuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh khalifah sebagai wakilnya untuk gubernur-gubernur provinsi. Ia bertugas menyaksikan bahwa keputusan-keputusan pemerintah dilaksanakan dan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa.

Dalam mengambil keputusan, para hakim bersandar kepada hukum-hukum adat Arab yang berlaku di provinsi tertentu dan

⁵⁷ Kelompok-kelompok teologis muncul sebagai bentuk respon atas perdebatan ini, seperti Khawarij, Murjiah, Mu’tazilah, Ash’ariyah, Maturidiyah, dsb. Dan dari sekian banyak kelompok teologi, Ash’ariyah adalah kelompok yang mempunyai pengikut yang besar, termasuk para pengikut Mazhab fiqh al-Shafi’i. *Ibid*, hlm. 87-92.

berdasarkan al-Qur'an maupun keputusan pribadi (*ra'yu*) mereka. Kode hukum yang bersifat elementer pun berkembang, terdiri atas keputusan-keputusan administratif dan yudisial. *Walhasil*, sebuah bangunan hukum yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, disebabkan oleh perbedaan kultural provinsi-provinsi kerajaan dan oleh keputusan independen yang diambil para hakim.⁵⁸

Fenomena ini memicu kekecewaan dari masyarakat dan khususnya para pakar hukum agama. Para kritikus Umayah menuduh bahwa hukum adat yang berbeda-beda, disertai dengan keputusan-keputusan khalifah dan keputusan pribadi para hakim, telah menghasilkan suatu bangunan hukum yang membingungkan dan seringkali saling bertentangan. "Apakah kehendak Tuhan ditangkap lewat suatu proses yang subjektif; dapatkah hukum-Nya bagi kaum muslim di Madinah berbeda sedemikian rupa dengan hukum-Nya di Kufah?" Mereka berpendapat bahwa jika semua kaum Muslim terikat kepada dan harus mematuhi hukum tuhan, maka hukum Islam harus didefinisikan dengan jelas dan lebih seragam. Sejak abad kedelapan, orang-orang ini, ingin membatasi otonomi para penguasa Muslim dan untuk menstandarkan hukum, dapat ditemukan di kota-kota utama: Madinah, Damaskus, Basrah, Kufah dan Baghdad.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 95.

⁵⁹ Pada saat itu, para ulama fiqh agung yang awal seperti Abu Hanifah (w. 767), Malik ibn Anas (w. 796), Muhammad ibn Idris al-Shafi'i (w. 819), dan Ahmad ibn Hanbal (w. 855), yang kelak dikenal sebagai para pendiri, secara berurutan, Madhab Hanafi, Madhab Maliki, Madhab Shafi'i, Madhab Hanbali, menarik banyak pengikut. Secara sistematis, mereka meninjau ulang hukum dan adat Umayah dalam koridor al-Qur'an dengan keyakinan bahwa Islam telah menawarkan suatu

Perkembangan-perkembangan utama hukum dan jurisprudensi Islam terjadi pada zaman kekhilafahan Abbasiyah. Setelah menjustifikasi revolusi mereka atas nama Islam, para khalifah Abasiyah menjadi patron utama pendidikan Islam. Kajian al-Qur'an, sunnah Nabi, dan hukum maju pesat di tangan sebuah kelas sosial baru, ulama, yang berusaha menemukan, menafsirkan, dan menerapkan kehendak Tuhan dalam situasi-situasi kehidupan.

Para *fuqaha* menafsirkan dan merumuskan hukum Islam, sementara para hakim terbatas hanya menerapkan hukum konsensus para *fuqaha* selama periode ini telah menghasilkan formulasi hukum yang mengikat yang harus mengatur kehidupan Muslim sepanjang sejarah. Meski demikian, kaum Muslim menyadari bahwa di samping usaha-usaha terbaik mereka untuk menyeragamkan hukum, perbedaan-perbedaan signifikan dalam doktrin hukum mereka terus ada, disebabkan oleh sejumlah mazhab fiqh, perbedaan lingkungan budaya, dan perbedaan teknik atau kriteria hukum yang digunakan para *fuqaha* (pendapat pribadi, hadith, keadilan, kemaslahatan umum).⁶⁰

Adanya kemungkinan akultiasi timbal-balik antara Islam dengan budaya lokal (*local genius*) dalam hukum Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang memungkinkan diakomodir eksistensinya. Hal ini dapat kita lihat dalam kaidah fiqh yang menyatakan “*al-'adah muhakkamah*” (adat itu bisa dijadikan hukum),

pandangan hidup yang lengkap, dan berupaya menerapkan Islam dalam semua aspek kehidupan. Upaya-upaya yang agak terorganisasi ini adalah awal mula pusat-pusat hukum atau mazhab awal. *Ibid.*, hlm. 95-96.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 96-97.

atau kaidah “*al-‘adah shariatun muhkamah*” (adat adalah syariat yang dapat dijadikan hukum).⁶¹ Kaidah ini memberikan justifikasi yuridis bahwa kebiasaan suatu masyarakat bisa dimungkinkan untuk dijadikan dasar penetapan hukum ataupun sumber acuan untuk bersikap.

Hanya saja tidak semua adat/ tradisi bisa dijadikan pedoman hukum karena tidak semua unsur budaya pasti sesuai dengan ajaran Islam. Unsur budaya lokal yang tidak sesuai diganti atau disesuaikan sebagaimana misi Islam sebagai pembebas manusia dengan semangat *tawhid*. Dengan semangat tawhid ini manusia dapat melepaskan diri dari belenggu tahayul, mitologi dan feudalisme, menuju pada peng-esa-an Allah sebagai sang Pencipta. Pesan moral yang terkandung dalam kaidah fiqh di atas adalah perlunya bersikap kritis terhadap sebuah tradisi, dan tidak asal mengadopsi. Sikap kritis inilah yang justru menjadi pemicu terjadinya transformasi sosial masyarakat yang mengalami persinggungan dengan Islam.

Dengan demikian kedatangan Islam selalu mendatangkan perubahan masyarakat atau pengalihan bentuk (transformasi) sosial menuju ke arah yang lebih baik. Sunan Kalijaga misalnya dalam melakukan Islamisasi tanah Jawa, dia menggunakan pendekatan budaya, yaitu melalui seni pewayangan untuk menentang feudalisme kerajaan Majapahit. Melalui seni pewayangan ia berusaha menggunakan

unsur-unsur lokal sebagai media dakwahnya dengan mengadakan perubahan-perubahan lakon juga bentuk fisik dari alat-alatnya.⁶²

Ekspresi-ekspresi ritual dalam praktek sekarang ini juga tampak ada nuansa yang dapat dilihat, yaitu perpaduan antara unsur-unsur Islam dengan budaya lokal. Contoh paling menonjol dan sampai sekarang masih menjadi polemik umat Islam adalah upacara peringatan untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, yaitu pada hari ke-3, 7, 40, 100 dan 1000 dari kematianya. Acara ritual ini dalam tradisi sekarang disebut *selamatan* atau *tahlil*, yaitu membaca *kalimah tayyibah*, *La ilaha illa-Llah*, secara bersama-sama sebagai cara yang efektif untuk menanamkan jiwa tawhid.

Di samping penciptaan ritus-ritus keagamaan, akulturasi Islam juga dibuat dalam bentuk simbol-simbol kebudayaan, contoh dari simbol ini adalah restrukturisasi candi atau pura menjadi masjid dan penamaan pintu gerbang dengan istilah ‘*gapura*’, nama yang diambil dari bahasa Arab *ghafura* yang berarti pengampunan. Di samping itu, Sunan Kalijaga juga menciptakan *jimat kalimasada* (dua kalimat syahadat) yang dijadikan pusaka kerajaan. Istilah *jimat* merupakan pemikiran pujangga Jawa dalam memberikan legalitas syahadat pada *pewayangan* yang jelas-jelas menjadi inti dari budaya keraton.

Proses dialektika Islam dengan budaya lokal yang menghasilkan produk budaya sintetis merupakan suatu keniscayaan sejarah sebagai hasil dialog Islam dengan sistem budaya lokal. Lahirnya

⁶² Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Bandung, Penerbit Mizan, 1992) 550.

berbagai ekspresi-ekspresi ritual yang nilai instrumentalnya produk budaya lokal, sedangkan muatan materialnya bernuansa religius Islam adalah sesuatu yang wajar dan sah adanya dengan syarat akulterasi tersebut tidak menghilangkan nilai fundamental dari ajaran agama.

Sikap akomodatif bagi umat Islam Indonesia merupakan keniscayaan sejarah sebagai akumulasi dari dialog dan sapaan antarbudaya yang dibawa oleh para pedagang muslim yang memiliki karakteristik hidup yang lebih dinamis dibandingkan dengan masyarakat agraris atau petani. Dinamika kehidupan para pedagang dari berbagai daerah (Arab, India, dan Persia) ini membuka keragaman budaya Islam-Jawa yang kemudian terbangun kuat lewat interaksi perdagangan, perkawinan, dan pewarisan kekuasaan politik (Majapahit) di Jawa.

Sikap akomodatif ini diperkuat lagi dengan tradisi pesantren yang mendukung akulterasi agama dan budaya. Penerimaan ulama ini menunjukkan sikap akomodatif ulama yang kemudian mereka teruskan dengan dialog-dialog kehidupan yang rutin dengan komunitas atau warga setempat. Sikap akomodatif ini pula yang telah mengantarkan umat Islam sebagai komunitas terbesar di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai komunitas muslim terbesar di dunia. Tanpa sikap akomodatif seperti ini, gesekan dan benturan dalam interaksi sosial di Indonesia akan terasa begitu kuat.

Sikap kontradiktif terhadap budaya lokal akan bertentangan dengan watak geografis, iklim dan kesejukan atmosfir Indonesia yang lebih memberikan peluang dan potensi besar terhadap terbentuknya sikap yang akomodatif. Islam Indonesia akan tetap berkembang selama

masih membawa kesejukan bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pembacaan terhadap teks kitab suci yang skriptualis-literalis dan sikap radikal dalam ber-*Islam* akan membawa kemunduran dalam memperjuangkan nilai Islam. Islam *rahmatan li al-'alamin* selalu membawa kedamaian. Masyarakat Indonesia akan menjauh jika terjadi kekerasan dan disharmoni. Dengan demikian sikap akomodatif dalam arti yang positif menjadi pra-syarat untuk memajukan Islam Indonesia.

Untuk strategi pengembangan Islam di Indonesia, diperlukan visi dan wawasan keagamaan yang universal, kosmopolit, inklusif dan kultural. Karena budaya menyentuh seluruh aspek dan dimensi cara pandang, sikap hidup serta aktualisasinya dalam kehidupan manusia. Selain itu, gerakan kultural lebih integratif. Kita patut mencontoh metodologi Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Sunan Kalijaga begitu melihat proses keruntuhan feudalisme Majapahit, ia mendorong percepatan proses transformasi itu, justeru dengan menggunakan unsur-unsur lokal guna menopang efektifitas segi teknis dan operasionalnya. Salah satu yang ia gunakan adalah wayang.

Ketika seorang pakar menyentak kesadaran kita dengan isu mengganti "Assalamu'alaikum" dengan ucapan "Selamat Pagi" sebagai dalih sampel dari gagasan pribumisasi Islam, kita pun bertanya; "Apa tujuan di balik pernyataan itu?" Sikap pro dan kontra pun bermunculan. Kemudian pertanyaan tadi bisa dilanjutkan; apakah ada ketegangan antara agama yang cenderung permanen dengan budaya yang dinamis? Bagaimana hubungan ajaran agama yang universal dengan setting budaya lokal yang melingkupinya? Lalu, bagaimana sikap salaf dalam

mengakomodasi tradisi dan nilai-nilai Islam. Kemudian apakah syara' menjustifikasi hal itu? bab ini mencoba membahas persoalan tersebut.

Universalisme (*al-'Alamiyah*) Islam adalah salah satu karakteristik Islam yang agung. Islam sebagai agama yang besar berkarakteristikkan: (1) *Rabbaniyyah*, (2) *Insaniyyah* (humanistik), (3) *Syumul* (totalitas) yang mencakup unsur keabadian, universalisme dan menyentuh semua aspek manusia (ruh, akal, hati dan badan), (4) *Wasathiyah* (moderat dan seimbang), (5) *Waqi'iyyah* (realitas), (6) Jelas dan gamblang, (7) Integrasi antara *al-Tsabat wa al-Murunah* (permanen dan elastis).⁶³

Universalisme Islam yang dimaksud adalah bahwa risalah Islam ditujukan untuk semua umat, segenap ras dan bangsa serta untuk semua lapisan masyarakat. Ia bukan risalah untuk bangsa tertentu yang beranggapan bahwa dia-lah bangsa yang terpilih, dan karenanya semua manusia harus tunduk kepadanya. Risalah Islam adalah hidayah Allah untuk segenap manusia dan rahmat-Nya untuk semua hamba-Nya. Manifesto ini termaktub abadi dalam firman-Nya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tidak Kami utus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmah bagi seluruh alam". (Q.S., Al-Anbiya/21: 107).⁶⁴

hlm. 3

⁶³ Yusuf Qardhawi, *Al-kashaish al-'aamiyah al-Islam*, (Beirut cet. VIII,1993)

⁶⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Qur'an, 1992), hlm. 508.

بَارَكَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

“Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Qur'an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.” (Q.S., Al-Furqan/25: 1)⁶⁵

Ayat-ayat di atas yang nota bene Makkiyah, secara implisit membantah tuduhan sebagian orientalis yang menyatakan bahwa Muhammad Saw tidak memproklamirkan pengutusan dirinya untuk seluruh umat manusia pada awal kerisalahannya, akan tetapi setelah mendapat kemenangan atas bangsa Arab.⁶⁶

Universalisme Islam menampakkan diri dalam berbagai manifestasi penting, dan yang terbaik adalah dalam ajaran-ajarannya.⁶⁷ Ajaran-ajaran Islam yang mencakup aspek akidah, syari'ah dan akhlak (yang sering kali disempitkan oleh sebagian masyarakat menjadi hanya kesusilaan dan sikap hidup), menampakkan perhatiannya yang sangat besar terhadap persoalan utama kemanusiaan. Hal ini dapat dilihat dari enam tujuan umum syari'ah yaitu; menjamin keselamatan agama, badan, akal, keturunan, harta dan kehormatan. Selain itu risalah Islam juga menampilkan nilai-nilai kemasyarakatan (*sosial values*) yang luhur, yang bisa dikatakan sebagai tujuan dasar syari'ah yaitu; keadilan,

⁶⁵ Ibid., hlm. 559.

⁶⁶ Qardhawi, *Al-kashaish al-'Amiyah al-Islam*, hlm. 107-108.

⁶⁷ Lihat, Abdurrahman Wahid “Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam” dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Editor: Budhy Munawwar Rahman. (Jakarta: Yayasan Paramadina, cet. I, Mei 1994) hlm. 515.

ukhuwwah, takaful, kebebasan dan kehormatan.⁶⁸ Semua ini akhirnya bermuara pada keadilan sosial dalam arti sebenarnya, dan seperti diketahui, bahwa pandangan hidup (*world view, weltanschaung*) yang paling jelas adalah pandangan keadilan sosial.⁶⁹

Dalam perspektif Islam, keadilan sosial merupakan pertumbuhan dan perkembangan seluruh manusia secara berkelanjutan yang tidak memihak dan tidak ada pihak lain yang diuntungkan. Keadilan memerlukan dua kriteria umum, yakni kesadaran dan ketulusan. Dalam hal kesadaran, manusia harus mampu mengingat, sejauh dan dengan cara apa pun, bahwa tujuan hidupnya adalah untuk mencapai keadilan sosial. Dalam hal ketulusan, manusia harus mampu melaksanakan tujuan hidupnya dengan tulus, tanpa membawa maksud atau tujuan tersendiri. Dalam hal kesadaran, manusia diminta untuk bersikap terbuka, tidak menutup diri, dan tidak menghindari bertemu dengan orang lain. Dalam hal ketulusan, manusia diminta untuk bersikap jujur, tidak menutup diri, dan tidak menghindari bertemu dengan orang lain. Dalam hal kesadaran, manusia diminta untuk bersikap terbuka, tidak menutup diri, dan tidak menghindari bertemu dengan orang lain. Dalam hal ketulusan, manusia diminta untuk bersikap jujur, tidak menutup diri, dan tidak menghindari bertemu dengan orang lain. Dalam hal kesadaran, manusia diminta untuk bersikap terbuka, tidak menutup diri, dan tidak menghindari bertemu dengan orang lain. Dalam hal ketulusan, manusia diminta untuk bersikap jujur, tidak menutup diri, dan tidak menghindari bertemu dengan orang lain.

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *Madkhal li al-Dirasat al-Islamiyah*, (Beirut, cet. I, 1993) hlm. 61

⁶⁹ Abdurrahman Wahid, *Pribumisasi Islam dalam Islam Indonesia, Menatap Masa Depan* (Jakarta: P3M, cet. I, 1989) hlm. 442

BAB IV

WAWASAN MULTIKULTURALISME DAN UPAYA STRATEGIS PENGUATANNYA

A. Wawasan Mahasiswa Tentang Agama dan Multikulturalisme

Dalam masyarakat plural, seperti Indonesia, perbincangan mengenai relasi antara agama, demokrasi, dan multikulturalisme merupakan tema yang selalu menarik dan tak ada habis-habisnya untuk didiskusikan. Cita-cita mewujudkan demokrasi hampir selalu menyinggung agama dan keragaman budaya, karena demokrasi tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa menempatkan agama secara benar dan memberikan apresiasi terhadap keragaman budaya. Jika tidak dikelola dengan baik, bukan mustahil persinggungan agama-agama akan mendatangkan masalah bagi stabilitas demokrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, kita kerap dihadapkan pada kenyataan banyaknya konflik dan ketegangan yang dipicu oleh sentimen keagamaan. Demikian juga keragaman kultural belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya. Alih-alih sebagai kekuatan pendorong dinamika kehidupan berbangsa, keragaman kultural justru menambah panjang daftar perkecokan di kalangan masyarakat akar rumput. Dalam konteks demikian, mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama menempati arus utama dalam proses pengelolaan agama, multikulturalisme dan kearifan budaya lokal tersebut. Selanjutnya dalam sub ini akan dideskripsikan sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang isu dan term multikulturalisme berbasis kearifan budaya lokal dalam kehidupan beragama dan berkebangsaan.

Sebagaimana informasi yang diperoleh dari hasil observasi,⁷⁰ mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama, cukup memahami pengertian dan makna multikulturalisme, tetapi dalam penggunaan istilah tersebut mahasiswa kerap menggunakan tiga istilah secara bergantian untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri dari agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda, yakni pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multikultural (*multikultural*). Meskipun ketiga ekspresi itu sesungguhnya tidak merepresentasikan hal yang sama, walaupun semuanya mengacu kepada adanya 'ketidaktunggalan'.

Pluralisme adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok (koeksistensi) serta membawa hasil tanpa konflik asimilasi. Sebenarnya berbicara tentang konsep pluralisme, sama halnya membicarakan tentang sebuah konsep 'kemajemukan atau keberagaman', di mana jika kita kembali pada arti pluralisme itu sendiri bahwa pluralisme itu merupakan suatu "kondisi masyarakat yang majemuk".

Kemajemukan di sini dapat berarti kemajemukan dalam beragama, sosial dan budaya. Namun yang sering menjadi isu terhangat berada pada kemajemukan beragama. Pada prinsipnya, konsep pluralisme ini timbul setelah adanya konsep toleransi. Jadi ketika setiap individu mengaplikasikan konsep toleransi terhadap individu lainnya maka lahirlah pluralisme itu. Dalam konsep *pluralisme*-lah bangsa

⁷⁰Pengamatan dilakukan pada saat mahasiswa sedang mengadakan diskusi di kelas dengan subjek multikulturalisme, pada mata-kuliah "Pluralisme dan Multikulturalisme". Pengamatan dilakukan di kelas secara berkelanjutan dari Maret - Juni 2013.

Indonesia yang beraneka ragam ini mulai dari suku, agama, ras, dan golongan dapat menjadi bangsa yang satu dan utuh.

Pluralisme sering diartikan sebagai paham yang mentoleransi adanya ragam pemikiran, agama, kebudayaan, peradaban dan lain-lain. Kemunculan ide pluralisme didasarkan pada sebuah keinginan untuk melenyapkan ‘klaim keberanan’ (*truth claim*) yang dianggap menjadi pemicu munculnya sikap ekstrem, radikal, perang atas nama agama, konflik horizontal, serta penindasan atas nama agama. Menurut kaum pluralis, konflik dan kekerasan dengan mengatasnamakan agama baru sirna jika masing-masing agama tidak lagi menganggap agamanya yang paling benar.

Konsep pluralitas mengandaikan adanya ‘hal-hal yang lebih dari satu’ (*many*); keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang ‘lebih dari satu’ itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat disamakan. Pada abad ke-20, kemajemukan menjadi syarat demokrasi. Serba tunggal, misalnya, satu ideologi, satu partai politik, satu calon pemimpin, dianggap sebagai bentuk pemaksaan dari negara. Dibandingkan dua konsep terdahulu, multikulturalisme sebenarnya relatif baru. Secara konseptual terdapat perbedaan signifikan antara pluralitas, keragaman, dan multikultural. Inti dari multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama.

Apabila pluralitas sekadar merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), multikulturalisme memberikan

penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Multikulturalisme menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup; sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh negara.

Di sinilah konsep multikulturalisme memberikan kontribusi nyata terhadap agenda demokratisasi dan nondiskriminasi. Perhatian yang besar terhadap equalitas (persamaan) dan nondiskriminasi kaum minoritas telah menghubungkan multikulturalisme dengan demokrasi. Bukankah sisi terpenting dari nilai demokrasi adalah keharusan memperlakukan berbagai kelompok atau individu yang berbeda tanpa diskriminasi!

Secara historis, demokratisasi terjadi melalui perjuangan berbagai unsur masyarakat melawan sumber-sumber diskriminasi sosial. Manusia dilahirkan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama. Tidak ada diskriminasi yang didasarkan pada kelas, jender, ras, atau minoritas agama dalam domain publik. Sebaliknya, setiap individu harus diperlakukan sebagai warga dengan hak-hak dan kewenangan yang sama.

Dengan demikian, toleransi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari politik pengakuan. Ini bukan menyalahkan agama, tapi bagaimana kita dengan arif menanggapi perbedaan dengan cara non kekerasan. Sebagai alternatif atas penolakan terhadap diskriminasi, multikulturalisme memberikan nilai positif terhadap

keragaman kultural. Konsekuensi lebih lanjut adalah kesediaan untuk memberikan apresiasi konstruktif terhadap segala bentuk tradisi budaya, termasuk agama. Persoalannya, jika berbagai kultur yang beragam justru memperkaya kehidupan sosial, apakah agama juga menganggap keragaman tradisi kultural memperkaya pemahaman keagamaan?

Sampai batas tertentu, mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama memang masih ambigu dalam memahami respons agama terhadap kecenderungan multikulturalisme. Hal itu disebabkan, mahasiswa melihat di satu sisi agama kerap dipahami sebagai wilayah sakral, metafisik, abadi, samawi, dan mutlak. Bahkan, pada saat agama terlibat dengan urusan 'duniawi' sekalipun, hal ini tetap demi penunaian kewajiban untuk kepentingan 'samawi.' Berbagai agama, tentu saja, berbeda-beda dalam perkara cara dan berbagai aspek, namun agama-agama tersebut hampir seluruhnya memiliki sifat-sifat demikian itu. Karena sakral dan mutlak, maka sulit bagi agama-agama tersebut untuk mentoleransi atau hidup berdampingan dengan tradisi kultural yang dianggap bersifat duniawi dan relativistik. Oleh karena itu, persentuhan agama dan budaya lebih banyak memunculkan persoalan daripada manfaat. Apalagi, misalnya dalam konteks Islam, kemudian dikembangkan konsep bid'ah yang sama sekali tidak memberikan ruang akomodasi bagi penyerapan budaya non-agama.⁷¹

Informasi selanjutnya yang digali dari pemahaman mahasiswa adalah, dapatkah Islam mengembangkan multikulturalisme, sementara pada saat yang sama kurang mengembangkan apresiasi terhadap

⁷¹ *Ibid.*

budaya, termasuk yang berperspektif lokal? Mahasiswa masih sulit menjawabnya secara afirmatif, jika gagasan multikulturalisme itu masih dianggap asing dalam mind-set Islam. Sebenarnya, cita-cita agung multikulturalisme tidak bertentangan dengan agama; namun demikian basis teoretisnya tetap problematik.⁷²

Nilai-nilai multikulturalisme dianggap ekstra-religius yang ditolak oleh para teolog Muslim, sehingga sulit untuk mengeksplorasi tema tersebut. Memang belakangan telah muncul prakarsa yang dilakukan sejumlah pemikir Arab, seperti Mohammed Abed al-Jabiri, Hassan Hanafi, Nasr Hamid Abu-Zaid, dan lain-lain, untuk merekonsiliasi antara tradisi dan agama. Namun, gagasan-gagasan mereka mendapat tanggapan keras dari ulama-ulama konservatif.

Di sisi lain, mahasiswa memahami, bahwa setiap agama, demikian juga Islam, hadir untuk manusia. Dan ketika manusia hadir, ia menapaki realitas hidupnya senantiasa dihadapkan pada dan oleh tradisi yang berkembang disekitarnya. Tradisi itulah yang memberi makna, warna, norma dan adat istiadat sehingga manusia bisa bertahan dalam sebuah komunitas dengan etika dan estetika yang dimiliki. Dengan demikian secara objektif harus dikatakan tidak ada satu agama pun yang tidak menggunakan perangkat simbolik dan kultural ketika hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Agama juga bukan seperangkat juklak yang siap pakai dalam segala waktu dan zaman. Sebaliknya, agama adalah sesuatu yang terus ditafsir dan dikembangkan.⁷³

⁷²Ibid

⁷³Ibid

Islam misalnya, adalah “agama yang hidup” yang berlayar menyeberang meninggalkan tempat, tradisi asalnya, dan waktu lampau, juga meninggalkan sang pembawa (Nabi). Berlayarnya Islam akhirnya menemukan tempat, tradisi lain, dan waktu yang berbeda dengan tradisi di mana ia hadir untuk pertama kalinya. Dengan demikian, klaim Islam murni tampaknya juga tidak memiliki legitimasi historis dan kultural yang kuat. Secara historis Islam bukan hanya merevisi ajaran-ajaran sebelumnya, tetapi lebih dari itu juga mempertahankan sebagian tradisi yang telah berkembang sebelumnya. Ia tidak bedanya dengan manusia, yang juga lahir dari lingkungan adat dan kulturalnya masing-masing.

Kebudayaan setempat dimana seseorang itu lahir dan dibesarkan berpengaruh terhadap inkulturas dan akulterasi keberagamaan seseorang. Oleh karenanya, secara jujur sulit diterima pernyataan yang menyatakan bahwa seseorang bisa beragama secara murni tanpa dibentuk oleh lingkungan kulturalnya.⁷⁴ Sebaliknya apa yang dihayati oleh pemeluk suatu agama tidak lain adalah akumulasi tradisi keberagaman.⁷⁵

⁷⁴Dalam konteks inilah, Moeslim Abdurrahman mengungkapkan apa yang disebut sebagai “ber-Islam” secara kultural. Lihat Moeslim Abdurrahman, *Islam sebagai Kritik Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 149.

⁷⁵Dengan kenyataan inilah agama kemudian menjadi identik dengan tradisi itu sendiri. Agama adalah ekspresi budaya tentang keyakinan orang terhadap sesuatu Yang Suci, Yang Transenden, dan Yang Maha Kuasa. Apabila hubungan agama dan tradisi ditempatkan sebagai wujud interpretasi sejarah dan kebudayaan, maka semua domain agama adalah kreatifitas manusia yang sifatnya sangat relatif. Dengan kata lain, kebenaran agama diyakini setiap orang sebagai yang ‘benar’ pada dasarnya sebatas sesuatu yang bisa ditafsirkan dan diekspresikan oleh manusia yang bersifat relatif atas “kebenaran” Tuhan yang absolut. *Ibid.*, hlm. 150.

Pendekatan multikulturalisme merupakan perspektif penting dalam implementasi demokratisasi di Indonesia. Multikulturalisme pada prinsipnya adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai suatu kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, maupun agama. Multikulturalisme memberi penegasan seseorang atau kelompok bahwa dengan segala perbedaannya diakui dan sama dalam ruang publik. Pendekatan multikulturalisme pada masyarakat plural secara kebudayaan dan sosial ekonomi merupakan prasyarat mutlak dalam menciptakan proses demokratisasi.

Mahasiswa mengakui bahwa pendalaman pengetahuan dan teori mereka atas kompleksitas identitas etnis dan kebudayaan masih serba terbatas,⁷⁶ padahal kemampuan dan kecerdasan dalam proses ini akan menciptakan kesadaran dan perhatian mahasiswa terhadap kesediaan membangun sebuah identitas yang terbuka dari komunitas masyarakat dan entitas budaya. Multikulturalisme hendaknya dipahami sebagai respon sistematis dan komprehensif terhadap diversitas kultural serta etnis dengan memperhitungkan mekanisme pendidikan, bahasa, komponen sosial, ekonomi dan kelembagaan lokal. Dalam negara demokratis, kelompok-kelompok masyarakat seharusnya dibiasakan mengartikulasikan nilai-nilai dan siap mengevaluasinya dalam diskursus publik yang rasional.

⁷⁶ Wawancara dengan beberapa mahasiswa, seperti Toguan Rambe, Agustianda, Ramadhan, Siti Aisyah, Titik Nurmanja, Sulaiman dan lainnya. Wawancara dilakukan pada tanggal 7 – 14 Juli 2013.

Pembiaran kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi yang kerap terjadi di sejumlah daerah membuktikan bahwa negara, akademisi, dan para pemangku kepentingan belum sepenuhnya mampu memenuhi dan bahkan cenderung mengabaikan hak-hak kelompok minoritas, sekaligus berlawanan dengan keadaan Indonesia yang dianggap sebagai sebuah negara yang multikultural. Pemerintah pusat dan daerah justru terkesan tunduk terhadap aspirasi kelompok mayoritas dan mengabaikan hak-hak minoritas.

Oleh karena itu, kedepannya semangat pemahaman mahasiswa, sebagai agen dan penggiat keharmonisan, akan multikulturalisme dan pluralisme Indonesia mutlak perlu terus didorong dan dipahamkan secara mendalam dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Agar masyarakat, sebagai medan pengabdian mahasiswa, dapat menyadari hak-hak individu yang tidak boleh dilanggar oleh individu lain. Perbedaan yang ada di masyarakat jelas berimplikasi pada banyaknya penafsiran yang berbeda terhadap suatu hal, maka dalam masyarakat yang multikultur dan plural, kontribusi mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama mutlak diperlukan untuk menyamakan persepsi terhadap suatu hal agar ke depannya konflik dapat diatasi dengan baik.

Mahasiswa sepenuhnya memahami bahwa agama oleh pemeluknya diyakini sebagai jalan keselamatan, bahkan klaim keselamatan itu pada setiap umat agama seringkali berlaku eksklusif. Artinya masing-masing umat beragama meyakini bahwa agamanya lah yang merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Sedangkan agama

yang lain dianggap sebagai tidak syah atau setidaknya merupakan sebentuk penyimpangan. Inilah yang bisa kita pahami dari sebagian penafsiran atas doktrin, sebagaimana sering dikutip dalam makalah mahasiswa, *extra exlesia nula solum* (di luar gereja tidak ada keselamatan) bagi kalangan Kristiani atau doktrin yang mengatakan *waman yabtaghi ghaira al-Islama dinan fala yuqbalu minhu* (barangsiapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima). Kalau demikian kenyataannya, maka selanjutnya bagaimakah mahasiswa memahami adanya pandangan agama-agama terhadap kemajemukan /keberagaman budaya. Lebih tepatnya bagaimana umat beragama menempatkan kehidupan beragama di tengah masyarakat yang multi-budaya (multikultural). Sampai disini, mahasiswa masih belum bergerak dari konsep, apa yang peneliti sebut sebagai “tirani inklusifisme”.⁷⁷

Sebagaimana pengertiannya, multikulturalisme adalah sebuah diskursus budaya. Multikulturalisme adalah sebuah paham tentang kultur yang beragam. Abdullah menyatakan multikulturalisme sebagai sebuah paham yang menekankan kesenjangan dan kesetaraan budaya-budaya lokal dengan tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang ada. Dengan kata lain penekanan utama multikulturalisme adalah pada kesetaraan budaya. Multikulturalisme sebenarnya juga merupakan

⁷⁷ Istilah ini, peneliti munculkan untuk menggambarkan orientasi mahasiswa tentang hubungan agama dan multikulturalisme yang masih ambigu. Mereka cukup memahami teks-teks Islam (wahyu) yang menegaskan konsep keberbagai dan keragaman. Tetapi ketika pemahaman terhadap teks tersebut dituntut aplikasinya, mahasiswa menyatakan bahwa pemahaman tersebut sebatas wacana, mis-orientasi dalam penerapannya..

konsep dimana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, etnis maupun agama. Sebuah konsep yang memberikan pemahaman kita bahwa sebuah bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan keanekaragaman budaya (multikultur). Bangsa yang multikultur adalah bangsa dengan kelompok-kelompok etnik atau budaya (*etnik and kultural groups*) yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co-existence* yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain. Dalam pengertian semacam ini maka multikulturalisme itu meskipun tidak sama persis sejajar dengan pengertian pluralisme.⁷⁸

Subjek selanjutnya yang ingin dieksplor dari mahasiswa, peneliti memulai dengan pertanyaan mendasar. Adakah agama yang tidak menggunakan perangkat kebudayaan? Adakah sebuah agama yang datang dari Tuhan yang berupa seperangkat sistem tatanan hidup yang siap pakai untuk segala waktu dan tempat? Adakah agama (Islam) murni, yang tidak menggunakan pranata simbolik, atau kultural yang dimiliki masyarakat manusia. Lalu adakah orang yang lahir dalam agama?

Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dieksplor dan direfleksikan mengingat setiap agama demikian juga Islam lahir untuk manusia. Dan ketika manusia hadir, ia menapaki realitas hidupnya

⁷⁸ Abdullah, "Diversitas Budaya, Hak-hak Budaya Daerah, dan Politik Lokal di Indonesia", dalam Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal, Ed. Gunawan, Jamil, et al., (Jakarta: LP3ES, 2005)

senantiasa dihadapkan pada dan oleh tradisi yang berkembang disekitarnya. Tradisi itulah yang memberi makna, warna, norma, dan adat-istiadat sehingga manusia bisa bertahan dalam sebuah komunitas dengan etika dan estetika yang dimiliki. dengan demikian, jawaban-jawaban atas pertanyaan di atas tampaknya bersifat negatif. Artinya secara objektif harus dikatakan tidak ada satu agamapun yang tidak menggunakan perangkat simbolik dan kultural ketika hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Agama juga bukan seperangkat juklak yang siap pakai dalam segala waktu dan zaman. Sebaliknya, agama adalah sesuatu yang terus ditafsir dan dikembangkan. Respon mahasiswa dalam persoalan ini, sekali lagi, tidak memadai.⁷⁹

Apakah kebudayaan itu? Berbagai defenisi telah diberikan orang. Pembatasan singkat di sini akan meminjam defenisi dari Tarif Khalidi, penulis Palestina yang mengajar di Universitas Amerika, Beirut. Menurut Khalidi, terminologi kebudayaan (*culture* dalam bahasa Inggris atau *hadharah* dalam bahasa Arab) itu sendiri adalah problematis. Perkataan *hadharah* tidak dijumpai dalam peradaban Islam klasik. Yang terdekat dengan pendekatan itu pada masa awal adalah *atsar* yang berarti bekas, peninggalan atau warisan, materiil dan intelektual, dari masa lampau. Kebudayaan, pada dasarnya, menurut Khalidi, bermakna “pola pikiran plus gaya hidup” (*tought pattern plus lifestyle*).

⁷⁹ Respon mahasiswa terhadap rangkaian pertanyaan tersebut cukup pasif, sembari beralibi, sebagaimana dinyatakan oleh informan. “kenapa sejauh itu pertanyaan, toh para senior di atas kami yang sudah alumni, dalam skripsinya tidak pernah membahas persolan-persoalan seperti itu”.

Dalam makna yang terakhir ini, kebudayaan punya hubungan fungsional yang sangat erat dengan agama sebab pola pikir dan gaya hidup seseorang, sekelompok orang, atau suatu bangsa akan sangat dipengaruhi oleh agama yang dianut, sesuai dengan persepsi dan tafsirannya terhadap agama itu. Permasalahan yang cukup krusial adalah, apakah agama bagian dari kebudayaan? Dalam pandangan Islam, agama berasal dari Tuhan, bukan hasil daya cipta atau rekayasa manusia, dan sebagai doktrin, Islam adalah satu. Akan tetapi pada saat doktrin itu turun ke bumi, memasuki lingkaran kebudayaan, wajah agama menjadi bermacam-macam (misalnya corak Arab Saudi, Iran, Indonesia, Afghanistan, Nigeria, Libia, dan sebagainya). Corak dan ekspresi yang bermacam-macam itu adalah kultural. Jika Islam dijadikan contoh, sebagai sistem, iman Islam adalah satu, tetapi sebagai kultural, ternyata Islam itu banyak dan bervariasi.

Selain merupakan penceran makna Islam itu sendiri serta pandangan tentang kesatuan kenabian (*wahdat al-nabawiyah; the unity of prophet*) berdasarkan makna Islam itu, serta konsisten dengan semangat prinsip-prinsip itu semua, kosmopolitanisme budaya Islam juga mendapat pengesahan-pengesahan langsung dari kitab suci seperti suatu pengesahan berdasarkan konsep-konsep kesatuan kemanusiaan (*wihdat al-insaniyah; the unity of humanity*) yang merupakan kelanjutan konsep kemahaesaan Tuhan (*wahdaniyat atau tawhid; the unity of god*). Kesatuan asasi ummat manusia dan kemanusiaan itu ditegaskan dalam firman-firman:

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

"Ummat manusia itu tak lain adalah ummat yang tunggal, tapi kemudian mereka berselisih (sesama mereka) jika seandainya tidak ada keputusan (kalimah) yang telah terdahulu dari Tuhanmu, maka tentulah segala perkara yang mereka perselisihkan itu akan diselesaikan (sekarang juga)". (Q.S. Yunus/10 : 19).⁸⁰

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ
مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

"Ummat manusia itu dulunya adalah ummat yang tunggal, kemudian Allah mengutus para nabi untuk membawa kabar gembira dan memberi peringatan dan bersama para nabi itu diturunkannya kitab suci dengan membawa kebenaran, agar kitab suci itu dapat memberi keputusan tentang hal-hal yang mereka perselisihkan..." (Q.S. Al-Baqarah/2 : 213)⁸¹

Para pengikut Nabi Muhammad diingatkan untuk selalu menyadari sepenuhnya kesatuan kemanusiaan itu dan berdasarkan kesadaran itu mereka membentuk pandangan budaya kosmopolit, yaitu

⁸⁰ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Qur'an, 1992), hlm. 308.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 51

sebuah pola budaya yang konsep-konsep dasarnya meliputi, dan diambil dari seluruh budaya ummat manusia.⁸²

Refleksi dan manifestasi kosmopolitanisme Islam bisa dilacak dalam etalase sejarah kebudayaan Islam sejak jaman Rasulullah, baik dalam format non material seperti konsep-konsep pemikiran, maupun yang material seperti seni arsitektur bangunan dan sebagainya. Pada masa awal Islam, Rasulullah Saw berkhutbah hanya dinaungi sebuah pelepah kurma. Kemudian, tatkala kuantitas kaum muslimin mulai bertambah banyak, dipanggillah seorang tukang kayu Romawi. Ia membuatkan untuk Nabi sebuah mimbar dengan tiga tingkatan yang dipakai untuk khutbah Jumat dan aktifitas-aktifitas dakwah lainnya.

Kemudian dalam perang Ahzab, Rasul menerima saran Salman al-Farisy untuk membuat parit (khandaq) di sekitar Madinah. Metode ini adalah salah satu metode pertahanan ala Persi. Rasul mengagumi dan melaksanakan saran itu. Beliau tidak mengatakan: "Ini metode Majusi, kita tidak memakainya!". Para sahabat juga meniru manajemen administrasi dan keuangan dari Persi, Romawi dan lainnya. Mereka tidak keberatan dengan hal itu selama menciptakan kemashlahatan dan tidak bertentangan dengan nash. Sistem pajak jaman itu diadopsi dari Persi sedang sistem perkantoran (*diwan*) berasal dari Romawi.⁸³

Pengaruh filsafat Yunani dan budaya Yunani (*Hellenisme*) pada umumnya dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam sudah

⁸² Nurkholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, cet. II, 1992) hlm. 442.

⁸³ Qardhawi, *Khashais*, hlm. 253

bukan merupakan hal baru lagi. Seperti halnya budaya Yunani, budaya Persia juga amat besar sahamnya dalam pengembangan budaya Islam. Jika dinasti Umayyah di Damascus menggunakan sistem administratif dan birokratif Byzantium dalam menjalankan pemerintahannya, dinasti Abbasiyah di Baghdad (dekat Tesiphon, ibu kota dinasti Persi Sasan) meminjam sistem Persia. Dan dalam pemikiran, tidak sedikit pengaruh-pengaruh Persianisme atau Aryanisme (Iranisme) yang masuk ke dalam sistem Islam. Hal ini terpantul dengan jelas dalam buku al-Ghazali (ia sendiri orang Parsi), *Nashihat al-Mulk, Siyasat Namah* (pedoman pemerintahan), yang juga banyak menggunakan bahan-bahan pemikiran Persi.⁸⁴

Walaupun Islam sebagai agama bersifat universal yang menembus batas-batas bangsa, ras, budaya, klan dan peradaban, tak bisa dinapikan bahwa unsur Arab mempunyai beberapa keistimewaan dalam Islam. Ada hubungan kuat yang mengisyaratkan ketiadaan kontradiksi antara Islam sebagai agama dengan unsur Arab. Menurut Dr. Imarah, hal ini bisa dilihat dari beberapa hal :*Pertama*, Islam diturunkan kepada Muhammad bin Abdullah, seorang Arab. Juga, mukjizat terbesar agama ini, al-Quran, didatangkan dengan bahasa Arab yang jelas (al-Mubin), yang dengan ketinggian sastranya dapat mengungguli para sastrawan terkemuka Arab sepanjang sejarah. Sebagaimana memahami dan menguasai al-Quran sangat sulit dengan bahasa apapun selain Arab. Implikasinya, Islam menuntut pemeluknya jika ingin menyelami dan

⁸⁴ Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, hlm. 444

mendalami makna kandungan al-Quran, maka hendaknya mengarabkan diri.

Kedua, dalam menyiaran dakwah Islam yang universal, bangsa Arab berada di garda depan, dengan pimpinan kearaban Nabi dan al-Quran, kebangkitan realita Arab dari segi "sebab turunnya wahyu" dengan peran sebagai buku catatan interpretatif terhadap al-Qur'an dan lokasi dimulainya dakwah di jazirah Arab sebagai "peleton pertama terdepan" di barisan tentara dakwahnya. *Ketiga*, jika agama-agama terdahulu mempunyai karakteristik yang sesuai dengan konsep Islam lokal, kondisional dan temporal, pada saat Islam berkarakteristikkan universal dan mondial, maka posisi mereka sebagai "garda terdepan" agama Islam adalah menembus batas wilayah mereka.⁸⁵

Walaupun begitu, menurut pengamatan Ibnu Khaldun, seorang sosiolog dan sejarawan muslim terkemuka, bahwa di antara hal aneh tapi nyata bahwa mayoritas ulama dan cendekiawan dalam agama Islam adalah 'ajam (non Arab), baik dalam ilmu-ilmu syari'at maupun ilmu-ilmu akal. Meskipun diantara mereka orang Arab secara nasab, tetapi mereka 'ajam dalam bahasa, lingkungan pendidikan dan gurunya.⁸⁶

Lebih lanjut, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa bersamaan dengan meluasnya daerah Islam, muncullah banyak masalah dan bid'ah, bahasa Arab sudah mulai terpolusikan, maka dibutuhkan kaidah-kaidah

⁸⁵ Muhammad Imarah, *Al-Islam wa al-'Arubah*, (al-Haiah-Mashriyah al-'Ammah li al-Kitab, 1996) hlm. 11-12

⁸⁶ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Beirut, cet. VII, 1989) hlm. 543.

Nahwu. Ilmu-ilmu syari'at menjadi keterampilan atau keahlian istinbath, deduktif, teoritisasi dan analogi. Ia membutuhkan ilmu-ilmu pendukung yang menjadi cara-cara dan metode-metode berupa pengetahuan undang-undang bahasa Arab dan aturan-aturan istinbath, qiyas yang diserap dari aqidah-aqidah keimanan berikut dalil-dalilnya, karena saat itu muncul bid'ah-bid'ah dan *ilhad (atheisme)*.

Maka jadilah ilmu-ilmu ini semua ilmu-ilmu keterampilan yang membutuhkan pengajaran. Hal ini masuk dalam golongan komoditi industri, dan sebagaimana telah dijelaskan, bahwa komoditi industri adalah peradaban orang kota sedangkan orang Arab adalah sangat jauh dari hal ini.⁸⁷ Ibnu Khaldun menyebutkan, intelektual-intelektual yang mempunyai kontribusi sangat besar dalam ilmu Nahwu seperti Imam Sibawaih, al-Farisi, dan al-Zujjaj. Mereka semua adalah 'ajam. Begitu juga intelektual-intelektual dalam bidang hadits, usul fiqh, ilmu kalam dan tafsir. Benarlah sabda Rasulullah; "Jika saja ilmu digantungkan di atas langit, maka akan diraih oleh orang-orang dari Persia".⁸⁸

Kita lihat juga bahwa budaya Persia -budaya yang pernah jaya dan saat Islam masuk- ia sedang menyusut, adalah memiliki pengaruh yang demikian dalam, luas, dinamis dan kreatif terhadap perkembangan peradaban Islam. Sebagai misal, al-Ghazali, meskipun ia kebanyakan menulis dalam bahasa Arab sesuai konvesi besar kesarjanaan saat itu, ia juga menulis beberapa buku dalam bahasa Persi. Lebih dari itu, dalam

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 544

⁸⁸ *Ibid.*

menjabarkan berbagai ide dan argumennya, dalam menandaskan mutlaknya nilai keadilan ditegakkan oleh para penguasa, ia menyebut sebagai contoh pemimpin yang adil itu tidak hanya Nabi saw dan para khalifah bijaksana khususnya Umar bin Khattab, tetapi juga Annushirwan, seorang raja Persia dari dinasti Sasan.⁸⁹

Menarik untuk diketengahkan juga walaupun saat ini Persia atau Iran menjadikan Syiah sebagai madzhab, namun lima dari penulis kumpulan hadits Sunni dan Kutub as-Sittah berasal dari Persia. Mereka adalah Imam Bukhari, Imam Muslim al-Naisaburi, Imam Abu Dawud al-Sijistani, Imam al-Tirmidzi dan Imam al-Nasai. Dari paparan di atas, menunjukkan kepada kita betapa kebudayaan dan peradaban Islam dibangun diatas kombinasi nilai ketaqwaan, persamaan dan kreatifitas dari dalam diri Islam yang universal dengan akulturasi timbal balik dari budaya-budaya lokal luar Arab yang terIslamkan. Pun tidak hendak mempertentangkan antara Arab dan non Arab. Semuanya tetap bersatu dalam label "muslim".

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَانُكُمْ

"Yang terbaik dan termulia adalah yang paling taqwa". (Q.S. Al-Hujurat/49 : 13).⁹⁰

لَيْلَوْكُمْ أَيُّكُمْ أَخْسَنُ عَمَلاً

⁸⁹ Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, hlm. 547-548.

⁹⁰ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Qur'an, 1992), hlm. 847

"yang paling suci, yang paling banyak dan ikhlas kontribusi amalnya untuk kemulian Islam". (Q.S. Al-Mulk/67: 2).⁹¹

Seperti di kemukakan di atas, Islam adalah agama yang berkarakteristikkan universal, dengan pandangan hidup (*weltanchaung*) mengenai persamaan, keadilan, takaful, kebebasan dan kehormatan serta memiliki konsep teosentrisme yang huinanistik sebagai nilai inti (core value) dari seluruh ajaran Islam, dan karenanya menjadi tema peradaban Islam.⁹²

Pada saat yang sama, dalam menerjemahkan konsep-konsep langitnya ke bumi, Islam mempunyai karakter dinamis, elastis dan akomodatif dengan budaya lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Permasalahannya terletak pada tata cara dan teknis pelaksanaan. Inilah yang diistilahkan Gus Dur dengan "primumisasi Islam".

Upaya rekonsiliasi memang wajar antara agama dan budaya di Indonesia dan telah dilakukan sejak lama serta bisa dilacak buktinya. Masjid Demak adalah contoh konkret dari upaya rekonsiliasi atau akomodasi itu. Ranggon atau atap yang berlapis pada masa tersebut diambil dari konsep 'Meru' dari masa pra Islam (Hindu-Budha) yang terdiri dari sembilan susun. Sunan Kalijaga memotongnya menjadi tiga susun saja, hal ini melambangkan tiga tahap keberagamaan seorang muslim; iman, Islam dan ihsan. Pada mulanya, orang baru beriman saja

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 955.

⁹² Kuntowijoyo, *Paridigma Islam*, (Bandung: Mizan, cet. III, 1991), hlm. 229.

kemudian ia melaksanakan Islam ketika telah menyadari pentingnya syariat. Barulah ia memasuki tingkat yang lebih tinggi lagi (ihsan) dengan jalan mendalami tasawuf, hakikat dan makrifat.⁹³

Hal ini berbeda dengan Kristen yang membuat gereja dengan arsitektur asing, arsitektur Barat. Kasus ini memperlihatkan bahwa Islam lebih toleran terhadap budaya lokal. Budha masuk ke Indonesia dengan membawa stupa, demikian juga Hindu. Islam, sementara itu tidak memindahkan simbol-simbol budaya Islam Timur Tengah ke Indonesia. Hanya akhir-akhir ini saja bentuk kubah disesuaikan. Dengan fakta ini, terbukti bahwa Islam tidak anti budaya. Semua unsur budaya dapat disesuaikan dalam Islam. Pengaruh arsitektur India misalnya, sangat jelas terlihat dalam bangunan-bangunan mesjidnya, demikian juga pengaruh arsitektur khas mediterania. Budaya Islam memiliki begitu banyak varian.⁹⁴

Yang patut diamati pula, kebudayaan populer di Indonesia banyak sekali menyerap konsep-konsep dan simbol-simbol Islam, sehingga seringkali tampak bahwa Islam muncul sebagai sumber kebudayaan yang penting dalam kebudayaan populer di Indonesia. Kosakata bahasa Jawa maupun Melayu banyak mengadopsi konsep-konsep Islam. Taruhlah, dengan mengabaikan istilah-istilah kata benda yang banyak sekali dipinjam dari bahasa Arab, bahasa Jawa dan Melayu juga menyerap kata-kata atau istilah-istilah yang berkenaan

⁹³ Abdurrahman Wahid, "Pribumisasi Islam dalam Islam Indonesia, Menatap Masa Depan" (P3M, Jakarta cet. I, 1989) hlm. 92.

⁹⁴ Kuntowijoyo, *Paridigma Islam*, hlm. 92.

dengan ilmu pengetahuan. Istilah-istilah seperti wahyu, ilham atau wali misalnya, adalah istilah-istilah pinjaman untuk mencakup konsep-konsep baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam khazanah budaya populer.⁹⁵

Dalam hal penggunaan istilah-istilah yang diadopsi dari Islam, tentunya perlu membedakan mana yang "Arabi-sasi", mana yang "Islamisasi". Penggunaan dan sosialisasi terma-terma Islam sebagai manifestasi simbolik dari Islam tetap penting dan signifikan serta bukan seperti yang dikatakan Gus Dur, menyibukkan dengan masalah-masalah semu atau hanya bersifat pinggiran.⁹⁶

Begitu juga penggunaan term shalat sebagai ganti dari sembahyang (berasal dari kata 'nyembah sang Hyang') adalah proses Islamisasi bukannya Arabisasi. Makna substansial dari shalat mencakup dimensi individual-komunal dan dimensi peribumisasi nilai-nilai substansial ini ke alam nyata. Adalah naif juga mengganti salam Islam "Assalamu'alaikum" dengan "Selamat Pagi, Siang, Sore ataupun Malam". Sebab esensi doa dan penghormatan yang terkandung dalam salam tidak terdapat dalam ucapan "Selamat Pagi" yang cenderung basa-basi, selain salam itu sendiri memang dianjurkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya.

Dalam syariat Islam yang dinamis dan elastis, terdapat landasan hukum yang dinamakan 'urf. 'Urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh manusia, baik berupa perbuatan yang

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 235.

⁹⁶ Wahid, *Pribumisasi Islam dalam Islam Indonesia*, hlm. 92

terlakoni diantara mereka atau lafadz yang biasa mereka ucapkan untuk makna khusus yang tidak dipakai (yang sedang baku).

Dari segi shahih tidaknya, 'urf terbagi dua: 'urf shahih dan fasid. Yang pertama adalah adat kebiasaan manusia yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, seperti kebiasaan seorang istri tidak dapat pindah ke rumah suaminya kecuali setelah menerima sebagian dari mahar, karena mahar terbagi dua; ada yang didahulukan dan ada yang diakhirkhan. Sedangkan yang diberikan oleh si peminang pada saat tunangan di anggap hadiah bukan bagian dari mahar.⁹⁷ 'Urf Shahih ini wajib diperhatikan dalam proses pembuatan hukum dan pemutusan hukum di pengadilan yang disebabkan adat kebiasaan manusia, kebutuhan dan kemashlahatan mereka. 'Urf Fasid adalah adat kebiasaan manusia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal seperti kebiasaan makan riba, ikhthilath (campur baur) antara pria dan wanita dalam pesta.⁹⁸ 'Urf ini tidak boleh digunakan sumber hukum, karena bertentangan dengan syariat. Validitas 'urf dalam syariah diambil dari ayat;

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Berilah permaafan, perintahkan dengan yang makruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh". (Q.S. Al-A'raf/7: 199)⁹⁹

⁹⁷ Wahbah Zuhaili, "Ushul Fiqh al-Islami" (Beirut, cet.I,1986) jilid II, hlm. 833.

⁹⁸ Ibid., hlm. 830.

⁹⁹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Qur'an, 1992), hlm. 255

Dan dari ucapan Ibnu Mas'ud; "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allah adalah baik. Dan sebaliknya yang dipandang jelek oleh mereka, menurut Allah adalah jelek"¹⁰⁰

Dari dua dalil ini para fuqaha madzahib arba'ah menjadikan 'urf sebagai landasan hukum. Dalam banyak hal, syara' tidak memberikan batasan-batasan yang kaku, akan tetapi memberikan kelonggaran kepada 'urf untuk menentukan hukumnya. Seperti dalam ayat;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقٌ هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Kewajiban suami memberikan rizki dan pakaian kepada mereka (isteri-isterinya) dengan makruf.". (Q.S. Al-Baqarah/2: 233).¹⁰¹

Karenanya, ulama ushul merumuskan sebuah kaidah, *al-'adah muhakkamah*. Dan 'urf memiliki i'tibar (pertimbangan) dalam syara'. Imam Malik membangun banyak hukum-hukumnya atas dasar amal penduduk Madinah. Abu Hanifah dan pengikutnya berselisih pendapat dalam beberapa masalah karena menimbang perbedaan 'urf. Al-Syafi'i tatkala tinggal di Mesir merubah sebagian hukum yang ia tetapkan di Bagdhad karena perbedaan 'urf.¹⁰² Bahkan, Imam al-Qarafi al-Maliki, menjelaskan dalam kitabnya; "al-Ahkam", bahwa melanggengkan

¹⁰⁰ Terhadap al-hadits ini, al-Zair'a'i berkata; ghaarib marfu'. Yang benar, al-hadit ini mauquf kepada Ibnu Mas'ud. Lihat. "Nashbu al Rayah" IV: 133. (Diriwayatkan oleh Ahmad al-Bazzar dan al-Thabrani dalam kitab "al-Kabir" dari Ibnu Mas'ud, rijalnya tsiqat (Majma' al-Zawai I:178)

¹⁰¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Qur'an, 1992), hlm. 57

¹⁰² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo, hlm. 90

hukum-hukum yang dasarnya 'urf dan adat, sementara adat kebiasaan itu selalu berubah adalah menyalahi ijma' dan tidak mengetahui agama.¹⁰³

Jika demikian, jelaslah perjalanan sejarah rekonsiliasi antara Islam sebagai agama dan budaya lokal yang melingkupinya serta adanya landasan hukum legitimatif dari syara' berupa 'urf dan mashlahah. Maka untuk strategi pengembangan budaya Islam di Indonesia, kita perlu bervisi ke depan. Kenapa harus budaya? Karena budaya menyentuh seluruh aspek dan dimensi cara pandang, sikap hidup serta aktualisasinya dalam kehidupan manusia. Selain itu, gerakan kultural lebih integratif dan massal sifatnya.

Sehubungan dengan hal ini, patut dicontoh metodologi Sunan Kalijaga dalam menyebarluaskan Islam di Tanah Jawa. Sunan Kalijaga begitu melihat proses keruntuhan feudalisme Majapahit dan digantikan oleh egalitarianisme Islam, ia mendorong percepatan proses transformasi itu, justeru dengan menggunakan unsur-unsur lokal guna menopang efektifitas segi teknis dan operasionalnya. Salah satu yang ia gunakan adalah wayang, juga gamelan yang dalam gabungannya dengan unsur-unsur upacara Islam populer adalah menghasilkan tradisi *sekatenan* di pusat-pusat kekuasaan Islam seperti Cirebon, Demak, Yogyakarta dan Surakarta. Dalam seni musik Islam misalnya, yang mengandung elemen-elemen isi, tujuan, cara penyajian yang Islami, kenapa justru alat musiknya seperti rebana yang lebih diperhatikan. Alat

¹⁰³ Qardhawi, dalam "Khashaish", hlm. 246.

musik itu, menurut hemat penulis, masuk dalam katagori 'urf. Ia bisa berubah sesuai dengan perkembangan jaman.

B. Pendayagunaan Wawasan Mahasiswa

Manusia adalah makhluk berbudaya, karena itu manusia selalu berusaha mewariskan budaya itu kepada anak cucunya. Namun karena perkembangan zaman dan tantangan global budaya manusia itu makin lama akan tererosi dan menjadi hilang sama sekali. Budaya suatu masyarakat akan selalu dijunjung tinggi oleh masyarakat itu dan berusaha terus dipertahankan oleh satu generasi ke generasi berikutnya dengan memelihara kelestariannya melalui kegiatan hidup sehari-hari, karena ternyata budaya itu dapat menjadi perekat warga masyarakat untuk tetap hidup rukun dan damai.

Demikian pula yang terjadi pada bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan di atas, dalam persoalan pendayagunaan wawasan mahasiswa tentang multikulturalisme berbasis kearifan budaya lokal, usaha awal yang dilakukan mahasiswa adalah dengan mengidentifikasi kearifan-kearifan budaya local yang terdapat di kalangan etnis-ethnis di Indonesia dan yang masih dijunjung tinggi serta dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di wilayah nusantara. Identifikasi ini dilakukan oleh mahasiswa melalui dua cara: *pertama*, ketika mahasiswa melakukan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di beberapa wilayah di Sumatera Utara seperti di Kabupaten Karo, Dairi, Simalungan, dan lainnya. *Kedua*, dilakukan mahasiswa di kampung halaman masing-masing ketika libur semester. Di antara beberapa kearifan budaya local yang terdapat dalam masyarakat etnis

yang dapat diidentifikasi oleh mahasiswa adalah gatra-gatra budaya seperti: Slametan, Gotong royong dan Kerja sama.¹⁰⁴

Kata slametan berasal dari bahasa Jawa “*slamet*” yang berarti “selamat” atau terhindar dari bahaya dan malapetaka yang menimpanya. Clifford Geertz dalam bungunya tentang Abangan, Santri, dan Priyayi memberi makna dengan sebuah upacara keagamaan yang melambangkan kesatuan mistis dan sosial, di dalamnya terdapat handai taulan, tetangga, rekan kerja, dan sanak saudara, mereka duduk bersama dan berkeliling di suatu tempat.¹⁰⁵ Bagi masyarakat pedesaan slametan bukan hanya dipandang sebagai sebuah budaya, tetapi merupakan sarana untuk dapat memenuhi niat dan hajat yang diinginkan, misalnya keselamatan atas kelahiran anak, pernikahan, membangun rumah, pindah rumah, memulai usaha dan sebagainya. Di samping itu juga dipergunakan untuk memperingati orang tua, anak, atau saudara yang telah meninggal, sebagai tanda berbakti kepada orang tua, biasanya dilakukan untuk memperingati 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun dan 1000 hari dari wafatnya. Slametan untuk orang yang meninggal ini disertai dengan membaca dzikir dan doa (bagi orang Islam) dan puji-pujian kepada Tuhan (bagi orang Kristen). Semua warga masyarakat Indonesia melestarikan tradisi budaya ini baik dari etnis maupun agama yang berbeda.

¹⁰⁴ Wawancara dengan beberapa mahasiswa seperti, Abdi Rahman, Ilham Sani, Arizki Fitri Sitorus, Syarifah, dll, wawancara dilakukan pada tanggal 7-14 Juli.

¹⁰⁵ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi, Dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), hlm. 13.

Menurut beberapa mahasiswa, lestariya tradisi selametan ini memberi makna bahwa masyarakat masih komitmen terhadap budayanya, bahkan mereka berusaha untuk terus melaksanakan. Selametan memberikan dampak psikologis dalam bentuk keseimbangan emosional dan mereka meyakini bakal selamat, tidak terkena musibah setelah mereka melakukan kegiatan ini. Selanjutnya menurut beberapa mahasiswa, dipandang dari sudut keharmonisan, tradisi selamatan ini memperkuat kerukunan, karena warga duduk bersama, mempunyai keyakinan yang sama dengan niat dan hajat yang sama, sehingga hati mereka diharapkan sama, bersatu padu tidak ada dendam satu sama lainnya. Memang, menurut mahasiswa, sedikit ada perubahan pandangan antara selametan zaman dulu dan zaman sekarang. Lebih lanjut seperti dijelaskan oleh mahasiswa, kalau zaman dulu lebih cenderung membaca doa dan mantera yang ditujukan kepada roh-roh halus yang menurut keyakinan waktu itu, dialah yang memberikan keselamatan kepada mereka. Tetapi zaman sekarang bacaan dan doa itu tidak ditujukan kepada roh-roh halus, tetapi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mengatur makhluk hidup di alam semesta ini, hanya saja model-model upacaranya tidak banyak berubah dibandingkan yang lalu.¹⁰⁶

Di samping selametan, tradisi kearipan budaya lokal yang tetap dilestarikan oleh warga masyarakat Indonesia, yang telah diidentifikasi oleh mahasiswa adalah “Gotong Royong”, yaitu tolong menolong antar sesama warga masyarakat pada waktu punya hajat

¹⁰⁶ Wawancara, *Ibid.*

perkawinan, kematian, membangun rumah, membangun tempat ibadah, membangun jalan, irrigasi pengairan sawah dan lain-lain. Misalnya dalam merayakan pesta perkawinan, mereka tidak menyewa gedung, bagi yang mampu menyewa tenda pesta, bagi yang tidak mampu membuat arena pesta dengan gotong royong menggunakan peralatan apa adanya dan dilakukan oleh para tetangga dan sanak saudaranya.¹⁰⁷

Seperti dinyatakan mahasiswa, khususnya Suhaila, salah satu tradisi gotong royong dalam pelaksanaan pesta perkawinan, dikenal dengan tradisi “rewang”. Tradisi ini sudah berlangsung lama, dan tetap bertahan sampai sekarang serta rutin dilaksanakan masyarakat Indonesia. Setiap kali pesta perkawinan dilakukan, maka tradisi rewang senantiasa menyertainya. Tradisi rewang ini dianggap penting oleh masyarakat, karena bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ‘berat’ yang ada dalam acara atau pesta perkawinan. Di samping itu, kebiasaan ini juga mengandung nilai-nilai yang positif. Secara fungsional nilai ini mendorong individu atau warga masyarakat untuk berprilaku seperti yang sudah ditentukan. Mereka percaya, bahwa hanya dengan berprilaku seperti itu mereka akan berhasil. Sistem nilai ini menjadi pedoman yang melekat erat secara emosional pada diri seseorang atau sekumpulan orang, malah merupakan tujuan hidup yang diperjuangkan. Dapat pula dikatakan bahwa system nilai budaya suatu masyarakat

¹⁰⁷ Wawancara *Ibid.*

merupakan wujud konsepsional dari kebudayaan mereka yang seolah-olah berada di luar dan di atas para individu warga masyarakat itu.¹⁰⁸

Partisipasi yang ditunjukkan masyarakat dalam tradisi rewang ini tidak termasuk kelompok partisipasi terpaksa, karena memang tidak ada kelompok masyarakat yang memaksakan seseorang untuk ikut ambil bagian. Dengan demikina partisipasi dalam tradisi rewang lebih mengarah kepada partisipasi suka rela atau sebagian mungkin partisipasi ikut-ikutan. Hal ini terlihat dari sikap masyarakat terhadap kegiatan ini, mereka dengan penuh kesadaran merasa bertanggung jawab terhadap suksesnya acara tersebut, dan tidak jarang masyarakat menilai, merupakan suatu "keaiban" jika ada tetangga atau teman dekat tidak mengikutkan dirinya sebagai anggota rewang. Dalam tradisi rewang ini sanksi yang diterapkan sifatnya lebih banyak sanksi sosial, dan tidak ada sanksi yang bersifat hukuman. Oleh karena itu, kegiatan ini memang sepenuhnya menuntut kesadaran masyarakat untuk terlibat sepenuhnya.¹⁰⁹ Partisipasi lain yang ditunjukkan oleh masyarakat, adalah kerelaan mereka meminjamkan berbagai peralatan yang dibutuhkan dalam acara perkawinan tersebut. Masyarakat akan membawa sendiri atau memintakan kepada peserta rewang lainnya untuk menjemput barang-barang tersebut di rumahnya, dan setelah selesai acara, barang-barang ini akan diantarkan kembali oleh anggota rewang ke rumah pemiliknya.

¹⁰⁸ Usman Pelly & Asih Menanti, *Teori-Teori Sosial Budaya*, (Jakarta: B3 PTKSM P2TKPT, Ditjen DIKTI DEPDIKBUD, 1993), hlm. 102.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Suhailah yang pernah melakukan penelitian tentang pelaksanaan tradisi rewang di kabupaten Simalungun. (8, Juli 2013)

Tradisi rewang yang diduga kuat berasal dari masyarakat Jawa dan dibawa oleh pendukungnya ke tanah Melayu – Indonesia – telah mengalami berbagai perubahan, karena adanya perpaduan dengan budaya lokal. Budaya rewang yang sebelumnya terkesan feodalisme di daerah asalnya, karena ada eksplorasi dari masyarakat yang berpunya terhadap masyarakat miskin dalam bidang pertanian – menjadi lebih egaliter di tanah Melayu. Hal ini dikarenakan budaya Melayu yang identik dengan Islam dan memiliki watak demokratis, egaliter, terbuka, dan kosmopolit.¹¹⁰

Terjadinya perpaduan antara tradisi rewang dengan budaya Melayu lokal merupakan hal yang menarik, karena budaya rewang yang terkesan feodalisme mendapatkan tempat dalam masyarakat Melayu yang menganut budaya egaliter. Setelah menjalani proses panjang, manak bagian-bagian tertentu dari budaya yang berbeda tersebut dipadukan dalam satu sistem pelaksanaan dan nilai yang saling berhubungan serta mengambil satu pola baru yang bisa diterima oleh pendukungnya.¹¹¹

Diterimanya tradisi rewang oleh masyarakat Melayu Indonesia, karena adanya kesamaan unsur-unsur yang mendasar, yaitu semangat gotong royong, tolong menolong, rasa kebersamaan, rukun, solidaritas

¹¹⁰ Bandingkan dengan Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran "Civil Society" Dalam Islam Indonesia*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 10-19.

¹¹¹ Tentang proses ini data diperoleh dari wawancara dengan Arrizki Fitri Sitorus, salah seorang mahasiswa Perbandingan Agama yang bermukim di Kabupaten Asahan. Di wilayah inilah proses pemelaryuan tradisi rewang cukup dominan. (wawancara 8 Juli 2013).

dan setia kawan dan lain sebagainya yang dapat dibingkai dengan istilah harmoni sosial. Dengan demikian unsur feudalisme yang terkandung dalam tradisi asalnya tergeser dengan sendirinya. Oleh karena itu, tradisi rewang bisa diterima oleh masyarakat karena adanya titik singgung dengan budaya lokal atau budaya masyarakat setempat. Di samping itu, masyarakat juga melihat bahwa tradisi ini sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan geografis dan juga mempunyai nilai guna atau bermanfaat bagi kehidupan.¹¹²

Rewang tidak hanya mampu mengatur perilaku sosial anggotanya, tetapi juga mempunyai nilai yang praktis dan ekonomis. Melalui tradisi rewang masyarakat mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih mudah dan cepat, serta sangat membantu keluarga pelaksana atau yang mempunyai hajatan dari sisi ekonomis. Hal ini karena adanya sumbangan dan kerelaan dari anggota masyarakat dalam membantu keluarga yang melangsungkan acara perkawinan. Di samping itu, rewang juga menciptakan ikatan moril yang lebih erat, baik antar keluarga, maupun antar individu dalam masyarakat. Karena dengan adanya tradisi rewang ini akan mampu menghubungkan ikatan-ikatan persaudaraan yang sudah agak merenggang dan bisa meredakan konflik-konflik kecil yang terjadi di tengah masyarakat.¹¹³

Tradisi rewang telah mampu meretas lintas batas etnis, stratifikasi sosial, dan status sosial yang ada di tengah masyarakat. Dengan demikian, tradisi ini sifatnya egaliter dan kosmopolit. Tidak ada

¹¹² Ibid.

¹¹³ Wawancara dengan Suhaila.

lagi kesan feodalistik dan eksplotatif, yang ada hanyalah bagaimana upaya pencapaian tujuan bersama. Setiap anggota masyarakat akan menikmati kegunaan dan manfaat dari tradisi ini, apabila keluarga mereka melaksanakan pesta perkawinan.

Nilai-nilai solidaritas sosial sangat nyata terkandung dalam tradisi rewang ini, dimana masyarakat merasakan senasib sepenanggungan sehingga mereka harus saling bahu membahu membantu menyelesaikan pekerjaan bersama. Tradisi ini juga tidak membedakan kelompok etnis dan umur, sehingga semangat egaliterianisme tampak begitu menonjol. Masing-masing warga masyarakat membantu sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Warga masyarakat Indonesia dalam melaksanakan tradisi ini tidak membedakan antara warga masyarakat yang telah lama tinggal (penduduk tempatan) dengan warga pendatang (warga baru). Mereka diperlakukan sama, dengan catatan, tentu saja mereka harus menunjukkan sikap sosial kemasyarakatannya. Biasanya, jika ada warga masyarakat lama mempunyai acara, mereka tidak akan lupa mengundang warga baru tersebut untuk terlibat dalam kegiatan tersebut, dari undangan pertama inilah akan terlihat bagaimana respon warga baru terhadap kegiatan tersebut.¹¹⁴

Budaya kerja sama di Bangsa ini masih berjalan bagus dan terus dibangun agar budaya ini tidak pudar. Misalnya tiap bulan Agustus di Bangsa Indonesia diselenggarakan perayaan hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk

¹¹⁴ *Ibid*

kesyukuran masyarakat atas anugerah Tuhan pada bangsa ini, yaitu kemerdekaan. Katena itu semua warga negara termasuk masyarakat Indonesia tidak ada yang ketinggalan ikut merayakannya. Bentuk perayaan itu bermacam-macam, mulai dari yang sederhana sampai dengan pentas pertunjukkan yang meriah.

Bentuk yang sederhana adalah "sujud syukur" bagi orang Islam dan "memuji Allah" bagi orang Kristen, kemudian mengibarkan bendera "Merah Putih" di tepi jalan rumah penduduk masing. Merapikan jalan-jalan desa, dengan mengecat pagar-pagar di tepi jalan berwarna putih dengan bahan dari kapur. Menampilkan kesenian tradisional. Yang lebih meriah lagi adalah mengadakan pertunjukkan rakyat dengan berbagai atraksi budaya dan pentas kesenian yang dimiliki warga masyarakat. Seluruh kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan melakukan kerja sama antar warga tanpa membedakan agama dan status sosial ekonominya. Termasuk biaya pelaksanaan kegiatan peringatan ini dipikul bersama warga masyarakat.

Dengan demikian masyarakat Bangsa Indonesia tetap melakukan tradisi budaya seperti acara adat, gotong royong, dan kerja sama untuk membuktikan bahwa mereka hidup harmoni. Perubahan jaman terus berjalan, arus informasi dan globalisasi tidak dapat dibendung, di wilayah ini kemajuan teknologi telah dinikmati warga seperti radio, televisi, handphone dan sebagainya. Karena itu konservasi budaya budaya tidak bisa dijalankan dengan penuh. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya beberapa perubahan tradisi, dimana dulu pada umumnya ditujukan pada roh-roh nenek moyang, tetapi sekarang

dijadikan sarana untuk berdoa kepada Tuhan. Gotong royong juga semakin berkurang sejalan dengan mobilisasi manusia, dimana anak-anak muda desa sudah banyak yang pindah ke kota.

Setelah melakukan identifikasi terhadap gatra-gatra budaya yang dipergunakan sebagai kearifan local tersebut. Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh mahasiswa adalah turut terlibat secara aktif dalam proses-proses tersebut baik ketika sedang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan ketika kembali ke kampung halaman sewaktu libur semester. Kemudian strategi yang dipayangkan mahasiswa adalah mengedukasi, mensosialisasikan dan memperkuat tradisi-tradisi tersebut dengan menjalin komunikasi dan kerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pihak pemerintah, kelompok-kelompok remaja dan para penggiat-penggiat budaya. Proses ini dilakukan mahasiswa dalam upaya mereka mendayagunakan kearifan budaya local sebagai solusi menuju kehidupan keberagamaan yang harmonis, damai dan rukun.

Dari aktifitas mahasiswa tersebut, menurut mereka masih banyak tradisi dan kearifan-kearifan local yang penting untuk dieksplorasi dan selanjutnya didayagunakan dalam menjalin interaksi yang harmonis antara umat beragama dan antar kelompok etnik.

C. Strategi Penguatan Wawasan Mahasiswa tentang Multikulturalisme Berbasis Kearifan Lokal

- Evaluasi dan Penyempurnaan Kurikulum

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, untuk mewujudkan semua itu muatan kurikulum dalam sebuah perguruan tinggi tentulah sesuatu yang

sangat penting. Kurikulum memiliki makna yang beragam baik antar negara maupun antar institusi penyelenggara pendidikan. Hal ini disebabkan karena adanya interpretasi yang berbeda terhadap kurikulum, yaitu dapat dipandang sebagai suatu rencana (plan) yang dibuat oleh seseorang atau sebagai suatu kejadian atau pengaruh aktual dari suatu rangkaian peristiwa. Sementara itu menurut Kepmendiknas No. 232/U/2000 di definisikan sebagai berikut: "*kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar – mengajar di perguruan tinggi.*"

Kurikulum adalah sebuah program yang disusun dan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Jadi kurikulum bisa diartikan sebuah program yang berupa dokumen program dan pelaksanaan program. Sebagai sebuah dokumen kurikulum (curriculum plan) dirupakan dalam bentuk rincian matakuliah, silabus, rancangan pembelajaran, sistem evaluasi keberhasilan. Sedang kurikulum sebagai sebuah pelaksanaan program adalah bentuk pembelajaran yang nyata dilakukan (*actual curriculum*). Dengan cara pandang yang lebih luas kurikulum bisa berperan sebagai :

1. Kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah pendidikannya,
2. Filosofi yang akan mewarnai terbentuknya iklim akademik,
3. Patron atau pola pembelajaran,
4. Atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial pendidikan tinggi dalam mencapai tujuan pembelajarannya,

5. Rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu
6. Ukuran keberhasilan pendidikan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan uraian diatas, nampak bahwa kurikulum tidak hanya berarti sebagai suatu dokumen saja, namun mempunyai peran yang kompleks dalam proses pendidikan.

Penyusunan mata kuliah ke dalam semester biasanya berdasarkan pada struktur atau berdasarkan urutan tingkat kerumitan dan kesulitan ilmu yang dipelajari. Kurikulum semacam ini yang sering disebut kurikulum berbasis isi (*content based curriculum*). Dalam hal ini jarang dipertimbangkan apakah nanti relevan dengan kebutuhan masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*) atau tidak. Alternatif penyusunan kurikulum yang berbasis pada kompetensi yang diusulkan, dimulai dengan langkah – langkah berikut :

1. Penyusunan profil lulusan, yaitu peran dan fungsi yang diharapkan dapat dijalankan oleh lulusan nantinya di masyarakat
2. Penetapan kompetensi lulusan berdasarkan profil lulusan yang telah dirancang
3. Penentuan bahan kajian yang terkait dengan bidang program studi
4. Penetapan kedalaman dan keluasan kajian (skls) yang di lakukan dengan menganalisis hubungan antara kompetensi dan bahan kajian yang perlukan
5. Merangkai berbagai bahan kajian tersebut kedalam mata kuliah
6. Menyusun struktur kurikulum dengan cara mendistribusikan mata kuliah tersebut dalam semester
7. Mengembangkan rancangan pembelajaran dan secara simultan
8. Memilih metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensinya.

Tahapan – tahapan di atas dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Penetapan Profil Lulusan

Yang dimaksud dengan profil adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat / dunia kerja. Profil ini adalah outcome pendidikan yang akan dituju. Dengan menetapkan profil, perguruan tinggi bahkan sebuah prodi dapat memberikan jaminan pada calon mahasiswanya akan bisa berperan menjadi apa saja setelah ia menjalani semua proses pembelajaran di program studinya. Untuk menetapkan profil lulusan, sebagai basis penyempurnaan kurikulum Prodi Perbandingan Agama tahun 2012 difokuskan pada penguatan ketrampilan lulusan dalam mendayagunakan dan mengelola multikulturalisme berbasis kearifan budaya lokal di tengah-tengah masyarakat

b. Perumusan Kompetensi Lulusan

Setelah menetapkan profil lulusan program studi sebagai *outcome* pendidikan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh lulusan program studi sebagai output pembelajarannya. Kompetensi lulusan bisa didapat lewat kajian terhadap tiga unsur yaitu nilai – nilai yang dicanangkan oleh perguruan tinggi atau sebuah prodi (*university values*), visi keilmuan dari program studinya (*scientific vision*), dan kebutuhan masyarakat pemangku kepentingan (*need assesment*). Kompetensi ini terbagi dalam tiga katagori yaitu kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya, yang kesemuanya akhirnya menjadi rumusan kompetensi lulusan. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa kompetensi utama merupakan kompetensi penciri lulusan sebuah program studi,

sedangkan kompetensi pendukung adalah kompetensi yang ditambahkan oleh program studi sendiri untuk memperkuat kompetensi utamanya dan mencari ciri keunggulan program studi tersebut. Sedang kompetensi lainnya adalah kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh program studi sendiri sebagai ciri lulusannya dan untuk memberi bekal lulusan agar mempunyai keluasan dalam memilih bidang kehidupan serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Maka focus kompetensi yang menjadi basis penyempurnaan kurikulum 2012 adalah mahasiswa memiliki kecerdasan kognitif tentang simbiosa agama dan multikulturalisme, kemudian kompetensi pendukung mahasiswa memiliki kecakapan dalam penggunaan teori-teori antropologi dan sosiologi kebudayaan.

c. Menyusun Struktur Kurikulum

Setelah diperoleh perkiraan besarnya sks setiap mata kuliah, maka langkah selanjutnya adalah menyusun mata kuliah tersebut di dalam semester. Penyajian mata kuliah dalam semester ini sering di kenal sebagai struktur kurikulum. Secara teoritis terdapat dua macam pendekatan struktur kurikulum, yaitu **pendekatan serial**, dan **pendekatan parallel**. Pendekatan serial adalah pendekatan yang menyusun mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Pada pendekatan serial ini, mata kuliah disusun dari yang paling dasar (berdasarkan logika keilmuannya) sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Setiap mata kuliah saling berhubungan, dengan ditujukan dari adanya mata kuliah pre-requisite (prasyarat). Mata kuliah yang tersaji di semester awal akan menjadi

syarat bagi mata kuliah diatasnya. Sisi lain dengan adanya mata kuliah prasyarat sering menjadi penyebab melambatnya kelulusan mahasiswa karena bila salah satu mata kuliah prasyarat tersebut gagal dia harus mengulang di tahun berikutnya.

Dengan demikian kurikulum bisa disusun dengan lebih bervariasi. Hanya yang terpenting bukan kebenaran strukturnya tetapi kurikulum harus dilihat sebagai program untuk mencapai kompetensi lulusan yang harus dilaksanakan. Kurikulum tidak hanya sekedar dilihat dari dokumen dan struktur kurikulumnya saja, namun perlu diikuti dengan pembelajarannya, agar outcome yang ditetapkan dapat benar-benar tercapai.

Pada dasarnya penyusunan kurikulum Program Studi Perbandingan Agama pada tahun 2010 berpedoman pada Keputusan Mendiknas No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian hasil Belajar Mahasiswa yang diperkuat dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Dengan demikian, pada intinya penyusunan kurikulum Program Studi Perbandingan Agama 2010 didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu; (1) perimbangan antara kurikulum inti yang ditetapkan secara nasional dengan kurikulum institusional yang sesuai dengan kompetensi program studi dan tuntutan para pengguna, dan (2) pengutamaan kompetensi lulusan sesuai dengan spesifikasi Program Studi Perbandingan Agama yang berkonsentrasi pada rumpun keilmuan Pemikiran dan studi agama-agama.

Pada tahun 2010 Pimpinan Fakultas Ushuluddin menetapkan untuk melaksanakan peninjauan kurikulum Program Studi Perbandingan Agama. Ketetapan ini didasarkan pada "Panduan Peninjauan Dan Penyempurnaan Kurikulum Fakultas Ushuluddin" yang menyatakan bahwa "Peninjauan dan penyempurnaan kurikulum merupakan suatu keniscayaan bagi lembaga pendidikan tinggi agar mampu beradaptasi dengan perkembangan tuntutan kebutuhan stakeholders dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Jadi, pada dasarnya alasan peninjauan kurikulum di sini tidak berdasarkan pada keadaan mendesak karena adanya perubahan mendasar, melainkan lebih pada penyesuaian bidang-bidang ilmu yang diajarkan dengan perkembangan kontemporer di bidang ilmu-ilmu kewahyuan.

Hasil peninjauan kurikulum pada tahun 2010 ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

1. Memperkuat kembali basik keilmuan yang menjadi spesifikasi keushuluddinan, seperti penambahan beban sks Ilmu Kalam, Filsafat Islam, dan Pemikiran Modern Dalam Islam.
2. Memperkuat dan memperluas basik dan wawasan keilmuan yang berkaitan dengan kompetensi Program Stdui yaitu bidang Ilmu Kalam/Teologi Islam, Filsafat/Filsafat Islam, dan Tasawuf/Tarekat.

Penyempurnaan Struktur Mata Kuliah

Sebagaimana diatur dalam buku Panduan Peninjauan dan Penyempurnaan Kurikulum Fakultas Ushuluddin, pada dasarnya istilah penyempurnaan di sini tidak merupakan perubahan secara mendasar, melainkan lebih melengkapi kekurangan-kekurangan yang ditemukan.

Tahun 2012 dikonsentrasikan untuk menyiasati kekurangan kurikulum 2010 dan kemudian membuat penyempurnaannya.

Penyempurnaan kurikulum Program Studi pada 2012 diarahkan untuk memperbaiki struktur dan distribusi mata kuliah pilihan dengan mempertimbangkan hal, terbatasnya pemberian pilihan alternatif kepada mahasiswa dalam hal mata kuliah pilihan, khususnya yang terkait dengan penguatan profile dan kompetensi lulusan (multikulturalisme dan kearifan budaya lokal). Karena itu perlu penambahan sejumlah mata kuliah yang dapat dipilih untuk memberi kebebasan kepada mahasiswa memilih sesuai minatnya khususnya yang terkait dengan penguatan kompetensi dimaksud.

Untuk menutupi kekurangan tersebut, maka dilaksanakan penyusunan ulang struktur mata kuliah dan penambahan beberapa mata kuliah pilihan. Hal ini dilakukan untuk kurikulum Program Studi Perbandingan Agama. Hasil penyempurnaan kurikulum tahun 2012 adalah sebagai berikut;

SEMESTER I			SEMESTER II		
KODE	MATA KULIAH	K	KODE	MATA KULIAH	K
MPK INS 001	Ilmu Tauhid	2	MPK INS 009	Ushul Fiqh	2
MPK INS 002	Akhlik/Etika	2	MPK INS 010	Fiqh	2
MPK INS 003	Ulumul Qur'an	2	MPK INS 011	Tafsir Alquran I	2
MPK INS 004	Ulumul Hadis	2	MPK INS 012	Hadis I	2
MPK INS 005	Pancasila	2	MPK INS 013	Bahasa Arab II	2
MPK INS 006	Bahasa Indonesia	2	MPK INS 014	Bahasa Inggeris II	2
MPK INS 007	Bahasa Arab I	4	MBB INS 001	IAD, ISD, IBD	2
MPK INS 008	Bahasa Inggeris I	4	MPB INS 001	Komputer	2
MKK INS 001	Praktikum Bahasa Arab	P	MKK PA 001	Civic Education	2
MKB INS 002	Praktikum Tashih Alquran	P	MKK PA 002	Sejarah Agama	2

MKB	INS	003	Praktikum	Bahasa P
			- Inggris	
MKB	INS	004	Praktikum Komputer	P
			JUMLAH	20

JUMLAH 20

SEMESTER III			SEMESTER IV		
KODE	MATA KULIAH	K	KODE	MATA KULIAH	K
MPK INS 015	Sejarah Peradaban Islam I	2	MPK INS 019	Metodologi Studi Islam II	2
MPK INS 016	Metodologi Studi Islam I	2	MKK INS 001	Metode Penelitian Ilmiah I	2
MPK INS 017	Kewirausahaan	2	MPK INS 020	Agama-Agama Besar Dunia	2
MPK INS 018	Manajemen Organisasi	2	MKB PA 008	Ilmu Perband. Agama II	2
MKK PA 003	Ilmu Perband. Agama I	2	MKK PA 009	Ilmu Kalam II	2
MKK PA 004	Kristologi I	2	MKK PA 010	Hadis III (Hub. Umat 2 Beragama)	
MKK PA 005	Hadis II (Perb. Agama)	2	MKK PA 011	Tafsir Alquran II (Perb. 2 Agama)	
MKK PA 006	Ilmu Kalam I	2	MKK PA 012	Filsafat Islam	2
MKK PA 007	Filsafat Umum	2	MKK PA 013	Antropologi Agama I	2
MKB PA	Mata Kuliah Pilihan	2	MKB PA 014	Mata Kuliah Pilihan	2
MKB PA 001	Ibadah	P	MKB INS 005	Bahasa Arab	P
MKB PA 002	Analisis Teologi Agama	P	MKB INS 006	Tahfiz Alquran	P
JUMLAH			JUMLAH		

SEMESTER V			SEMESTER VI		
KODE	MATA KULIAH	K	KODE	MATA KULIAH	K
MKK INS 002	Met. Penelitian Ilmiah II (Perb. 2 Agama)		MKK PA 022	Pemikiran Teologi Transformatif	2
MPK INS 021	Filsafat Ilmu	2	MKK PA 023	Kepercayaan Lokal	2
MKK PA 015	Aliran Kepercayaan	2	MKK PA 024	Metodologi Studi Agama	2
MKK PA 016	Kristologi II	2	MKK PA 025	Hinduisme/Budhisme	2
MKK PA 017	Kutub Muqarranah Adyan	2	MKK PA 026	Filsafat Agama	2
MKK PA 018	Hubungan Antar Agama	2	MKK PA 027	Psikologi Agama	2

Penyempurnaan Mata Kuliah dan Materi Silabus

Penyempurnaan mata kuliah baru pada kurikulum 2012, dirasa perlu dilaksanakan untuk menyesuaikan materi mata kuliah yang lama dengan perkembangan mutakhir pengetahuan di Studi Perbandingan Agama. Untuk maksud ini pada tahun 2012 pimpinan Fakultas Ushuluddin memutuskan untuk melakukan penyempurnaan silabus yang dilimpahkan kepada Gugus Penjaminan Mutu Akademik (GPMA) sebagai kordinator.

Hasil dari penyempurnaan mata kuliah dan materi silabus pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

IDENTITAS

- | | |
|---------------------|--|
| 1.. Nama Matakuliah | : RELIGI DAN BUDAYA LOKAL DI NUSANTARA |
| 2. Program Studi | : Perbandingan Agama |
| 3. Fakultas | : Ushuluddin |
| 4. Bobot | : 2 sks |
| 5. Alokasi Waktu | : - |

UNSUR-UNSUR SILABUS

Standar Kompetensi : Mahasiswa mampu mengapresiasi perbedaan untuk bersama-sama menegakkan prinsip keadilan dan persamaan dalam konteks pemahamannya terhadap religi dan budaya lokal yang ada di nusantara.

Materi:

- Orientasi Awal: Kontrak Belajar dan penjelasan konsep-konsep Kunci
- Beberapa pendekatan dalam mengkaji religi dan budaya lokal

- c. Karakteristik religi dan budaya lokal
- d. Struktur keyakinan dan ajaran
- e. Bentuk-bentuk ritual dan upacara
- f. Religi dan budaya lokal di Sumatra (Kubu, Talang Mamak, Mentawai, dll)
- g. Religi dan budaya lokal di Jawa (Aliran Kebatinan, Masyarakat Samin, Baduy, Tengger, dll).
- h. Religi dan budaya lokal di Kalimantan (Dayak, Banjar, dll)
- i. Religi dan budaya lokal di Sulawesi
- j. Religi dan budaya lokal di Indonesia Timur (Papua, Maluku, Flores, Timor, dll).
- k. Eksistensi Religi dan budaya lokal di Antara Agama-Agama di Indonesia.
- l. Kebijakan Pemerintah tentang religi dan budaya lokal nusantara
- m. Religi dan budaya lokal di nusantara dalam perspektif Islam
- n. Kajian-kajian tentang religi dan budaya lokal di nusantara

Sumber Belajar

- Ritta Smith Kipp, Susan Rodgers (eds.), *Indonesian Religions in Transition*, (Tucson: The University of Arizona Press, 1987)
- Mr. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Antar-golongan di Indonesia*, (Bandung's Gravenhage: Vorkink van Hoeve, tt.)
- Clifford Geertz, *The Religion of Java*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1960)
- Ali Yafi, dkk, *Agama dan Pluralitas Bangsa*, (Jakarta: P3M, 1994).

INTEGRASI DAN INTERKONEKSI

1. Matakuliah pendukung integrasi dan interkoneksi:
 - a. Sosiologi
 - b. Sosiologi Agama
 - c. Antropologi Agama
 - d. Psikologi Agama
 - e. Tauhid/ Ilmu Kalam
 - f. Islam dan Budaya Lokal
 - g. SPI
2. Level Integrasi-Interkoneksi
3. Proses Integrasi-Interkoneksi

Untuk dapat memahami persoalan religi dan kebudayaan lokal baik pada level teologi (keyakinan), sejarah, dan genealogi harus mengetahui serangkaian teori yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Ketika hal ini dikaitkan dengan etos keislaman dan keindonesiaan, maka sangat dibutuhkan berbagai perspektif untuk melihat hal itu. Oleh karena itu dalam setiap level, kajian terhadap religi dan kebudayaan lokal terkait dengan berbagai pendekatan.

IDENTITAS

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Nama Matakuliah | : HERMENEUTIKA |
| 2. Program Studi | : Perbandingan Agama |
| 3. Fakultas | : Ushuluddin |
| 4. Bobot | : 2 sks |
| 5. Alokasi Waktu | : 1.400 Menit. |

UNSUR-UNSUR SILABUS

- | | |
|--------------------|--|
| Standar Kompetensi | : Mahasiswa mampu memahami corak berpikir dan konsep-konsep hermeneutika kontemporer dan implikasi serta aplikasinya baik hermenutika sebagai metode, maupun sebagai kritik. |
|--------------------|--|

Materi:

- a. Defenisi dan ruang lingkup kajian hermeneutika
- b. Jenis-jenis hermeneutika
- c. Hermeneutika sebagai metode dn hermeneutika sebagai filsafat pemahaman
- d. Sejarah hermeneutika
- e. Dasar teoritis filosofis hermeneutika modern
- f. F.D.E. schleiermacher
- g. Wilhelm Dilthey.
- h. Emillio Betty
- i. Rudolf Bultmanni
- j. Hans Georg Gadamer.
- k. Paul Riceouer.
- l. Jurgen Habermas
- m. Jacques Derrida

n. Clifford Geertz

Sumber Belajar

- E. Sumaryono, *Hermeneutika Tentang Sebuah Metode Filsafat*.
- Poespoprodjo, *Interpretasi, Beberapa Catatan Pendekatan Falsafati*
- Palmer, Richard E, *Hermeneutics: Interpretations Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*.
- Bleicher, Josef, *Contemporary Hermeneutics, Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique*.
- Zygmunt Bauman, *Hermeneutics and Social Scinece*,
- Braaten, Carl, *History and Hermeneutics*
- Roy Z Howard, *Hermeneutika: Wacana Analitik, Psikososial dan Ontologis*

INTEGRASI DAN INTERKONEKSI

1. Matakuliah pendukung integrasi dan interkoneksi:
 - a. Filsafat Ilmu
 - b. Filsafat Barat Modern dan Kontemporer
 - c. Filsafat Bahasa
 - d. Sosiologi
 - e. Antropologi
 - f. Psikologi
2. Level Integrasi-Interkoneksi
 - a. Materi
 - b. Metodologi
3. Proses Integrasi-Interkoneksi
 Hermeneutika sebagai sebuah metodologi “pembaca realitas” tidak hanya mengandalkan refleksi rasional tetapi juga menimbang konteks, sehingga untuk memahami Hermeneutika harus juga mengenal sosiologi, antropologi dan juga psikologi.

IDENTITAS

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama Matakuliah | : ISLAM DAN BUDAYA LOKAL/SUMATERA UTARA |
| 2. Program Studi | : Perbandingan Agama |
| 3. Fakultas | : Ushuluddin |

4. Bobot : 2 sks
 5. Alokasi Waktu : 14 x 90 Menit.

UNSUR-UNSUR SILABUS

Standar Kompetensi : Mahasiswa mampu memahami dan mengapresiasi corak serta perbedaan untuk bersama-sama menegakkan prinsip keadilan dan persamaan dalam konteks pemahamannya terhadap Islam dan budaya lokal yang ada di Sumatera Utara.

Materi:

- a. Defenisi agama dan kebudayaan
 - 1. Kebudayaan: global, nasional, lokal
 - 2. Agama
 - 3. Persebaran dan perubahan kebudayaan
- b. Kebudayaan Sumatera Utara: Unsur dan Wujud
- c. Kebudayaan Pra-Islam
 - 1. Pra-Hindu
 - 2. Masa kerajaan Hindu
 - 3. Masa kerajaan Budha
 - 4. Masa akhir kerajaan Majapahit
- d. Pertemuan Islam dengan budaya Sumatera Utara
 - 1. Masuknya Islam di Sumatera Utara
 - 2. Masa kerajaan Islam di Sumatera Utara
 - 3. Masa sebelum kemerdekaan
 - 4. Masa kemerdekaan
- e. Nilai-nilai keislaman dalam budaya Sumatera Utara
 - 1. Tradisi dan kepercayaan, adat dan upacara
 - 2. Mistik, kerohanian, kejiwaan, dankebathinan
 - 3. Sikap hidup kejawen
 - 4. Bahasa dan sastra
 - 5. Kesenian
 - 6. Arsitektur
 - 7. Sistem politik pemerintahan
 - 8. Sistem pengetahuan
 - 9. Sistem kemasyarakatan/pergaulan hidup/kekerabatan

f. Pemaparan makalah mahasiswa

Sumber Belajar

- Abdullah,Taufik . 2001. "Integrasi Nasional, Globalisasi dan Kearifan Lokal", *Antropologi Indonesia*, Th. XXVI, No. 65
- Abdon Nababan, *Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1995).
- Afif HM., *Pola Interaksi Sosial Etnik Melayu dan Jawa Di Kota Pekanbaru: Studi tentang Peran Agama dalam Proses Adaptasi Sosial*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2007)
- Craig J. Calchoon, Francis A.J. Iani, (ed), *The Anthropological Study of Education*, (Paris: The Hague Movton Publisher, 1976).
- Clifford Geertz, *The Interpretation of Culture*, (New York: Basic Book.Inc Publisher, 1973).
- Clifford Geertz, *Lokal Knowledge, Futher Essays in Interpretative Anthropology*, (New York: Basic Book Inc. Publisher, 1983),
- Dananjaja,James. 1986. *Foklor Indonesia*, Jakarta: PT Grafiti Press.
- Endang Turmudi, *Kearifan lokal dan Problem Ortodoksi Agama*, Makalah disampaikan dalam seminar Pengembangan Kerukunan Bergama Melalui Revitalisasi Budaya dan Keraifan Lokal Guna Membangun Kebudayaan Nasional, Badang Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 25 Agustus 2005.

INTEGRASI DAN INTERKONEKSI

1. Matakuliah pendukung integrasi dan interkoneksi:
 - a. Antropologi Agama
 - b. Sosiologi
 - c. Fenomenologi Agama
 - d. Tafsir
 - e. hadis
 - f. SPI
 - g. Metodologi Penelitian Agama

- h. Ilmu Kalam/Tauhid
- i. Filsafat Agama
- j. Filsafat Islam
- k. Sosiologi Agama
- l. Hinduisme
- m. Budhisme

2. Level Integrasi-Interkoneksi

Filosofis, ketika penjelasan mengenai konsep-konsep teologis sangat memerlukan kerangka pikir filosofis, dan dalam hal ini diskursus kajian teologis dalam Islam dan budaya lokal/ Sumatera Utara banyak dibahas dalam karya-karya filosofis Sumatera Utara. Misalnya bagaimana filsafat Islam- Sumatera Utara menggagas persoalan ini; ditambah lagi wacana teologi yang ada dalam Islam dan budaya lokal/ Sumatera Utara juga terkoneksi dengan kajian ilmu kalam/tauhid pada level konsep ketuhanan.

Materi, kajian-kajian dalam Islam dan budaya lokal/ Sumatera Utara melibatkan data dari berbagai agama, termasuk Islam, sehingga antara konsep-konsep dalam Islam dan budaya lokal/ Sumatera Utara dengan konsep-konsep dalam agama lain merupakan jaringan data yang luas dalam rangka studi agama dan studi Islam.

Metodologi, mengkaji Islam dan budaya lokal/ Sumatera Utara, sebagai sebuah agama, dalam kerangka *religious studies* dan *Islamic studies* membutuhkan objek formal yang beragam, sehingga secara metodologi kajian terhadap satu agama merupakan bagian dari *religious studies* dan *Islamic studies* yang memerlukan pendekatan yang beragam pula.

Proses Integrasi-Interkoneksi

Untuk dapat memahami Islam dan budaya lokal/ Sumatera Utara baik pada level teologi dan sejarah harus mengetahui serangkaian teori yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Ketika hal ini dikaitkan dengan etos keislaman dan keindonesiaan, maka sangat dibutuhkan berbagai perspektif untuk melihat hal itu. Oleh karena itu, dalam setiap level, kajian terhadap Islam dan budaya lokal/ Sumatera Utara sebagai bagian dari kajian agama dan kajian Islam terkait dengan berbagai pendekatan.

Di samping beberapa penambahan subjek mata kuliah sebagaimana dipaparkan di atas, pengelola prodi Perbandingan Agama, dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada masih terus melakukan proses evaluasi, perumusan dan penyempurnaan kurikulum dalam upaya maksimalisasi dan penguatan profile dan kompetensi lulusan, khususnya dalam bidang multikulturalisme dan kearifan budaya lokal. Pengelola jurusan juga sedang mengupayakan dan merumuskan model praktikum berbasis multicultural dan kearifan budaya lokal. Upaya strategis lainnya yang sedang dipersiapkan pengelola jurusan adalah dengan mendesain laboratorium sebagai *pilot project* multicultural yang di dalamnya berisi semacam ensikopedi dan katalog etnik-etnik, lembaga-lembaga, pranata-paranata, dan kearifan-kearifan lokal yang ada di Sumatera Utara.

Pengembangan dan Penguatan Kerja sama

Dalam melakukan pengelolaan penguatan kompetensi lulusan khususnya dalam bidang kajian multikulturalisme dan kearifan budaya lokal, pengelola Jurusan Perbandingan agama juga menjalin berbagai bentuk kerja sama (MoU) kepada instansi pemerintah maupun swasta yang berada di dalam negeri maupun luar negeri, kerjasama tersebut dilakukan untuk melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian dosen dan mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama di institusi yang melakukan kerjasama tersebut.

No. (1)	Nama Instansi (2)	Jenis Kegiatan (3)	Target Manfaat (6)
------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

1	Forum Kerukunan Umat Beragama Sumatera Utara (FKUB)	Praktikum Pemagangan. Seminar Kerukunan Pelatihan Kader Penyuluhan Kerukunan	Mahasiswa dapat memahami peta dan problema keberagamaan di Sumatera Utara serta mampu menganalisis dan memberikan solusi serta berkontribusi bagi harmonisasi keberagamaan di Sumatera Utara
2	Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan	Praktikum Pemagangan Workshop Kehidupan Keberagamaan	Mahasiswa memiliki kepekaan dan ketrampilan dalam pengelolaan lembaga-lembaga sosial-keagamaan serta memperkuat wawasan multi-religi.
2	Forum Perempuan Peduli Kerukunan Sumatera Utara (FPPK-SU)	Pembuatan modul dan program kerja Perempuan peduli kerukunan Sumatera Utara	Mahasiswa mampu mengenali peran dan kontribusi perempuan dalam usaha harmonisasi kehidupan keberagamaan sekaligus terlibat dalam rencana strategis dan rencana aksi kerukunan
3	Persatuan Ugamo Malim	Penelitian dan Studi banding	Memperluas wawasan multikultur dan multietnik mahasiswa serta mampu memahami konsep-konsep kearifan agama lokal.
4	STAKPN Tarutung	Penelitian dan Studi banding	Memperkuat wawasan dan kepekaan mahasiswa terhadap keragaman kearifan budaya-budaya lokal.
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Dairi	Penelitian dan Studi banding	Memperluas wawasan multikultur dan multietnik mahasiswa serta mampu menggali nilai-nilai kearifan lokal dalam upaya pemanfaatannya bagi pengelolaan kerukunan kehidupan sosial-keagamaan.
6	Museum Silalahi T.B. Centre Balige	Penelitian dan Studi banding	Memperluas wawasan mahasiswa tentang kekayaan dan keragaman budaya-budaya lokal dan usaha pemanfaatannya.
7	Juru Pelihara Situs Tapanuli Tengah, Barus	Penelitian dan Studi banding	Memperluas wawasan mahasiswa tentang kekayaan dan keragaman budaya-budaya lokal dan usaha pemanfaatannya

8	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Sumatera Utara	Praktikum Pemagangan. Seminar Kerukunan Pelatihan Kader Penyuluhan Kerukunan	Mahasiswa dapat memahami peta dan problema keberagaman dan Keberbagaiannya baik etnis maupun agama di Sumatera Utara serta mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi serta berkontribusi bagi harmonisasi keberagamaan di Sumatera Utara
---	---	---	---

Dalam jangka panjang kerjasama ini akan terus dilakukan penguatan dan pengembangan dengan pihak-pihak terkait agar lulusan Jurusan Perbandingan Agama dapat dikenal dan mempunyai wawasan kompetensi yang lebih baik lagi. Pengembangan kerjasama yang dilakukan pengelola jurusan difokuskan pada lembaga-lembaga adat dan etnis, penggiat tradisi lokal, pranata-pranata maupun institusi lokal yang ada di Sumatera Utara.

Dalam kurun tiga tahun terakhir Jurusan PA bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, telah menggelar 3 (tiga kali) pelatihan pengelolaan konflik dan hubungan antarumat beragama dengan mengundang nara sumber yang kompeten dalam bidang Pluralitas kehidupan keberagamaan dan multikulturalisme. Selain itu Jurusan Perbandingan Agama dalam setiap tahunnya selalu melaksanakan pelatihan wawasan lingkungan, life skil dan social worker. Pelaksanaan pelatihan ini selalu mendapat sambutan baik dari kalangan civitas akademika Jurusan PA.

Dengan adanya pengembangan dan penguatan kerja sama antar instansi dimaksud, minat dan kecenderungan orientasi mahasiswa terhadap isu multikultural mengalami kemajuan dan peningkatan.

Indikasi ini dapat dilihat dari rencana penelitian skripsi mahasiswa, dimana subjek pembahasannya di fokuskan pada tema-tema multikulturalisme dan kearifan lokal. Beberapa rencana penelitian tersebut di antaranya:

No	Nama	Judul Rencana Penelitian
1	Agustianda	Sistem Kekerabatan Matrilineal Suku Minangkabau di Desa Batu Gadang Kec. Sei Garingging Kab. Padang Pariaman
2	Toguan Rambe	Studi Perbandingan Fungsi Baznas dan Budha Ztu Chi di Kota Medan
3	Titik Nurmanja	Kontribusi Kearifan Lokal Dalam Memelihara Kerukunan: Studi Terhadap Tradisi Rewang Pada Masyarakat Muslim Dan Kristen di Desa Cikampak Kec. Torgamba Kab. Labuhan Batu
4	Nelpa Herliza	Tradisi Mengket Rumah Pada Masyarakat Muslim dan Kristen Etnis Karo di Desa Lau Solu Kec. Mardingding Kab. Karo
5	Desi Arum	Kontribusi Pranata Lokal dalam Membina Harmonisasi Keberagamaan antara Masyarakat Muslim dan Kristen di Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara
6	Diesy Wahyuni	

7	Muhammad Asrul Rozi Bangun	Pendayagunaan Kearifan Dalihan Na Tolu Terhadap Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan Padang Sidempuan Utara
8	Syarifah Laili	Akulturasi Adat dan Agama di Desa Selandi Lama Kec. Payung. Studi Terhadap Ritual Jenajah pada Etnis Muslim Karo
9	Susi Yanti Boru Sitepu	Dinamika Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Muslim dan Kristen di Kec. Simpang Empat Kab. Indonesia
10	Sri Wahyuni	Perspektif Islam dan Kristen Tentang Tradisi Nangkih dalam adat Perkawinan Pada Masyarakat Karo di Desa Ujung Teran Kec. Merdeka Kab. Karo
11	Nursita Pawanti	Multikulturalisme Menurut Agama Islam dan Kristen
		Harmonisasi Umat Beragama di Kelurahan Nagori Marjandji Kec. Panombean Panei Bangsa simalungun
		Dll.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pendekatan multikulturalisme merupakan perspektif penting dalam implementasi demokratisasi di Indonesia. Multikulturalisme pada prinsipnya adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai suatu kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, maupun agama. Multikulturalisme memberi penegasan seseorang atau kelompok bahwa dengan segala perbedaannya diakui dan sama dalam ruang publik. Pendekatan multikulturalisme pada masyarakat plural secara kebudayaan dan sosial ekonomi merupakan prasyarat mutlak dalam menciptakan proses demokratisasi.

Pendalaman pengetahuan atas kompleksitas identitas etnis dan kebudayaan akan menciptakan kesadaran dan perhatian terhadap kesediaan membangun sebuah identitas yang terbuka dari komunitas masyarakat dan entitas budaya. Multikulturalisme merupakan respon sistematis dan komprehensif terhadap diversitas kultural serta etnis dengan memperhitungkan mekanisme pendidikan, bahasa, komponen sosial, ekonomi dan kelembagaan lokal. Dalam negara demokratis, kelompok-kelompok masyarakat seharusnya dibiasakan mengartikulasikan nilai-nilai dan siap mengevaluasinya dalam diskursus publik yang rasional.

Pembiaran kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi yang kerap terjadi di sejumlah daerah membuktikan bahwa negara belum

sepenuhnya mampu memenuhi dan bahkan cenderung mengabaikan hak-hak kelompok minoritas, sekaligus berlawanan dengan keadaan Indonesia yang dianggap sebagai sebuah negara yang multikultural. Pemerintah pusat dan daerah justru terkesan tunduk terhadap aspirasi kelompok mayoritas dan mengabaikan hak-hak minoritas. Oleh karena itu, kedepannya semangat pemahaman akan multikulturalisme dan pluralisme Indonesia mutlak perlu terus didorong dan dipahami secara mendalam dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Agar masyarakat dapat menyadari hak-hak individu yang tidak boleh dilanggar oleh individu lain. Perbedaan yang ada jelas berimplikasi pada banyaknya penafsiran yang berbeda terhadap suatu hal, maka dalam masyarakat yang multikultur dan plural diskusi mutlak diperlukan untuk menyamakan persepsi terhadap suatu hal agar ke depannya konflik dapat diatasi dengan baik. Demikan pentingnya penguatan multikulturalisme dalam pengelolaan kehidupan Beragama dan berkebangsaan, maka mahasiswa jurusan Perbandingan Agama harus mengambil tanggung jawab dan peran utama dalam proses tersebut. Seiring dengan ekspektasi tersebut segera diperlukan usaha bersama dalam upaya penguatan wawasan kompetensi mahasiswa tentang multikulturalisme dan kearifan budaya lokal sekaligus memaksimalkan kecakapan dan ketrampilan pendayagunaannya.

B. Saran

Dalam upaya membangun hubungan sinergi antara multikulturalisme dan agama, minimal diperlukan dua hal. Pertama, mahasiswa harus bersedia dan mampu melakukan penafsiran ulang atas

doktrin-doktrin keagamaan ortodoks yang sementara ini dijadikan dalih untuk bersikap eksklusif dan opresif. Penafsiran ulang itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga agama bukan saja bersikap reseptif terhadap kearifan tradisi lokal, melainkan juga memandu di garda depan untuk mengantarkan demokrasi *built-in* dalam masyarakat-masyarakat beragama.

Kedua, mahasiswa memiliki kecerdasan dalam mendialogkan agama dengan gagasan-gagasan modern. Saat ini, umat beragama memasuki suatu fase sejarah baru di mana mereka harus mampu beradaptasi dengan peradaban-peradaban besar yang tidak didasarkan pada agama, seperti kultur Barat modern. Kita tak mungkin menghindar dari ide-ide dan teori-teori sekuler. Itu berarti, menyentuh istilah-istilah dengan gagasan non-religius itu merupakan tugas paling menantang yang dihadapi kaum Muslim pada zaman modern ini. Hanya dengan transformasi internal dan interaksi dengan gagasan-gagasan modern, agama akan mampu melakukan reformulasi sintesis kreatif terhadap tuntutan multikulturalisme yang telah menjadi semangat zaman.

Bukankah agama mengalami ke-jumud-an saat berhenti belajar dan berdialog dengan peradaban lain? Sekarang saatnya untuk merevitalisasi persenyawaan agama dengan berbagai realitas yang mengitarinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah,Taufik . 2001. "Integrasi Nasional, Globalisasi dan Kearifan Lokal", *Antropologi Indonesia*, Th. XXVI, No. 65
- Abdon Nababan, *Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1995).
- Afif HM., *Pola Interaksi Sosial Etnik Melayu dan Jawa Di Kota Pekanbaru: Studi tentang Peran Agama dalam Proses Adaptasi Sosial*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2007)
- Anton Bakker dan Ahmad Chairis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990).
- Basyuni,Muhammad Maftuh. 2006. *Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Budiaman, dkk, *Foklor Betawi*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1979).
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Ke Arah Penggunaan Model Aplikasi*, (Jakarta: PT. Grafindo Pesada, 2003).
- Craig. J. Calchoon, Francis A.J. Iani, (ed), *The Anthropological Study of Education*, (Paris: The Hague Movton Publisher, 1976).
- Clifford Geertz, *The Interpretation of Culture*, (New York: Basic Book.Inc Publisher, 1973).
- Clifford Geertz, *Lokal Knowledge,Futher Essays in Interpretative Anthropology*, (New York: Basic Book Inc Publisher, 1983),
- Dananjaja,James. 1986. *Foklor Indonesia*, Jakarta: PT Grafiti Press.
- Endang Turmudi, *Kearifan lokal dan Problem Ortodoksi Agama*, Makalah disampaikan dalam seminar Pengembangan Kerukunan Bergama Melalui Revitalisasi Budaya dan Keraifan Lokal Guna Membangun Kebudayaan Nasional, Badang Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 25 Agustus 2005.
- Isn'i Herawati, *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Using, Bangsa Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur*, (Yogyakarta: Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah, 2004).

- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI), 1987).
- Matthew B. Milles dan A. Michael Hubermen, *Analisis Data Kualitatif*, Terj.TjetjepRohendiRohidi (Jakarta::UI Press, 1992)
- Marzani Anwar, *Foklor dan Artinya Bagi Kearifan Lokal masyarakat Propinsi Jambi*, (Jakarta: Badam Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2007)
- Moh. Zahid, *Hukum Adat Perkawinan Adat Lampung Pasca UU Perkawinan*, (Jakarta: Badam Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2007).
- Muhammad, Bushar, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nan Lin, *Foundations of Sosial Reserch*, (New York: MacGrow Hill Book Company, 1976)
- Nababan, Abdon, 1995, *Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*, Centre for Strategic and International Studies.
- Parsudi Suparlan, *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungannya*, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm. V.
- Robertson, Roland, 1995, *Agama; dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Noeng Muhamir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1966),
- Rudy Harisyah Alam, *Kearifan Budaya Betawi dan Kerukunan Hidup Beragama*, (Jakarta: Badam Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2007).
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983),
- Suharsini Akunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendektan Praktek*, (Yogyakarta: Rhineka Cipta, 1992).
- Sumintarsih, *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Nelayan Madura*, (Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2005)
- Sunarto, Kamanto.(eds.). 2004. *Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia: Stepping into the Unfamiliar*, Jakarta, Jurnal Antropologi.

- Suparlan, Parsudi, 2002. *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, Jurnal Antropologi Indonesia,
- Suparlan, Parsudi, 1984, *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungannya*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Sukari, *Kearifan Budaya Lokal di Lingkungan Masyarakat Tengger, Bangsa Pasuruan, Propinsi Jawa Timur*, (Yogyakarta: Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah, 2004).
- Suyami, *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Nelayan Jepara, Jawa Tengah*, (Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2005).
- Titi Mumfanganti, *Kearifan Lokal Di Lingkungan Masyarakat Samin, Bangsa Blora, Provinsi Jawa Tengah*, (Yogyakarta: Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah, 2004).



L